RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PENYESUAIAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
2017

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi yang berorientasi hasil (*result oriented government*) berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 dan perubahan sasaran, arah kebijakan dan strategi nasional perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 - 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Review RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan;

(2) Penjabaran visi dan misi Bupati ke dalam arah kebijakan keuangan daerah baik yang didanai langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dari sumber lain, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program prioritas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

(1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah untuk menetapkan dokumen Review RPJM Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 -2018.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

(1) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah untuk :

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) SKPD; dan

c. penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

(1) SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD;

(2) Rencana Strategis (Renstra) SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJM Daerah;

(3) SKPD melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pendampingan dan verifikasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD.

BAB V
SISTEMATIKA

Pasal 6

RPJM Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud dan tujuan dokumen RPJM Daerah.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berisi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Bupati terpilih.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan program-program pembangunan daerah yang difokuskan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BANGKA YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Bangka yang disertai dengan pendanaannya.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.

BAB X : PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Berisi prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

BAB XI : PENUTUP

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19660608 198603 1 004

KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi yang mengedepankan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan ““**BANGKA BERMARTABAT**” sebagai visi pembangunan tahun 2014 - 2018. Sebuah visi yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang mempunyai harga diri, tatanan masyarakat yang mempunyai tingkat harkat kemanusian yang tinggi dan tercermin dalam keadaan: pertanian yang tangguh, pemerintahan yang bersih dan melayani, rakyat yang sejahtera, dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Untuk memfasilitasi pencapaian visi ini tentu saja mensyaratkan suatu perencanaan jangka menengah yang handal. Karena kami yakin, hanya dengan perencanaan yang handal, pencapaian visi “**BANGKA BERMARTABAT**” dapat tercapai.

Proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2017 sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun nuansa perubahan tersebut secara prinsip tidak merubah fungsi dan tujuan perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan penajaman dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah melatarbelakangi disusunnya RPJMD Penyesuaian Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018. Dengan kata lain, proses penyusunan dokumen perencanaan harus sejalan dengan ketentuan yang berlaku walaupun eksternalitasnya berimbas terhadap adjustment seluruh dokumen perencanaan yang secara *de jure* telah ditetapkan jauh sebelum nomenklatur terkait penyesuaian tersebut.

RPJMD Penyesuaian Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 dilaksanakan dalam rangka sinergisasi tujuan dan sasaran daerah dengan sasaran pokok pembangunan nasional tahun 2015 - 2019 sekaligus menyelaraskan kembali target-target indikator kinerja tahunan berdasarkan

hasil pembangunan daerah. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RPJMD juga diselaraskan dengan Review RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 dan beberapa peraturan terkait lainnya.

Saya percaya kehadiran Dokumen RPJMD Penyesuaian Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 ini, akan menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh stakeholder untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas tersebut.

Akhirnya, Saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka dan stakeholder pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan Review RPJMD ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen Review RPJMD ini disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan. Review RPJMD ini harus menjadi referensi untuk bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang Bermartabat.

Sungailiat, 22 Agustus 2017

BUPATI BANGKA,

TARMIZI SAAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR GRAFIK ix

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 .Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3. Latar Belakang Perubahan I-12
1.4. Hubungan Antar Dokumen I-13
1.5. Sistematika Penulisan I-14
1.6. Maksud dan Tujuan I-16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-39
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-54

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANGKA
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-16
3.3 Kerangka Pendanaan III-26

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bangka IV-1
4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangka IV-8

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi V-3
5.2. Misi V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran V-6

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Pembangunan Sektoral VI-1
6.2. Pembangunan Kewilayahan VI-21

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ...VII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1

BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X-1
10.1. Pedoman Transisi X-1
10.2. Prinsip-prinsip Kaidah Pelaksanaan X-2

BAB XI PENUTUP XI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama-nama Sungai yang ada menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka II-2

Tabel 2.2 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Arah Angin dan Kecepatan AnginRata-rata Menurut Bulan di Kabupaten Bangka Tahun 2013 ..... II-3

Tabel 2.3 Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Udara dan Penyinaran Matahari Rata-rata Menurut Bulan di Kabupaten Bangka Tahun 2013 ..... II-3

Tabel 2.4 Luas dan Nama Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya di Kabupaten Bangka Tahun 2013 ..... II-12

Tabel 2.5 Usulan Revisi Perubahan Status Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Tahun 2013 ..... II-12

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk, Luas Daerah (KM^2) dan Kepadatan per km^2 di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 ..... II-19

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 ..... II-20

Tabel 2.8 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 (jiwa) II-22

Tabel 2.9 Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 (%) II-23

Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Kab. Bangka dengan Timah Tahun 2010-2014 ..... II-24

Tabel 2.11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014 ..... II-27

Tabel 2.12 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014 ..... II-28

Tabel 2.13 Pendapatan per Kapita dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Bangka Tahun 2011-2014 ..... II-29

Tabel 2.14 Koefisien Disparitas Pendapatan Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 ..... II-30

Tabel 2.15 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Bangka pada periode Tahun 2009 hingga 2014 ..... II-32

Tabel 2.16 Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2012-2014 ..... II-32
Tabel 2.17 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bangka Tahun 2011 s.d 2014 (Persen) II-33
Tabel 2.18 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 ..... II-34
Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-35
Tabel 2.20 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-37
Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-38
Tabel 2.22 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-38
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-40
Tabel 2.24 Jenis Akta-akta yang Diterbitkan Kabupaen Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-40
Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-41
Tabel 2.26 Jenis dan Jumlah Koperasi Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-42
Tabel 2.27 Jenis Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-43
Tabel 2.28 Jenis Tenaga Medis dan keperawatan Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 ..... II-43
Tabel 2.29 Panjang Jalan Propinsi dan Kabupaten Menurut Permukaan Jalan (Km), Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 ..... II-45
Tabel 2.30 Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-46
Tabel 2.31 Jumlah Pra KS dan KS 1 Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-46
Tabel 2.32 Jumlah Kearsipan, Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-47

Tabel 2.33 Rata-rata Jumlah Stock Pangan Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Bangka II-47

Tabel 2.34 Jumlah Penduduk Miskin, Penduduk Penyandang Masalah Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-48

Tabel 2.35 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 ..... II-50

Tabel 2.36 Luas Produksi Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-51

Tabel 2.37 Jumlah Populasi dan Industri Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-51

Tabel 2.38 Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan, Land Use dan Hasil Hutan Non HPH Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-53

Tabel 2.39 Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014 ..... II-53

Tabel 2.40 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014 ..... II-55

Tabel 2.41 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2013-2014 ..... II-56

Tabel 2.42 Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2011 s.d 2014 ..... II-57

Tabel 2.43 Klasifikasi Desa di Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2014 ..... II-61

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah) III-4

Tabel 3.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Bangka Tahun 2008-2012 (ribuan rupiah) III-5

Tabel 3.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah) III-11

Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 ..... III-13

Tabel 3.5 Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 ..... III-15

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 ..... III-20

Tabel 3.7 Surplus/(Defisit) Rill Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah)..... III-22

Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah) III-23

Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2013 (ribuan rupiah) III-25

Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka (ribuan rupiah) III-27

Tabel 3.11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka (ribuan rupiah)..... III-28

Tabel 3.12 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (ribuan rupiah)..... III-30

Tabel 3.13 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018(ribuan rupiah)..... III-34

Tabel 3.14 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018 (ribuan rupiah) III-37

Tabel 4.1 Perkembangan *Core Businiss* Perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2008-2012..... IV-1

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangka Tahun 2013-2018..... V-9

Tabel 6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eklsternal untuk Penyusunan Strategi dan Kebijkan VI-3

Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bangka VI-13

Tabel 6.3 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat..... VI-24

Tabel 6.4 Pengembangan Sektor perekonomian di Kecamatan Belinyu VI-25

Tabel 6.5 Pengembangan Sektor perekonomian di Kecamatan Mendo Barat VI-27

Tabel 6.6 Pengembangan Sektor perekonomian di Kecamatan Merawang VI-29

Tabel 6.7 Pengembangan Sektor perekonomian di Kecamatan Pemali VI-31

Tabel 6.8 Pengembangan Sektor perekonomian di Kecamatan Riau Silip VI-32

Tabel 6.9 Pengembangan Sektor perekonomian di Kecamatan Bakam VI-34

Tabel 6.10 Pengembangan Sektor perekonomian di Kecamatan Puding Besar VI-36

Tabel 7.1 Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Bangka VII-1

Tabel 7.2 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional VII-2

Tabel 7.3 Korelasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam Merespon Program MDGs VII-3

Tabel 7.4 Korelasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan SPM VII-6

Tabel 7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bangka VII-16 ..... VII-26

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka VIII-11

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018..... IX-2

Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten BangkaTahun 2014 - 2018..... IX-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD.....I-4

Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-14

Gambar 2.1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka II-14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2013 (Persen) II-22

Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009- 2013 (ribuan rupiah) III-5

Grafik 3.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target III-6

Grafik 3.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah)..... III-7

Grafik 3.4 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD dan Ppersentase Realisasi Anggaran Terhadap Target III-7

Grafik 3.5 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah)..... III-8

Grafik 3.6 Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang dipisahkan 2009-2013 (ribuan rupiah)..... III-9

Grafik 3.7 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap PAD dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target III-10

Grafik 3.8 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah)..... III-10

Grafik 3.9 Kontribusi Pendapatan Transfer Tahun 2009-2013..... III-11

Grafik 3.10 Proporsi Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 (ribuan rupiah)..... III-18

Grafik 3.11 Persentase Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013..... III-19

Grafik 3.12 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 (ribuan rupiah)..... III-31

Grafik 3.13 Proyeksi Persentase Kontribusi Pendapatan Tahun 2014-2018 ..... III-31

Grafik 3.14 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018 (ribuan rupiah)..... III-32

Grafik 3.15 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018 (ribuan rupiah)..... III-33

Grafik 3.16 Proyeksi Surplus/Defisit APBD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 (ribuan rupiah).....III-35

Grafik 3.17 Proporsi Pendanaan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018 .....III-36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pendelegasian kewenangan ini, disamping diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, juga untuk dapat meningkatkan daya saing daerah. Salah satu bentuk kewenangan yang diotonomikan adalah kewenangan penyusunan perencanaan daerah, meskipun dengan tetap harus memperhatikan keselarasan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah.

Salah satu bentuk perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam konteks Kabupaten Bangka, RPJMD 2014-2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu: (a). Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; (b). dilakukan Pemkab Bangka bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing; (c). Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan (d). Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan

potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari aspek lainnya, untuk sinkronisasi perencanaan dan pembangunan, baik nasional maupun provinsi, penyusunan RPJMD 2014-2018 juga mengacu pada rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten tetangga, seperti Kota Pangkal Pinang, Bangka Barat dan Bangka Tengah, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya mensinergikan dan menyelaraskan terhadap beberapa dokumen perencanaan dilakukan dengan cara:

1. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bangka 2013-2030 dilakukan dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, serta dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.
2. Memperhatikan RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
3. Memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Bangka dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lain tetangga dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Bangka dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya dalam hal ini Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang

Sinergi kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan tersebut diatas, merupakan jiwa perencanaan yang sesungguhnya. Karenanya, penyusunan RPJMD benar-benar telah dipersiapkan secara matang, melalui berbagai tahapan dan pendekatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan menggunakan seluruh pendekatan yang disarankan. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

1. *Pendekatan Politik*, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati-Wakili Bupati Bangka sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih. Dalam hal ini rencana pembangunan dalam RPJMD merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan saat kampanye.
2. *Pendekatan Teknokratik*, pendekatan ini menjadikan penyusunan RPJMD 2015 menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut, dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial.
3. *Pendekatan Partisipatif*, pendekatan ini menyebabkan penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan

(stakeholders) pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis, melalui forum konsultasi publik dan Musrebang RPJMD.

Secara lengkap, Proses Penyusunan RPJMD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018

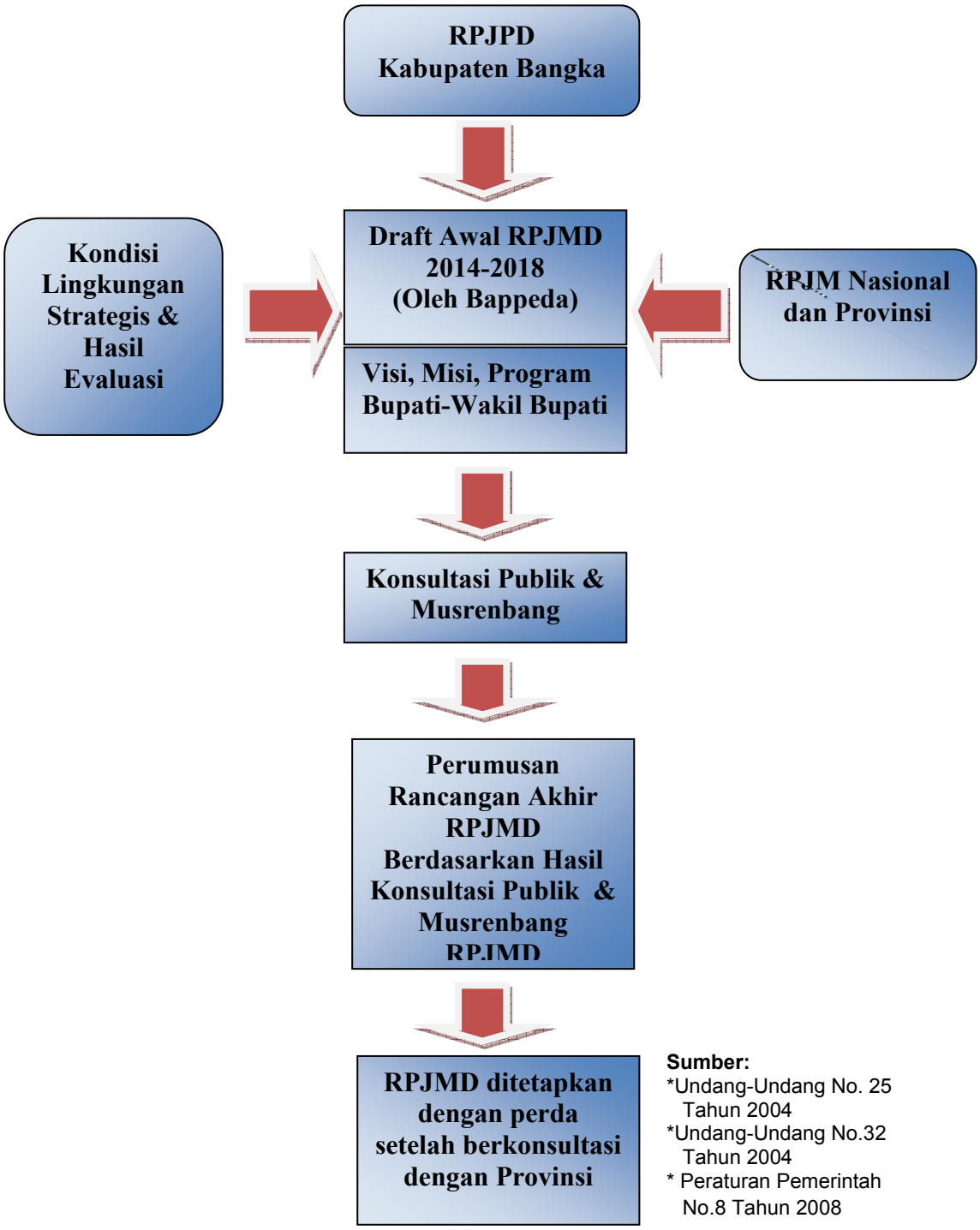

Sumber:
*Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
*Undang-Undang No.32 Tahun 2004
* Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
40. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034;
41. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
48. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;

1.3. Latar Belakang Perubahan

Latar belakang dilakukannya review RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sinergi tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 terhadap sasaran pokok pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
2. Melakukan kesesuaian strategi pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 dengan tema pengembangan wilayah nasional tahun 2015-2019;

3. Melakukan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 terhadap tujuan pengembangan wilayah nasional tahun 2015-2019;
4. Melakukan penyesuaian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah teutama menyangkut beberapa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan kepada pemerintahan provinsi termasuk juga beberapa urusan pemerintahan provinsi yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Menyesuaikan proyeksi keuangan daerah dengan menggunakan asumsi-asumsi keuangan terkini;
6. Menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini;
7. Mengintegrasikan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam indikator kinerja daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja berdasarkan hasil perkembangan pembangunan daerah.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut : Perencanaan Penganggaran Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek Berdasarkan skema ini dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP Daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah disusun berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.2
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

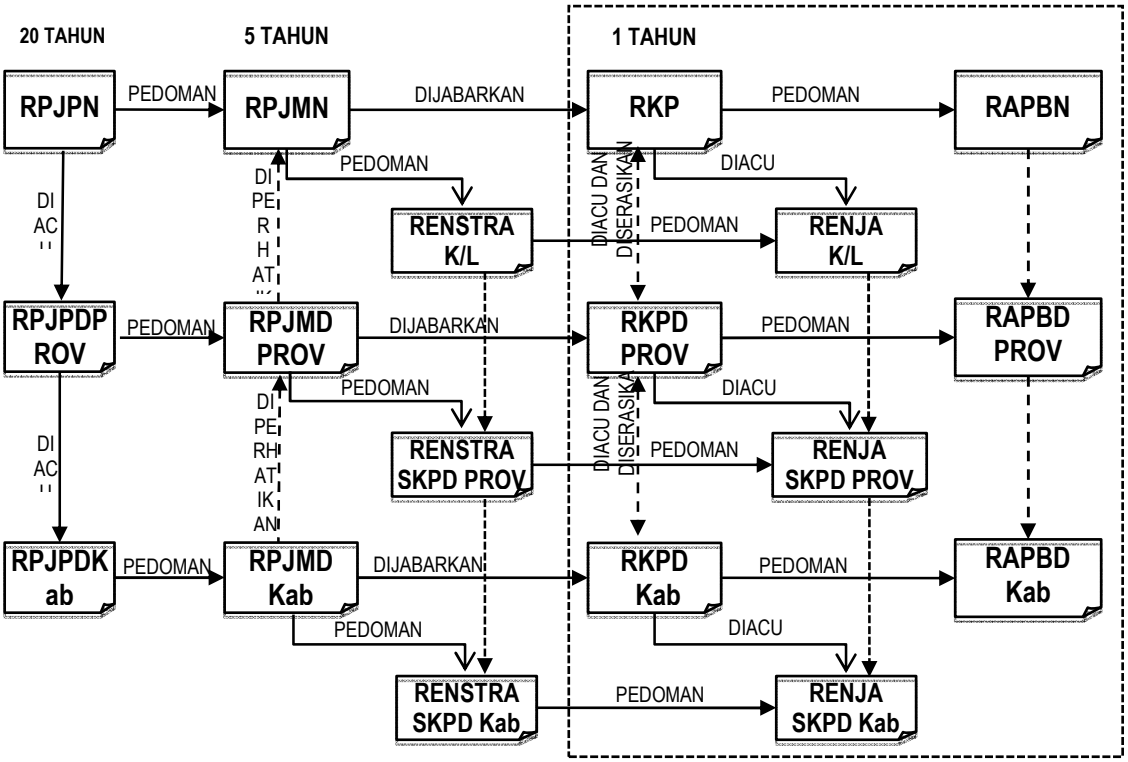

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan dalam Sistematika penulisan RPJMD ini meliputi 11 bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan dokumen RJPMD ini disusun.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka

Pendanaan

Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV Analisis Isu-isu Strategis

Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka.

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berisi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Bupati terpilih.

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Bangka yang disertai dengan pendanaannya.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.

Bab X Pedoman Masa Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Berisi prinsip-prinsip pedoman massa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

Bab XI Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bangka sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak; dan
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalaha dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 tahun kedepan;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan;
3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014–2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014–2018 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005–2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014–2018;
5. Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah periode 2014–2018.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Aspek Geografi dan Demografi

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi dan Luas Wilayah

Dengan luas wilayah 2.950,68 Km², Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2013 sebesar 304.185 jiwa dan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten serta dengan batas–batas wilayah sebagai berikut: (i) sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; (ii) sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna; (iii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan (iv) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

b. Kondisi Topografis

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut :

- 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.
- 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.
- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
- 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

c. Kondisi Geohedrologi

Pada umumnya kondisi geohidrologi di Kabupaten Bangka lebih di dominasi oleh air permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Jadi di Kabupaten Bangka kondisi hidrologinya terdiri dari kondisi sungai sebagai air pemukaan dan kondisi klimatologi.

- Sungai

  Secara detail, terdapat 38 (tiga puluh delapan) aliran sungai di Kabupaten Bangka, salah satunya Sungai Batu Rusa yang merupakan sungai terpanjang dengan panjang mencapai 31.250 m yang terletak di Kecamatan Merawang. Nama dan panjang sungai-sungai di Kab. Bangka dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Nama – Nama Sungai yang ada menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka

Kecamatan		Nama Sungai	Panjang (m)	Nama Sungai	Panjang (m)
1.	Belinyu	S. Panji	10.000	S. Belinyu	6.000
		S. Pasir	5.000	S. Berok	6.000
		S. Pejem	4.500	S. Romodong	3.000
		S. Tengkalak	2.000	S. Bubus	4.000
		S. Jeliti	3.000	S. Sembuang	5.000
		S. Bayat	9.000	S. Sekak	5.000
		S. Layang	12.000	S. Buntang	1.500
		S. Jelutung	12.000		
2.	Riau Silip	S. Tengkalak	5.000	S. Mapur	21.250
		S. Bedukang	900	S. Semubur	3.000
		S. Deniang Laut	1.300	S. Perimping	2.750
3.	Bakam	S. Telang	5.000	S. Layang	32.500
		S. Mabat	15.000		
4.	Merawang	S. Baturusa	31.250		
5.	Puding Besar	S. Perai	10.000	S. Kayubesi	500
		S. Kerang	8.000	S. Jeruk	15.000
		S. Kotawaringin	20.000	S. Lubang	6.000
		S. Air Pandan	20.000		
6.	Sungailiat	S. Jeliti	3.000		
7.	Mendo Barat	S. Menduk	28.500	S. Penagan	2.500
		S. Rukam	20.000	S. Penjirang	5.000
		S. Sembilang	2.000	S. Kelapabingil	3.000

Sumber : Bangka Dalam Angka 2013

- Klimatologi

  Iklim Kabupaten adalah beriklim tropis dengan variasi curah hujan antara 84,5 hingga 406,2 mm tiap bulan untuk tahun 2013, dengan curah hujan terendah pada bulan agustus. Suhu rata-rata daerah Sungailiat berdasar data dari Stasiun Meteorologi Pangkalpinang menunjukan variasi antara 26,2 hingga 27,8 derajat celcius sedangkan kelembaban udara antara 80 hingga 87 % pada tahun 2013.

Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Arah Angin dan Kecepatan Angin Rata-rata Menurut Bulan di Kabupaten Bangka Tahun 2013

Bulan		Curah Hujan (mm)	Rata-rata Kecepatan Angin (Knots)	Arah Angin Terbanyak
1.	Januari	202,6	3,1	BL
2.	Februari	304,5	2,4	BL
3.	Maret	261,0	2,7	U
4.	April	190,1	2,2	T
5.	Mei	258,0	2,1	U
6.	Juni	119,9	2,4	T
7.	Juli	244,0	3,3	S
8.	Agustus	84,5	9,4	TGR
9.	September	235,1	8,0	S
10.	Oktober	198,3	5,0	S
11.	November	335,1	4,0	BL
12.	Desember	406,2	4,3	B

Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang 2013

Tabel 2.3
Tekanan Udara. Suhu Udara. Kelembaban Udara dan Penyinaran Matahari Rata-rata Menurut Bulan di Kabupaten Bangka Tahun 2013

Bulan		Tekanan Udara Rata-rata (mb)	Suhu Udara (° C)			Kelem-baban Udara Rata-rata (%)	Penyinaran Matahari Rata-rata (%)
			Max	Min	Rata-rata		
1.	Januari	1010,3	30,3	24,0	26,6	85	32,0
2.	Februari	1008,9	30,4	24,1	26,5	86	43,7
3.	Maret	1010,7	31,3	24,4	27,0	85	55,4
4.	April	1008,8	31,3	24,4	27,1	85	45,1
5.	Mei	1008,9	31,3	24,5	27,2	85	45,1
6.	Juni	1007,8	32,0	24,7	27,8	81	65,3
7.	Juli	1009,1	3 0,3	23,8	26,7	83	50,8
8.	Agustus	1009,8	24,1	30,9	27,2	80	67,4
9.	September	1009,8	24,1	31,2	27,2	81	65,0

Bulan		Tekanan Udara Rata-rata (mb)	Suhu Udara (° C)			Kelem-baban Udara Rata-rata (%)	Penyinaran Matahari Rata-rata (%)
			Max	Min	Rata-rata		
10.	Oktober	1010,5	23,9	31,6	27,1	81	62,7
11.	November	1006,5	23,6	30,9	26,7	84	44,5
12.	Desember	1009,1	23,8	30,0	26,2	87	27,0

Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang Tahun 2013

d. Rencana Tata Ruang Wilayah

KAWASAN BUDIDAYA;

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam. manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian. kawasan permukiman. pertambangan dan industri. Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur. mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi. baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan. Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. Kawasan peruntukkan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari :
   - Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;
   - Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering
3. Kawasan peruntukkan perkebunan;
4. Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;
5. Kawasan peruntukkan peternakan;
6. Kawasan peruntukkan perikanan;
7. Kawasan peruntukkan pertambangan;
8. Kawasan peruntukkan industri;
9. Kawasan peruntukkan pariwisata;
10. Kawasan peruntukkan permukiman terdiri dari :
    - Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;
    - Kawasan peruntukkan permukiman perdesaan;
11. Kawasan peruntukkan hutan rakyat;

12. Kawasan peruntukkan lainnya terdiri dari kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dapat diusahakan dan lokasinya tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 70.105,04 ha. Kewenangan untuk pengembangan dan pemanfaatan hutan produksi berada sepenuhnya pada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bangka adalah HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP Sungailiat Air Panca; HP Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambunggiri; HP Sigambir Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit Rebo; HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan Nyato; HP Mengkinang; HP. Sungai Sembulan dan lainnya yang ditetapkan kemudian.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Berdasarkan hasil analisis peta satuan lahan. kawasan budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bangka tersusun atas satuan tanah alluvium. campuran estuarine dan. marin yang masih muda, sungai muda, gambut. Lokasi lahan yang cocok (sesuai) untuk perkembangan pertanian lahan basah terletak di Kecamatan Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, Mendo Barat, dengan luasan lebih kurang 10.346,93 ha. Kawasan kegiatan peruntukkan pertanian lahan basah dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan strategis Kabupaten Bangka.

Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan kering lokasinya terletak di Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang, Pemali, dan Kecamatan Belinyu seluas kurang lebih 4.873,94 ha. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Bangka didasarkan pada kehidupan sosial budaya masyarakat Bangka.

Kawasan Peruntukkan Perkebunan

Lahan yang potensial dikembangkan untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Bangka lokasinya tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan diperuntukkan bagi usaha perkebunan besar, sedang, kecil dan perkebunan rakyat. Luas peruntukan kawasan perkebunan lebih kurang 56.297,17 ha. Pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan dengan cara bermitra dengan masyarakat dengan pola Perkebunan Inti Rakyat, pola Kebun Kelapa Sawit Rakyat, dan pola lainnya dengan tujuan dan sasaran pemanfaatan sumber daya alam yang menyejahterakan rakyat secara merata. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan dan masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya.

Kawasan Peruntukkan Perkebunan Rakyat

Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat diletakkan dibelakang kawasan peruntukan permukiman yang lebar dan panjangnya bervariasi berdasarkan penggunaan dan kajian kebutuhan ruang. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi usaha perkebunan yang tidak membutuhkan perizinan dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain. Luas perkebunan rakyat yang dimaksud kurang lebih 42.364,96 ha. Komoditas yang dapat di usahakan dalam kawasan ini merupakan komoditas perkebunan baik komoditas pangan maupun non pangan. Kawasan perkebunan rakyat dan kawasan perkebunan dikembangkan untuk meningkatkan efek sebar di seluruh sektor perekonomian.

Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan lokasinya menyebar dihampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Dalam mekanismenya kawasan ini dapat terintegral dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan utamanya. Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya kawasan peternakan di tiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan menciptakan harmonisasi pemanfaatan ruang dengan luas peruntukan kawasan kurang lebih 700 ha.

Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan terbagi menjadi kawasan perikanan darat dan kawasan perikanan tangkap. Kawasan perikanan tangkap dan budidaya Kabupaten Bangka di pusatkan di Pelabuhan Belinyu, Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Sungailiat yang selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Sungailiat. Kawasan peruntukan perikanan seluas lebih kurang 615,89 ha yang difungsikan untuk kegiatan budidaya perikanan tambak air tawar, payau, dam air laut serta industri pengolahan hasil perikanan. Untuk daerah potensial budidaya perikanan tangkap berada pada wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Untuk kawasan perikanan darat (tambak) diprioritaskan pada kawasan yang memiliki potensi dan tersebar di beberapa kecamatan sesuai dengan potensinya.

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. kegiatan pertambangan dilaksanakan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP yaitu pemegang izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. WIUP di Kabupaten Bangka (di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, non logam, dan batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yaitu :

a. WIUP A seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat)
b. WIUP B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar).

Pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka menempatkan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bangka seluas lebih kurang 28.441,33 ha dan peruntukan pertambangan rakyat seluas lebih kurang 4.125 ha Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :

a. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah;
b. Penetapan aturan zonasi penambangan yang ramah lingkungan;
c. Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan;

d. Rehabilitasi lahan pasca tambang;
e. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kawasan Peruntukan Industri

Sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bangka yaitu menjadikannya sebagai daerah industri dan perdagangan maka sebagai perwujudan visi dan misi tersebut maka pemerintah daerah melalui Perda nomor 3 tahun 2005 menetapkan kawasan Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha dan rencana pengembangan wilayahnya sesuai kebutuhan. Rencana peruntukan Kawasan Industri di Kabupaten Bangka lebih kurang 983,13 ha yang akan dikembangkan di Kecamtaan Sungailiat, Belinyu dan Merawang.

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan seluruh kegiatan yang mendukungnya. Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 348,23 ha, yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat. Kegiatan pariwisata dilaksanakan di kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) terbagi ke dalam 4 kawasan. Pembagian kawasan ini berdasarkan kedekatan dan aksessibilitas antar objek wisatanya. KPP I mempunyai tema Ekowisata dan wisata rohani. KPP II mempunyai tema wisata alam, rekreatif dan wisata belanja. KPP III bertema sejarah, budaya, dan pendidikan. KPP IV bertema Agrowisata.

Kabupaten Bangka mengembangkan kawasan *ecopark* di Kecamatan Merawang seluas lebih kurang 1.000 ha. Kawasan ini merupakan kawasan terpadu sebagai kawasan tujuan wisata dan ilmu pengetahuan.

Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat dan Belinyu. Karena

pertimbangan ini termasuk juga kawasan permukiman semi-perkotaan. yang dalam jangka panjang diantisipasi akan semakin bergeser menjadi kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan ini relatif menonjol luasannya pada kecamatan-kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional / Jalan Propinsi. sehubungan dengan perkembangan kawasan perkotaan memang lebih pesat pada koridor sepanjang jalan tersebut daripada bagian wilayah lainnya. Permukiman perkotaan yang saat ini sudah terbentuk adalah Sungailiat dan Belinyu. untuk 20 tahun yang akan datang permukiman perkotaan yang diprediksikan akan berkembang di Kabupaten Bangka adalah Kawasan Kota Baru Air Anyir. Kawasan sekitar kampus UBB dan Kota Kecamatan Puding Besar. Luas Permukiman perkotaan di Kabupaten Bangka telah mengakomodir perkembangan wilayah. Kabupaten mengembangkan permukiman perkotaan di kawasan yang diperuntukkan bagi masyarakat kota. Luas lahan peruntukan permukiman perkotaan yaitu lebih kurang 9.680,43 Ha. Permukiman perkotaan di Kota Sungailiat meliputi hampir seluruh wilayah administrasi Kecamatan Sungailiat sedangkan permukiman perkotaan di Kecamatan Pemali meliputi wilayah Desa Air Ruay, dan Desa Karya Makmur. Untuk kota Belinyu kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi Kelurahan Kuto Panji. Kelurahan Air Jukung. Kelurahan Bukit Ketok, dan kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Mendo Barat meliputi Desa Kace dan Kace Timur dan di Kecamatan Merawang meliputi area sekitar Air Anyir dan Mudel (Kota Baru Air Anyir).

Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan yang ditetapkan di sini. adalah kawasan permukiman perdesaan yang relatif signifikan luasnya dan menunjukkan ciri-ciri intensitas yang memadai sebagai kawasan permukiman.

Arahan pemanfaatan potensi lahan untuk pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- Kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal;
- Memiliki kemampuan menyediakan tempat berusaha/bekerja;
- Memiliki ketersediaan prasarana dan sarana permukiman;
- Memiliki aksesibilitas;

- Memiliki jaminan kesehatan lingkungan;
- Memiliki keamanan fisik geografis/tidak rawan bencana;
- Memiliki kemampuan untuk berkembang dan menerima masukan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai pertimbangan diatas. maka luas lahan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten Bangka adalah meliputi seluruh wilayah perdesaan yaitu lebih kurang 18.364,93 ha.

Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat

Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat perdesaan, maka penataan ruang Kabupaten Bangka mengalokasikan peruntukan ruang hutan rakyat. Kawasan peruntukan hutan rakyat berada di belakang kawasan permukiman perdesaan dengan panjang dan lebar yang diharmonisasikan dengan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan rakyat Kabupaten Bangka penetapannya berada di kawasan diluar kawasan lindung dan sebagian kecil berada di dalam hutan produksi dengan istilah penamaan yang berbeda. Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar mengikuti ruas jalan dan permukiman. Luas areal kawasan peruntukan hutan rakyat lebih kurang 13.861,72 ha dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka difungsikan bagi kegiatan usaha tanaman kehutanan rakyat.

Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang belum memiliki kawasan peruntukkan. Luas kawasan peruntukan lainnya lebih kurang 693,24 ha meliputi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa bertujuan untuk membentuk pusat pertumbuhan masa depan. Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan disetiap kecamatan menurut skalanya; yaitu kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa kota Sungailiat. kawasan perdagangan Belinyu. kawasan perdagangan Pemali yang dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat dan Belinyu dikembangkan disepanjang jalan negara dalam kawasan perkotaan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dikembangkan untuk mendukung tumbuhya pusat-pusat pertumbuhan baru guna menghindari pemusatan aktiftas masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan terminal Sungailiat tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa gedung olah raga, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi tertentu seperti bahan bangunan. *showroom* mobil, motor, sparepart kendaraan. bengkel dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta fasilitas lainnya yang menunjang rencana pembangunan pusat pertumbuhan baru kota Sungailiat.

Kawasan peruntukan pemakaman dikembangkan di masing-masing wilayah berupa pemakaman desa, kecamatan dan kabupaten. Khusus kawasan peruntukan pemakaman kabupaten dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Merawang dan Pemali. Sementara kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu.

KAWASAN LINDUNG

Kehutanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang banyak terdapat di Kabupaten Bangka. Jumlah luas total hutan, baik itu hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi mencapai 35 % dari total luas Kabupaten Bangka. Luas hutan konservasi seluas ± 15.783,68 ha berlokasi di Gunung Maras. Luas hutan lindung sebanyak ± 15.799,95 ha dimana lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Luas hutan produksi adalah ± 66.355,48 ha dimana lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan perkembangan penduduk yang terdapat di beberapa lokasi yang berfungsi sebagai kawasan hutan baik itu hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi, maka Pemerintah Kabupaten Bangka sedang melakukan proses revisi perubahan status kawasan hutan di Kabupaten Bangka ke lembaga yang berwenang di Pusat menjadi kawasan budidaya.

Adapun total luas kawasan yang direvisi adalah seluas ±3.159 ha atau sekitar 1,88 % dari luas seluruh Kawasan Hutan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luas dan Nama Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya di Kabupaten Bangka Tahun 2014

No	Kawasan Hutan	Luas (±ha)	Persentase (%)
I	**Hutan Konservasi Gunung Maras**	**15.783,68**	**16,11**
II	**Hutan Lindung**	**15.799,95**	**16,16**
	a. HLP, Bubus I Belinyu	1.522,26	1,58
	b. HLP, Bubus II Belinyu	2.072,53	2,12
	c. HLP Sekah Tengkalat	4.374,98	4,47
	d. HLP, Sungailiat Mapur	1.656,93	1,69
	e. HLP, Bukit Rebo	1.299,00	1,33
	f. HLP Kota Waringin	2.738,15	2,79
	g. HLP Sembulan	1.033,33	1,05
	h. HLP Pejem	1.102,77	1,13
III	**Hutan Produksi**	**66.355,48**	**67,73**
	a. HP, Belinyu II Bubus	1.644,18	1,68
	b. HP, Sekah Tengkalat	13.557,50	13,84
	c. HP Sungailiat Mapur	9.696,40	9,90
	d. HP Sungailiat Air Panca	2.357,56	2,41
	e. HP Sungailiat Sigambir	1.318,76	1,35
	f. HP Bukit Betung Sambunggiri	2.011,08	2,05
	g. HP Sigambir Parit Lama	1.168,33	1,19
	h. HP Baturusa	836,94	0,85
	i. HP Mabat	1.902,27	1,94
	j. HP Air Limau	1.197,53	1,22
	k. HP Bukit Rebo	666,91	0,68
	l. HP Gunung Maras	6.168,66	6,30
	m. HP Kota Waringin	16.593,80	16,94
	n. HP Gunung Air Abik	239,94	0,24
	o. HP Merawang Lama	394,18	0,40
	p. HP Lelap Kayu Besi	388,23	0,40
	q. HP, Bukit Damar	206,98	0,21
	r. HP Hutan Nyato	353,74	0,36
	s. HP Mengkinang	5.619,89	5,74
	t. HP, Sungai Sembulan	32,60	0,03
Luas Total		**97.969,11**	**100,00**

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka, Tahun 2013

Tabel 2.5
Usulan Revisi Perubahan Status Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Tahun 2014

No	Kecamatan	Nama Lokasi	Kelompok Hutan	Luas Usulan (ha)	Persetujuan Menteri (ha)
1	Belinyu	Dsn. Pejem, Desa Gunung Pelawan	HL. Pejem	124,835	155,50
		Dsn. Lubuk Lesung, Desa Gunung Pelawan	HP. Sekah Tengkalat	55,096	43,66
		Dsn. Bintet, Desa Bintet	HP. Sekah Tengkalat	150,373	102,38
		Dsn. Parit 19, Dsn Parit 14, Desa Gunung Pelawan	HP. Sekah Tengkalat	178,552	134,99

No	Kecamatan	Nama Lokasi	Kelompok Hutan	Luas Usulan (ha)	Persetujuan Menteri (ha)
		Dsn. Statiun 6, Desa Gunung Pelawan	HP. Sekah Tengkalat	66,345	65,07
		Dsn. Penyusuk, Kelurahan Bukit Ketok	HL. Bubus II	30,000	34,42
		Dsn. Tirus, Desa Lumut	HP. Gunung Maras	45.007	10,36
		Dsn. Parit Lima, Kelurahan Bukit Ketok	HL. Bubus	42,865	42,84
2	Sungailiat	Dsn. Bedeng Ake, Hakok, Matras Kelurahan Sinar Baru	HP. Sungailiat Mapur	445,055	182,64
		Pantai Matras, Kelurahan Sinar Baru	HL. Sungailliat Mapur	115,210	32,60
		TPA, Kelurahan Kenanga	HP. Bukit Betung Sambung Giri	21.772	0,00
		Dsn. Tanjung Ratu, Desa Rebo	HP. Merawang Lama	95.370	95,31
3	Riau Silip	Dsn. Bernai, Desa Berbura	HK. Gunung Maras	23.891	0,00
		Dsn. Buhir, Desa Berbura	HK. Gunung Maras	44.741	18,30
		Dsn. Bernai, Desa Berbura	HP. Gunung Maras	61.619	28,25
		Dsn. Air Antu, Desa Deniang	HL. Sungailiat Mapur	49.881	24,34
		Dsn. Bedukang, Desa Deniang	HP. Sungailiat Mapur	50,032	50,03
4	Pemali	Dsn. Pemali, Desa Pemali	HP. Sigembir Parit Lama	95.629	95,55
		Dsn. Air Ruai, Desa Air Ruai	HP. Sigembir Parit Lama	84.244	84,16
5	Mendo Barat	Dsn. Labuh, Desa Labuh Air Pandan	HL. Kota Waringin	34.793	34,75
		Dsn. Balau, Desa Labuh Air Pandan	HP. Kota Waringin	30.119	30,11
		Dsn. Labuh, Desa Labuh Air Pandan	HP. Kota Waringin	167.655	167,59
		Dsn. Air Pandan, Desa Labuh Air Pandan	HP. Kota Waringin	94.687	94,69
6	Merawang	Dsn. Mudel, Dsn. Tamran, Desa Air Anyir	HP. Batu Rusa	205.264	207,57
7	Puding Besar	Dsn. Sungai Dua, Desa Kota Waringin	HL. Kota Waringin	24.462	0,00
		Dsn. Kota Waringin, Desa Kota Waringin	HP. Kota Waringin	177.708	0,00
		Dsn. Sungai Dua, Desa Kota Waringin	HP. Kota Waringin	404.630	105,14
Jumlah				**2.919.835**	**1.840,25**

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka, Tahun 2013

Gambaran pengembangan wilayah tergambar dalam rencana pola ruang sebagaimana terdapat dalam peta berikut :

Gambar 2.1
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka

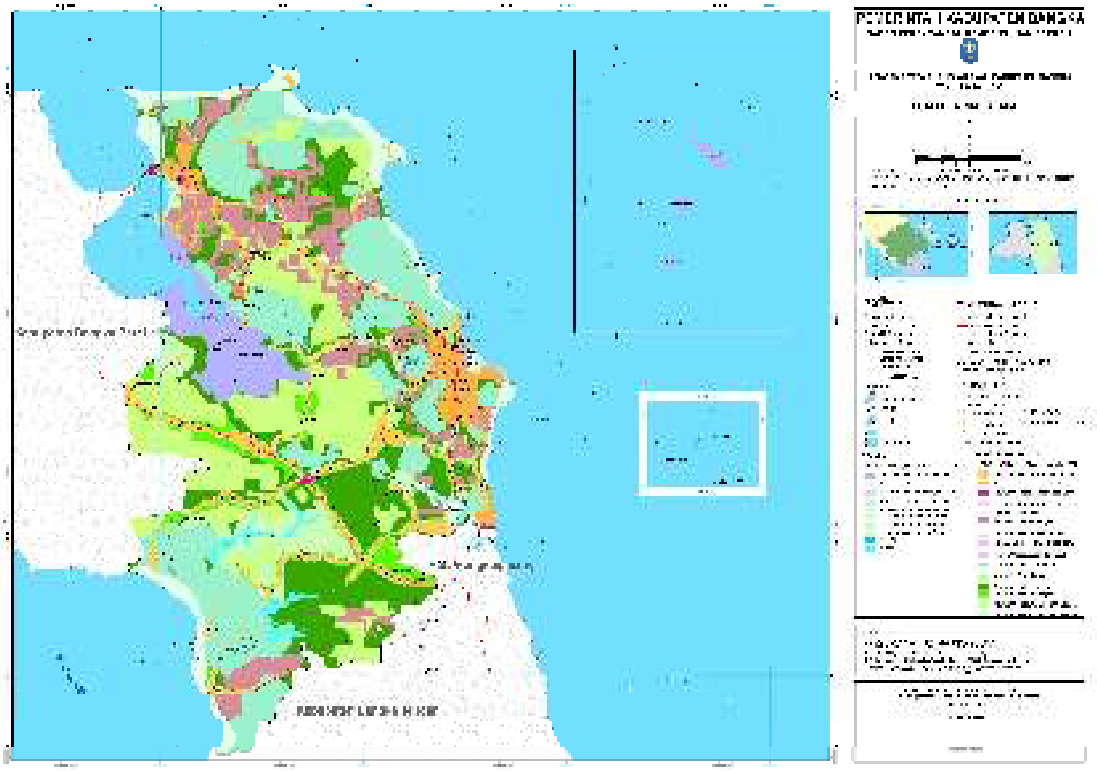

e. Potensi pengembangan wilayah

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih makro cakupannya, yaitu RTRWN, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Provinsi Bangka Belitung, telah ditetapkan arahan atau rencana Sistem Kota-Kota, yaitu dengan penetapan fungsi pusat pelayanan sampai tingkat PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Dalam Sistem Pusat Perkotaan atau Pusat Pelayanan secara nasional, telah ditetapkan adanya jenjang atau hirarki yang terdiri atas berturut-turut :

- PKN (Pusat Kegiatan Nasional), yang pelayanannya mencakup beberapa provinsi;
- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yang pelayanannya mencakup beberapa kabupaten;
- PKL (Pusat Kegiatan Lokal), yang pelayanannya mencakup beberapa kecamatan.
- PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)

Berdasarkan hierarki tersebut di atas maka rencana sistem kota-kota yang terdapat di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kota Sungailiat dan Kota Belinyu
2. Pusat Pelayanan Kegiatan promosi (PKLp) : Kecamatan Puding Besar
3. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) : Desa Petaling, Desa Riau, Desa Bakam, Desa Pemali dan Desa Batu Rusa.

WP I Sungailiat

Wilayah Pengembangan I dengan pusat Sungailiat, mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Sarana dan prasarana serta kegiatan yang menonjol di wilayah ini terutama yang berkaitan dengan fungsi Pangkal Pinang sebagai PKW adalah Pengembangan kawasan di sepanjang wilayah belakang Pangkal

Pinang yang meliputi Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendo Barat. Kawasan Kecamatan Merawang yang meliputi beberapa desa direncanakan untuk pengembangan kawasan industri di muara Sungai Batu Rusa, pengembangan wisata dan kota baru air anyir seluas lebih kurang 1.237 Ha, pengembangan kawasan kota baru beserta sarana dan prasarana pendukungnnya di Desa Air Anyir, kawasan pengembangan pendidikan tinggi, kawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Balun Ijuk dan Jada Bahrin, serta Kawasan Agropolitan di seluruh Kecamatan Mendo Barat beserta kawasan pendukungnya seperti kawasan Pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Petaling, Kemuja, dan kawasan Pendidikan di Petaling dan Paya Benua.

Kecamatan Sungailiat direncanakan sebagai kecamatan wisata pantai andalan Provinsi Bangka Belitung di sepanjang pesisir timur, kawasan perdagangan di pusat kota, dan pembentukan pusat pertumbuhan baru. Sebagai ibukota Kabupaten dikembangkan kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan sebagai satu wilayah ibukota. Kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang adalah berkembangnya industri polutif /perikanan tangkap di Kawasan Industri Jelitik dan kawasan peruntukan industri lainnya beserta kawasan pendukungnya, dan perikanan tambak di Kecamatan Merawang di sepanjang kawasan diluar sempadan Sungai Baturusa dan Sungai Selindung.

Wilayah Pengembangan I juga mengembangkan kawasan lindung setempat dengan lokasi dan luas sesuai kebutuhan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disepanjang sungai, danau atau kolong, mata air dll.

Wilayah Pengembangan I seperti transportasi darat dan laut, jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota.

WP II Belinyu

WP II dengan pusat di Belinyu, mempunyai wilayah cakupan Kecamatan Riau Silip, walaupun hanya mencakup 2 kecamatan, namun apabila dilihat dari luas wilayahnya, wilayah ini relative luas. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Sungailiat - Belinyu. Sebelah utara WP ini merupakan wilayah pesisir yang dimulai dari Tanjung Merak kemudian menyusur ke

arah utara menuju Tanjung Gudang Kemudian Tanjung Penyusuk kemudian menyusur ke arah barat menuju Tanjung Samak kemudian menurun ke bawah menuju Tanjung Tengkalat terus menurun menuju Tanjung Batu.

Ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah :

- Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat.
- Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan.
- Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota

WP III Puding Besar

WP III dengan pusat Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat. Di timur berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, di utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat, di barat berbatasan dengan Selat Bangka. Wilayah Pengembangan ini mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur-Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

- Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;
- Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.

f. Wilayah rawan bencana

Secara keseluruhan Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang rawan terkena bencana, seperti bencana banjir atau longsor. Hal ini dapat dijelaskan karena bentuk morfologi Kabupaten Bangka cenderung datar. Kondisi yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya genangan yang terjadi di beberapa kecamatan tersebar di Kabupaten Bangka akibat naiknya permukaan laut dan air pasang disamping itu juga penyebab lainnya karena adanya musim hujan tiba. Namun genangan yang terjadi tidak mengganggu perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka.

Kejadian bencana lainnya secara sporadis yang terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan beberapa rumah penduduk diwilayah yang dilalui angin tersebut.

2. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bangka mencapai 260.395 jiwa, maka jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 277.193 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 6,45 persen pada tahun 2010 dengan kepadatan sebesar 94 per km². Kemudian di tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 297.091 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 7,18 persen. Kemudian di tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 344.582 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 15,99 persen dengan kepadatan mencapai 117 per km². Namun, besaran penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2013 hanya sebesar 304.185 jiwa, atau mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru mencapai 344.582 jiwa, dengan laju pertumbuhan -11,72 persen dengan tingkat kepadatan yang hanya 103 km². Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Bangka kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 305.158 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,32 persen, namun dengan tingkat kepadatan yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 103 per km².

Jumlah dan kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Bangka tahun 2009 - 2014 sebagaimana tertera pada table 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Luas Daerah (km²) dan Kepadatan per km² di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014

No.	Tahun	Luas Daerah km²	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km² (jiwa)
1.	2009	2.950,68	260.395	88
2.	2010	2.950,68	277.193	94
3.	2011	2.950,68	297.091	101
4.	2012	2.950,68	344.582	117
5.	2013	2.950,68	304.185	103
6.	2014	2.950,68	305.158	103

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, 2014

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari data yang tersedia pada tahun 2009, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 134.303 jiwa atau sekitar 51,58 % dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 126.065 jiwa atau 48,42 % dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,16 %.

Pada tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka juga relatif sama banyaknya yakni penduduk laki-laki sebanyak 144.286 jiwa atau sekitar 52,05 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 132.907 jiwa atau 47,95 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 4,11 persen.

Pada tahun 2011, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 153.676 jiwa atau sekitar 51,73 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 143.415 jiwa atau 48,27 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,46 persen.

Pada tahun 2012, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 177.931 jiwa atau sekitar 51,64 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 166.651 jiwa atau 48,36 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,28 persen.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 157.850 jiwa atau sekitar 51,89 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 146.335 jiwa atau 48,11 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,78 persen.

Pada tahun 2014, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 157.634 jiwa atau sekitar 51,66 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 147.524 jiwa atau 48,34 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,32 persen.

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2014 :

Tabel 2.7
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014

NO.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1.	2009	134.303	126.065	260.368
2.	2010	144.286	132.907	277.193
3.	2011	153.676	143.415	297.091
4.	2012	177.931	166.651	344.582
5.	2013	157.850	146.335	304.185
6.	2014	157.634	147.524	305.158

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka,2014

c. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Bangka tahun 2009 cenderung didominasi kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun yakni sebanyak 27.231 jiwa atau 10,46 % dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 26.833 jiwa atau 10,31 % dari penduduk Bangka dan kelompok umur 0 – 4 tahun sebanyak 23.870 jiwa atau 9,17 % dari penduduk Bangka.

Pada tahun 2010 penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun yakni sebanyak 28.191

jiwa atau 10,17 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 27.802 jiwa atau 10,03 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 24.753 jiwa 8,93 persen penduduk Bangka.

Sementara pada tahun 2011 cenderung didominasi kelompok umur muda 25-29 tahun, secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 25 – 29 tahun yakni sebanyak 31.620 jiwa atau 10,64 % dari penduduk Bangka, kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 30.004 jiwa atau 10,10 % dari penduduk Bangka dan kelompok umur 5 – 9 tahun sebanyak 28.869 jiwa atau 9,72 % dari penduduk Bangka.

Pada tahun 2012 komposisi penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun yakni sebanyak 37.231 jiwa atau 10,80 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 36.258 jiwa atau 10,52 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 31.969 jiwa atau 9,19 persen penduduk Bangka.

Pada tahun 2013 komposisi penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun yakni sebanyak 33.463 jiwa atau 11,00 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 32.329 jiwa atau 10,63 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 28.566 jiwa atau 9,39 persen penduduk Bangka.

Sedangkan pada tahun 2014 komposisi penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun yakni sebanyak 31.003 jiwa atau 10,16 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 30.357 jiwa atau 9,95 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 27.546 jiwa atau 9,03 persen penduduk Bangka.

Selengkapnya struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun 2009-2014 tertera pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Struktur Penduduk Menurut Kelompok umur
di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2014 (jiwa)

No	Kelompok Umur (Tahun)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	0-4	23.870	24.753	21.068	17.165	15.627	19.731
2	5-9	22.271	23.090	28.869	31.658	24.272	27.356
3	10-14	22.469	23.312	26.971	31.969	24.116	27.546
4	15-19	23.401	24.282	24.794	28.043	25.226	25.411
5	20-24	27.231	28.191	30.004	31.276	28.566	25.733
6	25-29	26.833	27.802	31.620	36.258	32.329	30.357
7	30-34	22.008	22.841	28.782	37.231	33.463	31.003
8	35-39	17.468	18.128	22.748	28.141	25.925	25.660
9	40-44	16.063	16.659	18.698	23.295	21.713	21.109
10	45-49	16.633	17.241	16.011	18.952	17.731	17.581
11	50-54	8.509	15.994	14.727	17.038	15.928	15.281
12	55-59	11.308	11.725	12.015	15.059	13.981	13.477
13	60-64	7.102	7.373	7.917	11.068	10.110	10.295
14	65-69	4.964	5.156	4.493	5.974	5.445	5.836
15	70-74	5.011	5.211	8.374	4.683	4.153	3.620
16	75 +	5.227	5.433	-	6.772	5.600	5.162
Jumlah		**260.368**	**277.193**	**297.091**	**344.582**	**304.185**	**305.158**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014

Dalam bentuk grafik, piramida penduduk menurut kelompok umur di kabupaten Bangka tahun 2009-2014, tersaji pada grafik berikut.

Grafik 1.1
Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2014 (Persen)

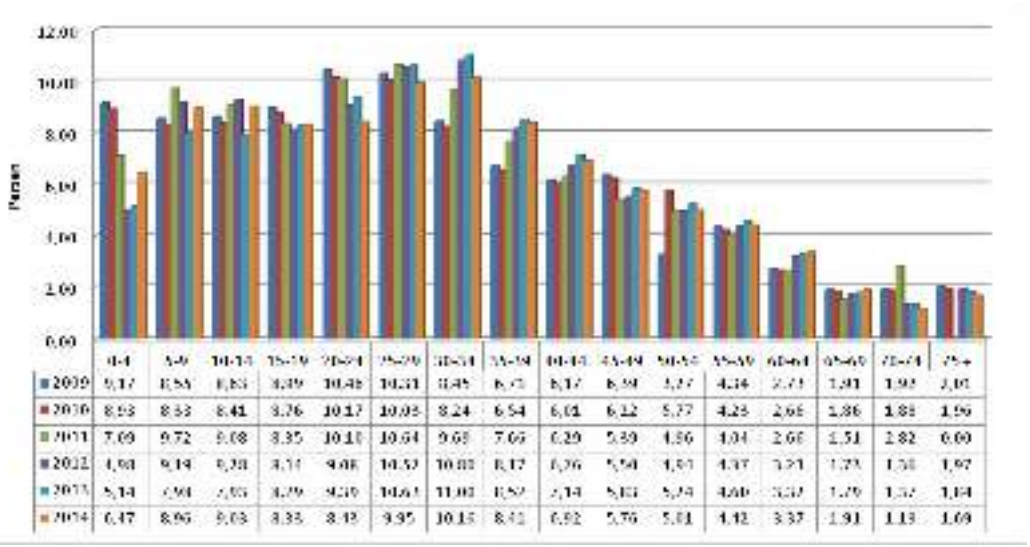

d. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

Penduduk dan tenaga kerja merupakan sumberdaya yang sangat berharga bagi suatu wilayah karena menjadi salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi suatu kecamatan. Dengan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang lebih besar, maka suatu wilayah memiliki pasar yang lebih besar pula, apalagi jika ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai. Dengan kemampuan dan sumberdaya penduduk dan tenaga kerja yang baik, maka kemungkinan suatu wilayah kecamatan berkembang akan lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang berpenduduk lebih kecil dan sumberdaya manusia yang lebih rendah. Dari aspek lain, makin besar jumlah penduduk dan tenaga kerja di suatu wilayah dapat dinyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki faktor penarik yang lebih besar.

Tenaga kerja merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun ditinjau dari sisi sosial. Sisi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebaliknya pula sektor-sektor usaha membutuhkan tenaga kerja (SDM) untuk menggerakkan roda perekonomian. Sedangkan sisi sosial dari tenaga kerja, berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan perekonomian.

Tabel 2.9
Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2014 (%)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rataan	Sektor
Pertanian	33,62	33,42	32,10	30,41	28,58	30,71	31,04	PRIMER
Pertambangan & penggalian	23,24	18,20	15,16	14,16	10,97	9,78	13,65	
Industri Pengolahan	2,29	3,23	3,12	2,46	2,03	1,96	2,56	SEKUNDER
Listrik, Gas & Air	0,46	0,59	0,70	0,72	0,84	0,91	0,75	
Bangunan	4,36	4,26	4,10	4,30	3,80	4,16	4,12	
Perd. Hotel & Restoran	15,53	16,24	17,24	17,93	19,37	19,84	18,12	TERSIER
Pengangkutan & Komunikasi	3,08	3,45	3,62	3,44	3,76	3,96	3,65	
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	1,53	1,58	1,89	2,29	2,73	2,82	2,26	
Jasa-jasa	15,90	19,03	22,07	24,30	27,92	25,86	23,84	
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

Sumber : PDRB Kabupaten Bangka (Data Diolah)

Tabel 2.9 menunjukkan perkembangan struktur tenaga kerja di Kabupaten Bangka tahun 2009 - 2014. Secara rataan, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor primer (40,05 persen) dimana usaha pertanian menyerap 30,71 persen dan usaha pertambangan dan penggalian menyerap tenaga kerja sebesar 9,34 persen dari total sektor ekonomi Kabupaten Bangka. Tenaga Kerja yang terserap di sektor sekunder adalah sebesar 7,03 persen, masih di bawah sektor tersier yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 52,48 persen. Usaha jasa mampu menyerap 25,86 persen tenaga kerja, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,84 persen, sedangkan usaha pengangkutan dan komunikasi serta usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing-masing hanya mampu menyerap 3,96 persen dan 2,82 persen.

Industri pengolahan hanya mampu menyerap 1,96 persen tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja yang lainnya tersebar ke usaha bangunan (4,16 persen) serta usaha listrik dan air bersih (0,91 persen).

3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari :

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB dan laju inflasi Kabupaten Bangka

Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bangka, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bangka cenderung terus membaik, hal ini diindikasikan oleh PDRB, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun konstan (ADHK) yang terus meningkat. Data lengkap perbaikan perekonomian dalam lima tahun terakhir tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka
dengan Timah Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)	PE (%)	PDRB Harga Konstan (juta Rp)	PE (%)
2010	6.551.040	0,00	6.551.040	0,00
2011	7.553.916	15,31	7.003.409	6,91
2012	8.321.697	10,16	7.378.161	5,35
2013	9.127.656	9,69	7.768.967	5,30
2014	10.119.431	10,87	8.140.523	4,78

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2014

Tabel diatas memperlihatkan bahwa PDRB ADHB meningkat dari Rp. 6.551.040 pada tahun 2010 menjadi Rp. 10.119.431 pada tahun 2014. Sedangkan ADHK, meningkat dari Rp. 6.551.040 pada tahun 2010 menjadi Rp. 8.140.523 pada tahun 2014. Meskipun terus membaik, namun perbaikan tersebut tidak linear dengan pertumbuhannnya. Pertumbuhan ekonomi terlihat terus menurun. Pada tahun 2011, PE 6,91%, menurun pada tahun 2012 menjadi 5,35% dan kembali menurun menjadi 5,30% pada tahun 2013, dan kembali menurun menjadi 4,78% pada tahun 2014. Secara umum, fluktuasi ini cenderung disebabkan oleh dua faktor utama. *Pertama*, karena terjadinya fluktuasi harga terhadap beberapa komoditas utama, seperti lada dan timah akibat lesunya perekonomian global. *Kedua,* karena kebijakan deregulasi perdagangan komoditi timah dan kebijakan pendirian smelter.

Seperti diketahui, perekonomian Kabupaten Bangka sangat tergantung kepada kedua komoditi tersebut. Perubahan kebijakan dan perubahan harga di pasar internasional yang berimbas ke harga di pasar domestik, secara langsung akan juga merubah PDRB-nya.

b. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka

Pada tahun 2014, struktur ekonomi Kabupaten Bangka berdasarkan harga berlaku dan harga konstanmenunjukkan pola yang sedikit berbeda

dengan tahun-tahun sebelumnya yakni dengan adanya perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini dilatarbelakangi pengaruh ekonomi global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDB dan memperkecil perbedaan antara PDB nasional dengan PDRB.

Berdasarkan metodelogi terbaru tersebut, Sektor primer masih menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian, yakni mencapai 35,08 persen, yang didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi hingga mencapai 20,95 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (34,76%) kontribusi sektor primer justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni hingga mencapai 0,32 point. Kenaikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut lebih dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian hingga mencapai -0,75 point pada tahun 2014. Kontributor terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka diwakili oleh sektor tersier dengan kontribusi mencapai 33,04 persen dengan sektor real estate sebagai akselelatornya dengan kontribusi hingga mencapai 4,79 persen. Seperti halnya dengan sektor primer, sektor tersier juga mengalami peningkatan kontribusi hingga mencapai 0,46 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (32,58%). Sedangkan sektor sekunder berada pada peringkat ketiga dalam perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 31,87 persen, yang didominasi oleh sektor industri pengolahan serta sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 23,21 persen dan 8,50 persen saja. Kontribusi sektor ini sedikit mengalami penurunan hingga mencapai -0,79 persen jika dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya (32,66%). Selengkapnya, nilai dan kotribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bangka lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014

No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013		2014	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.165.229	17,79	1.265.555	18,07	1.345.666	18,24	1.446.342	18,62	1.589.222	19,52
B	Pertambangan dan Penggalian	1.244.561	19,00	1.288.246	18,39	1.290.348	17,49	1.261.583	16,24	1.280.590	15,73
C	Industri Pengolahan	1.720.174	26,26	1.799.750	25,70	1.863.672	25,26	1.951.940	25,12	1.987.315	24,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.261	0,16	11.191	0,16	12.537	0,17	12.886	0,17	13.213	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	1.283	0,02	1.329	0,02	1.404	0,02	1.449	0,02	1.525	0,02
F	Kontruksi	473.084	7,22	511.167	7,30	574.994	7,79	620.616	7,99	646.899	7,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	732.299	11,18	800.226	11,43	861.343	11,67	926.555	11,93	969.984	11,92
H	Transportasi dan Pergudangan	121.926	1,86	131.560	1,88	140.721	1,91	151.478	1,95	163.240	2,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135.486	2,07	146.134	2,09	157.175	2,13	169.985	2,19	183.073	2,25
J	Informasi dan Komunikasi	122.433	1,87	132.851	1,90	144.251	1,96	156.739	2,02	166.216	2,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	151.526	2,31	176.600	2,52	184.139	2,50	215.734	2,78	219.659	2,70
L	Real Estet	200.517	3,06	222.338	3,17	244.487	3,31	260.005	3,35	281.126	3,45
M	Jasa Perusahaan	13.256	0,20	14.539	0,21	15.736	0,21	16.716	0,22	17.949	0,22
N	Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	264.019	4,03	294.013	4,20	317.293	4,30	336.257	4,33	362.194	4,45
O	Jasa Pendidikan	105.412	1,61	110.076	1,57	118.053	1,60	127.542	1,64	137.178	1,69
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.972	0,84	60.776	0,87	66.386	0,90	70.494	0,91	74.930	0,92
Q	Jasa Lainnya	34.602	0,53	37.058	0,53	39.956	**0,54**	42.646	0,55	46.210	0,57
	JUMLAH	**6.551.040**	**100,00**	**7.003.409**	**100,00**	**7.378.161**	**100,00**	**7.768.967**	**100,00**	**8.140.523**	**100,00**

Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014

No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013		2014	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.165.229	17,79	1.356.124	17,95	1.558.838	18,73	1.814.052	19,87	2.120.297	20,95
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.244.561	19,00	1.398.260	18,51	1.386.576	16,66	1.358.769	14,89	1.430.048	14,13
C.	Industri Pengolahan	1.720.174	26,26	1.954.103	25,87	2.068.761	24,86	2.203.083	24,14	2.348.839	23,21
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.261	0,16	10.527	0,14	10.875	0,13	10.540	0,12	14.901	0,15
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	1.283	0,02	1.461	0,02	1.637	0,02	1.795	0,02	2.007	0,02
F.	Kontruksi	473.084	7,22	549.375	7,27	662.231	7,96	765.579	8,39	859.679	8,50
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	732.299	11,18	859.678	11,38	991.519	11,91	1.101.357	12,07	1.232.270	12,18
H.	Transportasi dan Pergudangan	121.926	1,86	139.978	1,85	158.273	1,90	183.569	2,01	210.116	2,08
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135.486	2,07	156.781	2,08	185.198	2,23	214.018	2,34	242.258	2,39
J.	Informasi dan Komunikasi	122.433	1,87	136.906	1,81	152.358	1,83	162.002	1,77	175.695	1,74
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	151.526	2,31	186.923	2,47	212.835	2,56	260.232	2,85	279.534	2,76
L.	Real Estet	200.517	3,06	239.065	3,16	277.544	3,34	309.279	3,39	349.777	3,46
M.	Jasa Perusahaan	13.256	0,20	15.437	0,20	18.024	0,22	20.762	0,23	23.725	0,23
N.	Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	264.019	4,03	327.867	4,34	375.814	4,52	421.999	4,62	484.610	4,79
O.	Jasa Pendidikan	105.412	1,61	118.307	1,57	141.905	1,71	164.788	1,81	190.099	1,88
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.972	0,84	63.577	0,84	73.971	0,89	84.021	0,92	94.465	0,93
Q.	Jasa Lainnya	34.602	0,53	39.547	0,52	45.338	0,54	51.811	0,57	61.111	0,60
	JUMLAH	**6.551.040**	**100**	**7.553.916**	**100**	**8.321.697**	**100**	**9.127.656**	**100**	**10.119.431**	**100**

Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014 (Data Diolah)

c. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. PDRB perkapita diperoleh dari nilai pembagian PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti kata semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut.

Tabel 2.13
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Bangka Tahun 2011-2014

Tahun	Harga Berlaku (Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	26.486	-
2012	28.540	7,76
2013	30.628	7,32
2014	33.235	8,51
Rerata Pertumbuhan		**7,86**

Sumber ; BPS Kab. Bangka, 2014

Pertumbuhan positip dari pendapatan perkapita mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka semakin baik. Berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 19.188.783 atau naik sebesar 10,31 persen dari Rp. 17.395.614 pada tahun 2012. Dan selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2009 Pendapatan perkapita Kabupaten Bangka atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan rata-rata 12,49 persen.

d. Indek Disparitas Wilayah

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan disparitas pendapatan antar kecamatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, digunakan teknik analisis Indeks Williamson. Secara detail Indeks Williamson tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Koefisien Disparitas Pendapatan
Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2014

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2009	0,26	Relatif Rendah
2010	0,25	Relatif Rendah
2011	0,25	Relatif Rendah
2012	0,22	Relatif Rendah
2013	0,21	Relatif Rendah
2014	0,20	Relatif Rendah
Rataan	**0,23**	**Relatif Rendah**

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2014

Tabel diatas menunjukkan kepada kita, bahwa pemerataan pendapatan kabupaten selama kurun waktu 2009 – 2014 menunjukkan trend yang terus menurun berada dalam kisaran antara 0,20 hingga 0,26, yang secara umum dapat diklasifikasikan mempunyai ketimpangan yang relatif rendah. Disamping itu, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara struktural perekonomian daerah cukup mampu berkembang pada saat sektor pertambangan dan penggalian tidak lagi menjadi salah satu *core sector* perekonomian daerah, karena beberapa *core sector* seperti pertanian dan perkebunan (*leading sector*) dan perdagangan, hotel dan restoran diproyeksikan mampu menggantikan peran sektor pertambangan dan penggalian sebagai *prime mover*, disamping itu, munculnya *the next core sector* seperti sektor jasa yang dalam kurun waktu terakhir mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan kisaran indeks yang kurang dari 0,30, maka ketimpangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Bangka masih tergolong rendah. Namun, fenomena ini sekaligus menerangkan bahwa pada beberapa kecamatan, perekonomiannya masih sangat di dominir oleh komoditi timah, baik pertambangan timah maupun industri logam timah sehingga secara langsung masih berdampak terhadap disparitas perekonomian maupun pendapatan.

e. Koefisien Gini

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva

pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjanga Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0.4 □GR □ 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa secara umum pada periode enam tahun terakhir, Gini Ratio berkisar pada angka 0,28 hingga 0,30, ini berarti bahwa Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Jika dirunut secara detail, bahkan kertimpangan pendapatan ini cenderung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, Gini Ratio berada pada angka 0,294, angka ini semakin menurun hingga menjadi 0,286 di tahun 2011 dan bahkan meningkat menjadi 0,303 pada tahun 2013, namun terkoreksi menjadi 0,300 pada tahun 2014.

Ketimpangan yang relatif rendah ini umum disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka, diseluruh kecamatan bekerja di sektor pertambangan dan pertanian. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendapatan dari kedua sektor ini relatif sama sehingga distribusi pendapatan juga relatif tersebar merata. Selengkapnya perkembangan Gini Ratio tersebut, tersaji pada tabel berikut.

Table 2.15
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Bangka pada Periode Tahun 2009 hingga 2014

No	Tahun	Gini Ratio
1	2009	0,294
2	2010	0,291
3	2011	0,286
4	2012	0,298
5	2013	0,303
6	2014	0,300

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2014

f. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya trend perkembangan IPM dalam tiga tahun terakhir, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka
Tahun 2012 – 2014

No	Indikator	2012	2013	2014
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,99	69,34	69,79
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,21	12,01	12,33
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,76	7,88	7,92
4	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,40	70,45	70,47
5	Pengeluaran per Kapita (000 Rp)	10.320	10.647	10.679

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2012 -2014, IPM terus mengalami peningkatan dari 67,99 di tahun 2012 hingga 69,34 di tahun 2013. Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit ketiga variabel pembentuk-nya. Dari sisi pendidikan, angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 11,21 menjadi 12,01 di tahun 2013. Rata-Rata Lama Sekolah meningkat dari 7,76 menjadi 7,88 di tahun 2013. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 70,40 menjadi 70,47 di tahun 2013. Dari

sisi ekonomi, Pengeluaran per Kapita masyarakat juga megalami peningkatan yang luar biasa, dari Rp. 10.320.000,- menjadi Rp. 10.647.000 di tahun 2013. Pada tahun 2014, sebagai dampak pelaksanaan pembangunan, IPM dan berbagai variabel komposit-nya juga ternyata terus mengalami perbaikan. IPM 2014 mencapai 69,79, dengan capaian variabel Pengeluaran per Kapita mencapai Rp. 10.679.000,-, angka Harapan Lama Sekolah 12,33 tahun, rataan lama sekolah 7,92 dan angka harapan hidup 70,47. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

g. Laju Inflasi

Tabel 2.17 menunjukkan laju inflasi sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2014. Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah sepuluh persen. Jika pada tahun 2011 inflasi menyentuh level 7,86 persen, maka pada tahun berikutnya justru mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni berada pada level 4,57 persen, dan kembali mengalami penurunan hingga mencapai level 4,17 persen pada tahun 2013, namun justru kemudian meningkat menjadi level 5,81 persen pada tahun 2014 saja, sehingga secara rataan, inflasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir mencapai level 5,60 persen.

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam Tabel 2.17, sebagai berikut :

Tabel 2.17
Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Bangka
Tahun 2011 s.d 2014 (Persen)

Uraian	2011	2012	2013	2014	Rata-rata pertumbuhan
Nilai Inflasi	7,86	4,57	4,17	5,81	5,60

Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Bangka dilakukan terhadap indikator-indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

a. Angka Melek Huruf

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka tercatat di Kabupaten Bangka pada tahun 2013 terdapat 96,80 persen persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca, namun persentase tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 yakni sebesar 96,99 persen. Sementara itu, angka melek huruf selama periode 2010 – 2013 cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 angka melek huruf mencapai 3,69 persen, kemudian menurun menjadi 3,35 persen, kembali menurun hingga mencapai 3,29 persen pada tahun 2012, dan angka melek huruf kembali mengalami penurunan hingga mencapai 3,20 persen pada tahun 2013.

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan dalam tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka
Tahun 2009 s.d 2014

NO	Uraian	Capaian (%)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Persentase Penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca	96,15	96,31	96,65	96,71	96,80	96,99
2	Angka melek huruf	3,85	3,69	3,35	3,29	3,20	3,01

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca pada tahun 2014 mencapai 96,99 persen dan ditargetkan menjadi 97,15 persen pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 0,16 persen. Sedangkan Angka Melek Huruf pada tahun 2014 mencapai 3,01 persen dan ditargetkan menjadi 2,86 persen pada tahun

2016 atau berkurang sebesar -0,15 persen.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Sebagai pendukung sarana dan prasarana yang telah dibangun cenderung diimbangi dengan keberadaan murid yang jumlahnya relatif besar dan juga sangat dibutuhkan. Di Kabupaten Bangka, hingga tahun 2014 jumlah murid untuk usia 7-12 tahun sebesar 31.099 orang, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mencapai 34.541 orang. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SD/MI sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami fluktuasi, jika pada tahun 2010 persentase APS SD/MI sebesar 93,35 persen, maka pada tahun 2014 justru mengalami penurunan hingga menjadi 93,10 persen.

Untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs persentase Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2009 sebesar 72,77persen dan pada tahun 2010 sebesar 68,88 persen serta tahun 2011 meningkat menjadi 71,37 persen, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 91,11 persen di tahun 2013, namun ternyata mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 72,60 persen pada tahun 2014.

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup Kabupaten Bangka, dapat disajikan dalam tabel 2.19, sebagai berikut:

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

NO	Jenjang Pendidikan	Capaian					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	**SD/MI**						
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	34.222	35.026	38.463	36.436	34.541	31.099
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	22.963	27.678	28.869	31.658	33.722	33.413
1.3.	APS SD/MI (persen)	92,34	93,35	94,35	94,95	102,43	93,10
2	**SMP/MTs**						
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	10.320	11.944	12.605	13.097	14.681	10.633
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.167	24.952	26.971	31.969	14.810	14.640
2.3.	APS SMP/MTs (persen)	72,77	68,88	71,37	72,05	91,11	72,60

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada tahun 2014 mencapai 93,10 persen dan ditargetkan menjadi 96,24 persen pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 3,14 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 72,60 persen.

b. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah menunjukkan trend yang cenderung terus menurun. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pada tahun 2009 untuk jenjang sekolah dasar mencapai 0,85 persen, sedangkan pada tahun 2010 untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI sebesar 0,66 persen, dimana jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 27.678 jiwa sedangkan jumlah gedung sekolah SD/MI hanya sebanyak 183 unit, Rasio tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,51 persen saja pada tahun 2014, dimana jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 35.966 jiwa sedangkan jumlah sekolah SD/MI berjumlah 184 unit saja. ini membuktikan bahwa jumlah gedung sekolah SD/MI yang ada di Kabupaten Bangka belum cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang terus mengalami peningkatan.

Untuk rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pada tahun 2009 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 0,21 persen, sedangkan pada tahun 2010 untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs juga memiliki rasio sebesar 0,21 persen dimana jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 24.282 jiwa sedangkan jumlah gedung sekolah SMP/MTs berjumlah 50 unit. Selama periode 2011-2014 rasio yang paling kecil berada pada tahun 2012 yakni hanya sebesar 0,18 persen, dimana jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 28.043 jiwa sedangkan jumlah gedung sekolah SMP/MTs sebanyak 51 sekolah. Pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,36 persen, yang menandakan bahwa jumlah sekolah SMP/MTs di Kabupaten Bangka cukup memadai dalam menampung jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Kabupaten Bangka, dapat disajikan tabel 2.20, sebagai berikut :

Tabel 2.20
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

NO	Jenjang Pendidikan	Capaian					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	**SD/MI**						
1.1.	Jumlah gedung sekolah	195	183	183	175	184	184
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	22.963	27.678	28.869	31.658	33.722	35.966
1.3.	Rasio	0,85	0,66	0,63	0,55	0,55	0,51
2	**SMP/MTs**						
2.1.	Jumlah gedung sekolah	48	50	50	51	51	57
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.401	24.282	24.794	28.043	14.810	15.922
2.3.	Rasio	0,21	0,21	0,20	0,18	0,34	0,36

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI pada tahun 2014 mencapai 0,51. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 0,36.

c. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Dari rasio antara murid dan guru terlihat rasionya tidak selalu meningkat secara signifikan, bahkan menurun. Kemungkinan berkurangnya guru adalah karena penempatannya sudah selesai dan belum ada guru pengganti atau sekolah tersebut tutup. Memang dalam suatu perencanaan sekolah harus memperhatikan jumlah murid dan ketersediaan kelas di setiap kecamatan. Tidak setiap kecamatan harus tersedia sekolah, karena itu sistem rayon tetap menjadi acuan ke depan. Bila dilihat dari tabel 2.21 pada tahun 2010 rasio jenjang pendidikan untuk tingkat SD/MI antara jumlah guru dan jumlah murid sebesar 0,06 persen. Namun selama periode 2011 - 2012 rasio antara jumlah murid dan jumlah guru menurun menjadi sebesar 0,05 persen. Kemudian pada tahun 2013 rasio jumlah guru dan murid meningkat menjadi 0,06 persen, dan kembali turun menjadi 0,05 persen pada tahun 2014. Sedangkan rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan untuk tingkat SMP/MTs dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung berfluktuatif dengan kisaran 0,07 – 0,08 persen. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yakni menyentuh level

0,08 persen, kemudian mengalami penurunan hingga 0,07 persen saja. Rasio tersebut kembali stagnan atau tetap berada pada level 0,08 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid Kabupaten Bangka dapat disajikan dalam tabel 2.21, sebagai berikut:

Tabel 2.21
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	**SD/MI**						
1.1.	Jumlah Guru	2.157	2.181	2.265	2.122	2.114	2.110
1.2.	Jumlah Murid	34.222	35.026	38.463	36.436	36.424	37.444
1.3.	Rasio (persen)	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05
2	**SMP/MTs**						
2.1.	Jumlah Guru	1.967	929	953	943	952	987
2.2.	Jumlah Murid	10.320	11.944	12.605	13.097	12.957	14.315
2.3.	Rasio (persen)	0,19	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014

2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator seperti : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Penyusunan tabel hasil analisis capaian indikator seni budaya dan olahraga dengan merujuk tata cara pengolahan sumber data dan informasi kondisi umum daerah Kabupaten Bangka, kemudian dibuatkan tabel 2.22 antara lain sebagaimana berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

NO	Capaian Pembangunan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	9	10	18	18	10
2	Sarana penyeleng-garaan seni dan budaya (unit)	8	8	8	8	8	11
3	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	360	360	361	361	366	367
4	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	1	1	1	10	10	10

NO	Capaian Pembangunan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	di Kabupaten						
5	Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 pddk	0,0038	0,0036	0,0034	0,03	0,03	0,03
6	Rasio Lapangan olahraga per 1000 pddk	1,38	1,30	1,22	1,20	1,20	1,20

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2014,
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2014

4.2. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya justru mengalami peningkatan. Indikasinya secara signifikan terlihat dari meningkatnya rasio kepemilikan KTP. Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Bangka jumlah penduduk di Kabupaten Bangka pada tahun 2014 sebanyak 305.158 jiwa dengan jumlah penduduk usia 17 keatas sebanyak 220.403 jiwa. Sementara itu jika dilihat pada tabel 2.23 diketahui jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 179.532 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia 17 tahun keatas (wajib KTP) sebanyak 220.403 jiwa dengan tingkat rasio kepemilikan KTP sebesar 81,45 persen.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Kabupaten Bangka
Tahun 2009 s.d 2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk Usia 17 +	202.462	211.304	238.615	241.080	230.889	220.403
2	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	194.045	206.801	238.462	246.619	163.520	179.532
3.	Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 + dan Kepemilikan KTP	96 %	98 %	100 %	102 %	70,82 %	81,45%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014

Dari berbagai akte yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tahun 2014 menunjukkan bahwa akte kelahiran merupakan akte yang paling sering diterbitkan dengan jumlah keseluruhan mencapai 240.787 lembar. Jumlah akte tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.847 lembar. Kemudian diikuti oleh akte perkawinan yang pada tahun 2014 mencapai 2.579 lembar. Kebalikannya, pengesahan anak merupakan akta yang paling sedikit diterbitkan yakni hanya 6 lembar saja. Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2014 mencapai 789,06 akta/1.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 743,10. Secara detail, jenis akta-akta yang diterbitkan Kabupaten Bangka tahun 2010-2014 tersaji pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Jenis Akta-Akta Yang Diterbitkan
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d.2014

NO	Jenis Akta-Akta	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Akta Kelahiran	8.911	17.382	12.635	5.658	2.847	240.787
2	Akta Perkawinan	326	265	344	288	284	2.579
3	Akta Perceraian	11	15	22	24	25	126
4	Akta Kematian	67	48	58	65	75	1.840
5	Pengesahan Anak	8	9	60	72	82	6
6	Ganti Nama	44	56	41	58	60	-
7	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	34	60	442	18	743,1	789,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014

b. Ketenagakerjaan

Dari jumlah pencari kerja seperti yang dijelaskan pada tabel 2.25 dibawah ini. Jumlah penduduk angkatan kerja mengalami peningkatan dari 220.243 orang di tahun 2013 menjadi 38.956 orang di tahun 2014. Jumlah penduduk usia 15 – 64 mengalami peningkatan dari 278.500 orang di tahun 2013 menjadi 290.142 orang di tahun 2014. Jumlah pekerja yang ditempatkan dan jumlah pekerja yang mendaftar ternyata mengalami penurunan pada tahun 2014 yakni masing-masing berjumlah1.001 dan 1.125 orang saja.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka
Tahun 2009 s.d 2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk angkatan Kerja	116.985	154.256	133.691	116.985	220.243	38.956
2	Jumlah Penduduk usia 15 – 64	194.653	210.167	220.094	338.836	278.500	290.142
3.	Jumlah Pekerja yang ditempatkan	375	371	408	1.750	1.750	1.001
4.	Jumlah Pekerja yang mendaftar	6.118	5.122	649	1.977	1.977	1.125

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 2014

c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Di Kabupaten Bangka secara kuantitatif perkembangan koperasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2010 jumlah koperasi aktif sebanyak 150 unit dan terus meningkat hingga mencapai 169 unit pada tahun 2014. Sedangkan jumlah UKM yang ada di Kabupaten Bangka berjumlah 47.382 unit pada tahun 2010, menurun menjadi 46.134 pada tahun 2011, namum ternyata mengalami peningkatan hingga mencapai 51.340 unit pada tahun 2012, pada tahun 2013 jumlah UKM kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 51.468 unit dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 53.163 unit. Secara detail perkembangan koperasi usaha kecil dan menengah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.26
Jenis dan Jumlah Koperasi Kabupaten Bangka
Tahun 2009 s.d 2014

NO.	INDIKATOR	TAHUN					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Koperasi Aktif	148	150	154	157	161	169
2	Koperasi Tidak Aktif	37	39	39	38	38	38
3	Jumlah Induk Koperasi	185	189	193	195	199	207
4	Jumlah Koperasi Primer	185	189	193	195	195	206
5	Jumlah KUD	9	9	9	9	9	9
6	Jumlah Non KUD	176	180	184	186	186	198
7	Usaha Mikro dan Kecil	44.938	47.183	45.930	51.083	51.213	53.163
8	Jumlah UKM	45.133	47.382	46.134	51.340	51.468	53.447

Sumber : Disperindagkop Kab. Bangka, 2014

d. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Bangka yang bertujuan meningkatkan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan di bidang kesehatan sangat diperlukan dalam rangka memasuki era globalisasi, di mana perkembangan teknologi, transportasi dan telekomunikasi informasi mengharuskan setiap komponen sumber daya untuk meningkatkan daya saingnya. Bidang kesehatan dan pendidikan merupakan unsur utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari kebijakan nasional dan internasional. Menuju hidup sehat dan berkualitas dan program MDG's harus terkait dengan program kesehatan.

Di Kabupaten Bangka, jumlah rumah sakit serta balai pengobatan terlihat masih sangat sedikit serta tidak merata. Di mana sampai dengan tahun 2014 tercatat untuk rumah sakit, terdapat 5 unit rumah sakit umum yang terletak di Kabupaten Bangka, meningkat dibandingkan jumlah rumah sakit tahun 2012 yang hanya berjumlah 3 unit saja. Sementara untuk tenaga medis terjadi peningkatan jumlah tenaga medis sampai dengan tahun 2014 dengan rincian dokter umum sebanyak 131 orang, dokter spesialis sebanyak 23 orang dan dokter gigi sebanyak 8 orang, tenaga paramedis keperawatan berjumlah 98 orang dan apoteker berjumlah 43 orang serta tenaga paramedis non

keperawatan berjumlah 48 orang. Secara detail jumlah tenaga medis dan keperawatan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Jenis Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bangka
Tahun 2009 s.d 2014

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah Sakit	2	3	3	3	5	5
2.	Tempat tidur	-	-	-	-	490	442
3.	Puskesmas	11	12	12	12	12	12
4.	Puskesmas Pembantu	36	36	36	36	36	34
5.	Praktek Dokter	46	46	70	74	94	153
6.	Bidan Praktek Swasta	-	-	-	25	43	46
7.	Klinik	-	-	-	2	2	8
8.	Apotik	19	21	20	23	22	33

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit pada tahun 2014 mencapai 5 unit, sedangkan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2014 mencapai 12 dan 34 unit.

Tabel 2.28
Jenis Tenaga Medis dan Keperawatan
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

Uraian	**Jumlah**					
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Tenaga Medis :						
Dokter Umum	52	71	46	28	88	131
Dokter Spesialis	18	18	9	10	32	23
Dokter Gigi	14	11	13	4	15	8
Tenaga paramedis Keperawatan	307	401	95	96	728	98
Apoteker	6	7	8	8	20	43
Paramedis Non Keperawatan	9	9	9	9	23	48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi pada tahun 2014 masing-masing mencapai 131, 23 dan 8 orang, sedangkan jumlah tenaga paramedis keperawatan pada tahun 2014 mencapai 98 orang.

d. Pekerjaan Umum

Transportasi memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak lebih lanjut terhadap ketersediaan sumber daya. Transportasi juga berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu bangsa. Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bangka mencakup transportasi darat, transportasi laut serta transportasi udara. Transportasi, selain mengemban fungsi pelayanan publik juga dapat dikembangkan sebagai industri jasa.

Dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan umum, transportasi diartikan sebagai penyediaan jasa angkutan guna mendorong pemerataan; melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan; mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil; melancarkan distribusi barang dan jasa; dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah. Khusus untuk wilayah Kabupaten Bangka, sebagai wilayah perbatasan dan cenderung terisolasi, transportasi berfungsi untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah.

Walaupun Kabupaten Bangka merupakan kawasan yang berbatasan dengan laut tetapi alat angkut dan sarana perhubungannya sebagian besar menggunakan transportasi darat terutama untuk melayani pergerakan orang atau barang di dalam wilayah kabupaten maupun antar kabupaten/kota di dalam wilayah Pulau Bangka. Untuk transportasi darat ini, sarana jalan yang dimiliki Kabupaten Bangka, yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi meliputi jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Data yang ada menunjukkan bahwa jalan kabupaten yang berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 adalah sepanjang 734,501 Km. Dilihat dari kondisi jalannya, sampai dengan tahun 2014 sebanyak 329,576 km dalam kondisi baik, 134,885 Km dalam kondisi sedang dan 206,235 Km dalam kondisi rusak sedang serta 63,805 Km rusak berat.

Tabel 2.29
Panjang Jalan Propinsi dan Kabupaten Menurut Permukaan Jalan (Km), Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Bangka
Tahun 2009 - 2014

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas (km)						
a. Jalan Nasional	126,866	126,866	126,866	126,866	126,866	126,866
b. Jalan Propinsi	61,800	61,800	61,800	61,800	158,20	158,20
c. Jalan Kabupaten/Kota	652,710	652,710	652,710	652,710	734,501	734,501
d. Jalan Desa/Lokal	447,562	448,362	467,343	553,415	365,985	310,07
2. Kondisi Jalan (km)						
a. Aspal >>Lapen	7,638	8,638	9,271	9	34,215	33,297
b. Berbatu	0	0	0	0	0	0
c. Hotmix & Beton	466,989	475,819	486,192	500,62	516,479	528,80
d. Kerikil	0	0	0	0	0	0
e. Tanah	178,083	168,253	157,247	143	183,807	172,334
3. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (km)						
a. Jalan Baik	383,064	374,876	303,320	312,557	200,578	329,576
b. Jalan Sedang	168,652	184,011	217,784	204,608	206,780	134,885
c. Jalan Rusak Sedang	8,724	3,380	33,114	46,499	154,872	206,235
d. Jalan Rusak Berat	92,270	90,443	98,492	89,046	172,271	63,805

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2013

e. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Di bidang kesehatan khususnya Keluarga Berencana (KB) perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka juga tak kalah pentingnya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 sebanyak 56.196 PUS dengan peningkatan jumlah peserta KB aktif sampai dengan tahun 2014 sebanyak 45.799 peserta KB.

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 terdapat 80.549 kepala keluarga. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah keluarga sampai dengan tahun 2014 terdiri dari Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 1.324 kepala keluarga, KS 1 sebanyak 3.630 kepala

keluarga dengan persentase kepala keluarga miskin sebesar 6,15 %, terus mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.30
Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah PUS	45.791	47.840	51.606	53.213	54.845	56.196
2	Jumlah Peserta KB Aktif	36.500	37.426	40.698	40.881	42.898	45.799

Sumber : Kantor KB dan PP Kabupaten Bangka Tahun 2014

Tabel 2.31
Jumlah Pra KS dan KS 1
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pra KS	2.613	2.763	2.035	1.690	1.697	1.324
2	KS1	9.013	7.799	6.524	4.088	4.181	3.630
3	Jlh. Pra KS & KS 1	11.626	10.562	8.559	5.778	5.878	4.954
4	Jumlah KK	68.050	70.945	75.679	76.579	78.852	80.549
5	% KK Miskin	17,08	14,89	11,31	7,54	7,45	6,15

Sumber : Kantor KB dan PP Kabupaten Bangka Tahun 2014

f. Kearsipan dan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan peranan strategis untuk turut mendukung kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam pengusaan informasi. Di kabupaten Bangka sendiri, untuk jumlah koleksi judul buku sampai dengan tahun 2014 meningkat sebesar 8.644 judul buku, jumlah koleksi buku pada tahun 2014 menjadi 15.236 buku, dengan jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 2014 berjumlah 5.468 orang, atau meningkat hampir 112 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 2.574 orang saja.

Tabel 2.32
Jumlah Kearsipan, Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah SKPD	48	48	48	48	48	48
2	Jumlah SKPD yang menerapkan Manajemen Kearsipan secara baku	4	4	5	5	13	48
3	Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan daerah	6.397	6.637	7.228	7.678	8.044	8.644
4	Jumlah koleksi buku di Perpustakaan daerah	11.827	13.977	14.568	15.159	15.865	15.236
5	Jumlah Pengunjung Perpustakaan selama 1 tahun	1.755	2.681	2.612	2.574	2.574	5.468

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2014

g. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata, dan terjangkau. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri merupakan hal yang amat penting disamping ketersediaan pangan nasional itu sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka terpenuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi. Dari data pada tabel 2.33 dibawah ini, bahwa rata-rata jumlah stock pangan (beras) pada tahun 2014 mengalami penurunan yakni mencapai 39.730.000 Kg. Jumlah stock tersebut merupakan yang terbesar kedua dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan yang rata-rata jumlah stock pangan pada tahun 2013 merupakan yang terbesar dengan rata-rata jumlah mencapai 41.445.206 Kg. Sedangkan pada tahun 2011 rata-rata jumlah stock pangan mencapai 1.342.057 Kg, mengalami penurunan hingga mencapai 999.542 Kg pada tahun 2012.

Tabel 2.33
Rata-Rata Jumlah Stock Pangan Tahun 2009 s.d 2014
Kabupaten Bangka

No.	Uraian	Capaian					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rata2 jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg)	1.368.723	892.843	1.342.057	999.542	41.445.206	39.730.000

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jumlah stock pangan pada tahun 2014 mencapai 39.730.000 Kg dan ditargetkan menjadi 44.553.596 kg pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 4.823.596 kg.

h. Sosial

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 menurun sebanyak 1.509 orang, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 sebanyak 5.778 dan 2.481 orang. Pada tabel 2.34 dibawah ini menunjukkan penduduk penyandang masalah sosial dimana penyandang cacat di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.009 orang, jumlah penghuni panti asuhan sebanyak 87 orang sedangkan untuk komunitas adat terpencil sampai dengan tahun 2014 sebanyak 50 orang.

Tabel 2.34
Jumlah Penduduk Miskin, Penduduk Penyandang Masalah Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Jumlah Penduduk miskin	11.626	10.562	8.559	5.778	2.481	1.509	Orang
2. Penduduk Penyandang Masalah Sosial							
a. Penduduk rawan Sosial dan Sarana							
1). Lanjut Usia Terlantar	-	200	257	257	257	258	Orang
2). Komunitas Adat Terpencil	176	85	0	30	50	50	Orang
3). Penyandang Cacat	1.009	1.009	1.045	1.049	1.045	1.009	Orang
4). Penyandang Tuna Netra	-	-	76	76	86	86	Orang
5). Penyandang Tuna Wicara-Rungu	-	-	207	207	220	220	Orang
6). Penyandang Tuna Daksa	-	-	396	396	396	298	Orang
7). Pengungsi dan Korban Bencana	-	-	-	21	149	3.099	Orang
b. Jumlah Penghuni Panti Asuhan	-	-	-	341	288	87	Orang
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)							
a. Karang Taruna	41	41	41	41	41	177	Orang
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	-	-	-	8	8	8	Orang

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2014

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan serta kelautan dan perikanan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain-lain. Ini yang menjadi faktor investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangka baik dari dalam negeri maupun dari pihak asing. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan adalah berupa barang dan jasa. Sektor ini dibentuk oleh 3 (tiga) sub sektor yaitu : sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor hotel dan sub sektor restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu sector yang mengalami peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 3 (tahun) terakhir.

Berdasarkan jumlah PMDN dan PMA untuk tahun 2010, dimana jumlah PMDN sebesar Rp. 27.868.000.000 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) dan PMA tahun 2010 sebesar 2.504.380 Dollar U$ (*Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dólar Amerika Serikat*). Untuk tahun 2010 dan 2011 jumlah PMDN sebesar Rp. 27.868.000.000 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*), untuk PMA pada tahun 2011 sebesar 4.260.987 Dollar U$ (*Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Dólar Amerika Serikat*). Pada tahun 2012 jumlah PMDN dan PMA meningkat cukup signifikan, dimana PMDN sebesar Rp. 150.868.000.000 (*Seratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) dan PMA sebesar 7.364.644 Dollar U$ (*Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Dólar Amerika Serikat*). Pada tahun 2014 jumlah PMDN dan PMA mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana PMDN

sebesar Rp. 183.868.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) dan PMA diproyeksi sebesar 20.009.431 Dollar U$ (*Dua Puluh Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Dólar Amerika Serikat*). Jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel 2.35 sebagai berikut :

Tabel 2.35
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

Tahun	Uraian	PMDN	PMA (U$)
2009	2 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perdagangan, Hotel dan Restoran)	117.027.868.000	2.504.380
2010	2 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perdagangan	27.868.000.000	2.504.380
2011	2 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perdagangan	27.868.000.000	4.260.987
2012	2 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perdagangan	150.868.000.000	7.364.644
2013	13 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perkebunan dan Peternakan / Perdagangan, Hotel dan Restoran	571.416.427.836	269.471.724
2014	8 investor (Bidang Perkebunan, Pariwisata, Industri dan Perikanan)	183.868.000.000	20.009.431

Sumber : Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tahun 2014

b. Pertanian

Di Kabupaten Bangka untuk Sub Sektor Pertanian saat ini adalah program pembangunan dan pengembangan yang diprioritaskan. Dimana sampai dengan tahun 2014 untuk luas panen padi seluas 2.362 ha dengan jumlah produksi gabah sebesar 4.866 ton. Untuk produksi beras sampai dengan tahun 2014 sebesar 3.163 ton dengan jumlah konsumsi beras pertahun sebesar 24.108 ton/tahun.

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun 2014 seluas 221 ha, dengan jumlah produksi sebesar 1.668 ton. Sedangkan untuk jumlah konsumsi pertahun sampai dengan tahun 2014 sebesar 579,80 ton/pertahun, sedangkan untuk luas areal produksi jenis singkong sampai dengan tahun 2014 sebesar 595 ha, dengan jumlah produksi 4.728 ton serta jumlah konsumsi pertahun sebesar 12.084 ton/pertahun.

Tabel 2.36
Luas Produksi Padi, Jagung dan Singkong
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
➢ **Padi**							
1). Luas Areal Produksi (Panen)	1.428.00	2.265.00	3.339.00	1.463.00	1.806,00	2.362	Ha
2). Jumlah Produksi Gabah	2.865.60	4.584.00	776,30	3.264,10	3.700,00	4.866	Ton
3). Produksi Beras	1.862,64	2.979,60	504,60	2.121,67	2.220,00	3.163	Ton
4). Jumlah Konsumsi Beras	29.945,43	32.025,78	35.765,81	39.184,76	26.567,00	24.108	Ton/ Tahun
➢ **Jagung**							
1). Jumlah Areal Produksi (Panen)	169	194	92	265	50	221	Ha
2). Jumlah Produksi	507	582	276	195	150	1.668	Ton
3). Jumlah Konsumsi	78,18	11.139	31.107	27.258	2.102	579,80	Ton/ tahun
➢ **Singkong dan Hasil Umbi-Umbian**							
1). Luas Areal Produksi (Panen)	555.00	387.00	316.00	371.00	510,00	595	Ha
2). Jumlah Produksi	4.058,00	2.582,00	2.139,00	2.651,00	3700,00	4.728	Ton
3). Jumlah Konsumsi	2.614,37	3.444,86	6.189,04	32.370,02	8.511,00	12.084	Ton/ tahun

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2014

c. Peternakan

Di daerah Kabupaten Bangka umumnya usaha di sub sektor peternakan yang dilakukan masyarakat saat ini hanya merupakan peternakan rakyat yang diusahakan secara sambilan. Seperti penjelasan pada tabel 2.37 dibawah ini sampai dengan tahun 2014 untuk jumlah populasi sapi sebanyak 1.041 ekor, kambing 211 ekor, babi 21.233 ekor, ayam buras sebanyak 124.888 ekor, ayam pedaging sebanyak 3.126.180 ekor serta itik sebanyak 34.717 ekor. Sedangkan untuk industri peternakan untuk jumlah perusahaan pembibitan ayam sebanyak 2 buah dan jumlah rumah potong hewan sebanyak 5 buah.

Tabel 2.37
Jumlah Populasi dan Industri Peternakan
Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
➢ **Ternak Sapi Potong**							
1). Jumlah Populasi	677	741	529	622	712	1.041	Ekor
2). Jumlah Pemotong-an per Tahun	1.485	1.500	1.748	1.800	1.320	2.158	Ekor
3). Rata-Rata Kepemilikan	27	29	21	25	5	17	Ekor
➢ **Ternak Kecil**							

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1). Jumlah Populasi Kambing	114	234	281	821	979	211	Ekor
2). Jumlah Populasi Domba							
3). Jumlah Populasi Babi	12.629	16.574	19.889	10.945	13.642	21.233	Ekor
➢ **Unggas**							
1). Jumlah Ayam Buras	123.755	131.617	157.940	102.357	94.080	124.888	Ekor
2). Ayam Pedaging							
a. Jumlah Populasi	266.383	3.197.225	3.836.670	5.163.004	1.747.128	3.126.180	Ekor
b. Jumlah Peternak	-	-	-	-	8.736	-	
c. Jumlah Produksi	1.560.291	4.691.646	4.926.228	10.791	883.316	1.948.062	Ekor/Tahun
d. Rata-Rata Kepemilikan per Peternak	-	21.314	25.577	34.420	200	-	Ekor /KK/ Tahun
3). Itik							
a. Jumlah Populasi	20.393	22.700	27.240	139.542	242.004	34.717	Ekor
b. Jumlah Peternak	50	50	50	50	1.210	-	Peternak
c. Jumlah Produksi	4.372	29.693	31.178	33.304	34.309	20.755	Ekor/ Tahun
d. Rata-Rata Kepemilikan per Peternak	-	10	12	58	200	-	Ekor/ Peternak
➢ **industri Peternakan**							
1). Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	-	-	1	1	1	2	Buah
a. Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	3	3	3	3	3	5	Buah

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2014

d. Kehutanan

Sub sektor kehutanan sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian juga memberikan peranan yang relatif besar dalam pembangunan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Luas lahan kritis sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Bangka seluas 33.638,59 Ha, untuk luas lahan reboisasi seluas 172 Ha, luas lahan penghijauan seluas 175 Ha, serta untuk luas land use di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 seluas 0 ha. Sedangkan untuk hasil hutan ikutan dalam daerah Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 antara lain : Kayu Bulat sebanyak 1.707,000 M^3.

Tabel 2.38
Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan, Land Use dan Hasil Hutan Non HPH Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
a. Hasil Hutan Non HPH							
1) Kayu Bulat	18.449,89	326,85	446,48	1.078,37	753,366	1.707,000	M^3
b. Luas Lahan Kritis	92.865	92.636	92.341	91.582	76.030,62	33.638,59	Ha
c. Luas Lahan Reboisasi	145	210	126	142	125	172	Ha
d. Luas Lahan Penghijauan	84	85	633	964	798	175	Ha
e. Luas Land Use (Penggunaan Lahan) Lainnya Di Luar Hutan Negara	194.553,40	194.553,40	194.553,40	194.553,40	194.553,40	-	Ha

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2014

e. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relative besar untuk dikembangkan.

Untuk jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 26.115 ton, sementara itu untuk sarana dan prasarana penangkap ikan di laut dengan jumlah kapal penangkap ikan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2.470 unit. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga perikanan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4.579 kepala keluarga dan untuk jumlah tempat pelelangan ikan sebanyak 1 unit sampai dengan tahun 2014.

Untuk sub sektor perikanan darat luas tambak sampai dengan tahun 2014 seluas 120 ha dengan umlah produksi perikanan darat sebesar 95 ton. Sedangkan untuk luas kolam seluas 8,99 ha serta jumlah produksi rumah tangga meningkat menjadi 339,32 ton sampai dengan tahun 2014.

Tabel 2.39
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d 2014

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
➢ **Perikanan Laut**							
1). Jumlah Tangkapan	20.121	20.515	23.793	24.616	25.023	26.115	Ton
2). Jumlah Kapal Penangkap Ikan	3.026	2.214	2.323	2.334	2.334	2.470	Unit
3). Jumlah Rumah Tangga Perikanan	3.854	4.123	3.697	4.454	3.321	4.579	KK
4). Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	2	2	2	2	1	1	Unit

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
➢ **Perikanan Darat**							
1). Tambak							
a. Luas	234,91	234,91	138	138	120	120	Ha
b. Jumlah Produksi Perikanan Darat	8	44	23,33	99	81	95	Ton
2). Kolam							
a. Luas	15.740	17.889	13,64	15,27	15,28	8,994	Ha
b. Jumlah Produksi Rumah Tangga	303.475	525.701	90.441	198,37	179,87	339,32	Ton

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2014

5.2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi

Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri.

Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut :

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka lebih lanjut perlu dilakukan ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah. Penyusunan indikasi ketataatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/sub sektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dan

tingkat kepentingan/ urgensi dari program/ sub program maupun sektor/ sub sektor yang harus diprioritaskan.

Rencana sistem kegiatan pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahapan pembangunan program pengembangan pemanfaatan ruang (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis) dan tahapan pembangunan program pengembangan struktur tata ruang (pengembangan sistem kota-kota, sistem transportasi, sarana dan prasarana wilayah). Pada tahun 2011 realisasi RTRW sebanyak 7 ketaatan dengan target rencana peruntukan RTRW 40 ketaatan dan rasio sebesar 0,18 persen, untuk tahun 2012 realisasi RTRW sebanyak 110 ketaatan dengan target rencana peruntukan RTRW 60 ketaatan dan rasio meningkat menjadi 1,83 persen, tahun 2013 realisasi RTRW 100 ketaatan dengan target rencana peruntukan RTRW 95 ketaatan dan rasio meningkat menjadi 1,05, sedangkan pada tahun 2014, rencana peruntukan RTRW ditargetkan sebesar 80 persen, dan terealisasi mencapai 54,66 persen atau sebesar 68,33 persen dengan rasio ketaatan mencapai 0,68. Secara detail hasil pemanfaatan ruang Kabupaten Bangka tahun 2010-2014 pada tabel 2.40 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Rasio Ketaatan terhadap RTRW
Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Realisasi Ketaatan RTRW	3	7	110	100	54,66
2.	Rencana Peruntukan RTRW	20	40	60	95	80
3.	Persentase	0,15	17,50	183,33	105,26	68,33
4.	Rasio (1./2.)	0,15	0,18	1,83	1,05	0,68

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2014

b. Luas wilayah produktif

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2013 memiliki luas sebesar 90.194,86 ha. Termasuk dalam kawasan produktif ini adalah kawasan pertanian. kawasan permukiman. pertambangan dan industri. Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur. mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong

sangat tinggi dan tinggi. Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. kawasan peruntukkan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
   - kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;
   - kawasan peruntukkan pertanian lahan kering
3. kawasan peruntukkan perkebunan;
4. kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;
5. kawasan peruntukkan peternakan;
6. kawasan peruntukkan perikanan;
7. kawasan peruntukkan pertambangan;
8. kawasan peruntukkan industri;
9. kawasan peruntukkan pariwisata;

Untuk menghitung luas wilayah produktif Kabupaten Bangka disusun pada tabel 2.41, sebagai berikut :

Tabel 2.41
Persentase luas Wilayah Produktif
Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2014

NO	Uraian	2013	2014
1.	Luas Wilayah Produktif	44,30	77,14
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	88,70	86,60
3.	Rasio (1./2.)	66,50	81,87

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2014

2. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas disajikan dalam tabel 2.42, sebagai berikut :

Tabel 2.42
Angka Kriminalitas
Kabupaten Bangka Tahun 2011 s.d 2014

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	456	312	594	676
2.	Jumlah Penduduk	297,091	344,582	304.130	305.158
3.	Angka Kriminalitas (1)/(2)	0,02	0,01	0,002	0,002

Sumber : Polres Bangka Tahun 2014

b. Lama Proses Perijinan

Proses Penerbitan Perijinan di Kabupaten Bangka antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari. Dimana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah SKPD yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan. Adapun pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di Kabupaten Bangka meliputi 13 (tiga belas) bidang, yaitu :

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Pekerjaan Umum
3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
4. Bidang Perhubungan
5. Bidang Lingkungan Hidup
6. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
7. Bidang Kelautan dan Perikanan
8. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Bidang Pertanahan
10. Bidang Peternakan
11. Bidang Kehutanan
12. Bidang Pendapatan
13. Bidang Pendidikan

Untuk penerbitan izin bidang kesehatan terdiri dari 24 (dua puluh empat) perizininan, bidang Pekerjaan Umum terdiri 2 (dua) perizinan, bidang Perindustrian dan Perdagangan terdir dari 6 (enam) perizinan, bidang Perhubungan 2 (dua) perijinan, bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 5(lima) perijinan, bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 13 (tiga belas) perijinan, bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) perijinan, bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang

Pertanahan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidag Pertanahan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang Peternakan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang Kehutanan terdiri dari 1 (satu) perijinan, bidang pendapatan terdiri dari 2 (dua) perijinan dan bidang pendidikan terdiri dari 1 (satu) jenis perijinan.

Dalam ketentuan penerbitan perijinan di Kabupaten Bangka diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendegelasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah, sehingga dengan peraturan Bupati tersebut penerbitan izin sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis sehingga pembangunan di bidang investasi di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

c. Pajak dan Retribusi Daerah

Di Kabupaten Bangka salah satu penunjang pendapatan asli daerah (PAD) ada di sektor pajak dan retribusi, dimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa jenis Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Kabupaten Bangka, sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

- Pajak Daerah Kabupaten Bangka terdiri dari :
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Walet
  4. Pajak BPHTB
  5. Pajak Air Bawah Tanah
  6. Pajak Minyak, Energi dan Bahan Bakar
  7. Pajak Reklame
  8. Pajak Parkir
- Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- Retribusi Jasa Usaha
  1. Retribusi Pemakaian Jasa Usaha
  2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan dan Villa
- Retribusi Perizinan Tertentu :
  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

d. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Penataan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bangka untuk mendukung iklim usaha sudah dilakukan secara bertahap dari tahun 2009. Sehingga masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang ingin menginvestasi di Kabupaten Bangka dapat mengembangkan usaha secara efisien sesuai dengan ketetntuan peraturan daerah di Kabupaten Bangka

Untuk tahun 2009 terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dimana besarnya retribusi yang diambil untuk keperluan non industri besar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu ruiah) per satu ijin, sedangkan untuk non industri kecil besarnya retribusi yang diambil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per satu ijin.

Untuk tahun 2011 terdapat 3 Perda yang sangat dominan dalam hal mendukung iklim usaha di Kabupaten Bangka, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tahun 2012 ada 8 (delapan) Perda yang dalam hal ini sangat efisien dalam hal mendukung iklim usaha di Kabupaten Bangka yang terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tambang Mineral
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bangka
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Perusahaan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

e. Desa Swasembada

Dari jumlah seluruh Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Bangka menurut klarifikasi Desa untuk tahun 2014 Desa Swadaya sebanyak 62 Desa dari 71 Desa yang ada di Kabupaten Bangka. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang mana desa swakarsa berjumlah 8 desa namun desa swadaya mengalami penurunan yakni hanya sebanyak 26 desa saja.

Tabel 2.43
Klasifikasi Desa di Kabupaten Bangka
Tahun 2009 – 2014

NO	KLASIFIKASI DESA	JUMLAH					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Swasembada	-	-	-	-	-	-
2	Swakarya	8	8	8	8	8	-
3	Swadaya	61	62	62	63	26	62
	Jumlah Desa	69	70	70	71	34	62

Sumber : BPM dan Pemdes, 2014

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANGKA

Konsep dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka secara keselurahan mengadopsi kepada peraturan yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Adapun regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yakni; (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan diatas selain menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka, juga menjadi motor penggerak dinamika tujuan desentralisasi dan otonomi daerah terutama dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong investasi daerah. Pengelolaan keuangan menjadi efektif dan efisien apabila di dalam pelaksanaannya mengacu atau menitikberatkan pada pola efektivitas dan efisiensi dari setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk dapat memahami optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka, secara detail perlu mencermati kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Adapun strukrtur pendapatan daerah Kabupaten Bangka terdiri dari :

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. **Pendapatan Transfer** yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lain dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** terdiri dari Hibah, Dana Darurat.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan diatas, juga didukung oleh dana lainnya yang juga berasal dari pemerintah pusat yakni dana dekonsentrasi (Dekon) dan dana tugas pembantuan (TP) yang disalurkan melalui kementerian dan provinsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 , sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk

mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Dalam kurun lima tahun, Pemerintahan Kabupaten Bangka telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2009 sebesar 481,2 milyar rupiah atau 99,99% dari target yang ditetapkan, dan meningkat sebesar 788,3 milyar rupiah atau 94,27% dari target yang ditetapkan pada tahun 2013. Dengan demikian, persentase realisasi peningkatan pendapatan dari tahun 2009 ke tahun 2013 mencapai 98,58%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pajak Daerah terdiri dari 6 (enam) jenis pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, air tanah, sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan sedangkan retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rataan Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	**Pendapatan**	**481.223.240**	**466.435.625**	**659.980.393**	**732.169.289**	**810.680.875**	**13,52**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**33.318.940**	**35.370.415**	**32.896.963**	**56.062.845**	**62.977.749**	**14,36**
1.1.1	Pajak Daerah	9.980.787	8.812.680	11.075.099	14.148.440	17.359.395	13,84
1.1.2	Retribusi Daerah	8.780.107	12.745.020	8.886.887	6.274.889	7.790.197	0,35
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.383.289	3.957.315	5.253.249	5.274.886	4.019.174	68,37
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	11.174.758	9.855.400	7.681.728	30.364.629	33.808.983	63,20
1.2	**Pendapatan Transfer**	**447.904.300**	**431.065.210**	**620.550.230**	**671.598029**	**744.295.826**	**13,35**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	414.564.030	371.499.755	532.772.229	579.442.590	607.081.542	11,24
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	32.574.466	37.131.337	36.931.747	35.855.274	38.461.078	4,05
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	48.512.751	33.568.011	130.962.481	87.713.629	79.682.444	53,96
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	278.338.913	272.130.207	324.986.301	403.295.027	444.188.100	11,23
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	55.138.000	28.670.200	39.891.700	52.578.660	44.749.920	5,61
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	8.572.366	19.032.833	44.739.037	34.335.918	74.284.603	107,55
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	8.572.366	19.032.833	44.739.037	34.335.918	74.284.603	107,55
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	24.767.903	40.532.622	43.038.964	57.819.521	62.929.681	17,87
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak	20.065.191	24.185.131	27.170.950	41.142.277	32.849.932	13,13
1.2.3.2	Bantuan Keuangan Propinsi	4.702.712	16.347.491	15.868.015	16.677.245	30.079.749	48,56
1.3	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	**0**	**0**	**6.533.200**	**4.508.416**	**3.407.300**	**22,47**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	6.533.200	4.508.416	3.407.300	22,47

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Untuk tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka sebesar 62,9 milyar rupiah atau 99,74% dari target yang ditetapkan, meningkat cukup siginifikan jika dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya sebesar 33,3 milyar rupiah. Adapun komponen PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Grafik 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2013 (ribuan rupiah)

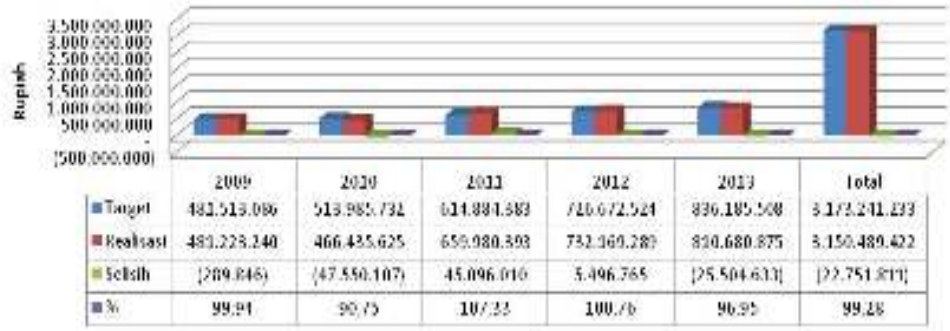

	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Target	482.513.086	513.985.732	614.884.583	716.072.521	836.189.568	3.173.241.233
Realisasi	481.223.240	466.435.625	659.980.393	732.169.289	810.680.875	3.150.489.422
Selisih	(289.846)	(47.550.107)	45.096.010	5.496.765	(25.504.633)	(22.751.811)
%	99,91	90,75	107,33	100,76	96,95	99,28

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka selama lima tahun (2009 – 2013) memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,36% dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata per tahun sebesar 6,86%. Kontribusi pendapatan transfer terhadap APBD dalam setiap tahunnya rata-rata sebesar 92,52% dari total pendapatan Kabupaten Bangka, dan lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 0,61% total pendapatan Kabupaten Bangka. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun terakhir berkisar 13,52% per tahun. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 14,36% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer hanya sebesar 13,35% per tahun, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,47% per tahun.

Tabel 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2013
(ribuan rupiah)

No.	Tahun	PAD	Pertumbuhan		APBD	Proporsi/ Kapasitas Keuda
			Rp	%		
1	2008	32.072.424			511.666.496	
2	2009	33.318.940	1.246.516	3,89	481.223.240	6,92
3	2010	35.370.415	2.051.475	6,16	466.435.625	7,58
4	2011	32.896.963	(2.473.452)	(6,99)	659.980.393	4,98
5	2012	56.062.844	23.165.881	70,42	732.169.289	7,66
6	2013	62.977.749	6.914.905	12,33	788.268.275	7,77
	Rata-Rata Per Tahun		**6.181.065**	**14,36**	**606.623.886**	**6,86**

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah

Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka merupakan pos yang cukup besar peningkatannya dibandingkan dua pos lainnya (retribusi daerah dan laba perusahaan milik daerah), memiliki kontribusi realisasi tahun 2009 – 2013 berkisar antara 24,92% - 29,96%. Sedangkan untuk realisasi anggaran terhadap target bergerak pada tingkat 59,37% - 112,87%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 27,56% dan terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 24,92%. Sedangkan realisasi anggaran terhadap target tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 112,87% dan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 59,37%. Pertumbuhan realisasi pajak daerah Kabupaten Bangka rata-rata 13,84% sedang pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 27,75%.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Pencapaian pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 17.359.394.965,- angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 9.980.786.937,81. Dengan demikian trend peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2013 rata-rata mencapai 80,31%.

3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah

Retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai tahun 2013 berkisar antara 11,19% - 36,03%, sedangkan realisasi anggaran terhadap target berkisar antara 87,00% - 154,00%. Retribusi daerah diperoleh dari objek-objek retribusi yaitu : (i) retribusi jasa umum; (ii) retribusi jasa usaha; dan (iii) retribusi perizinan tertentu.

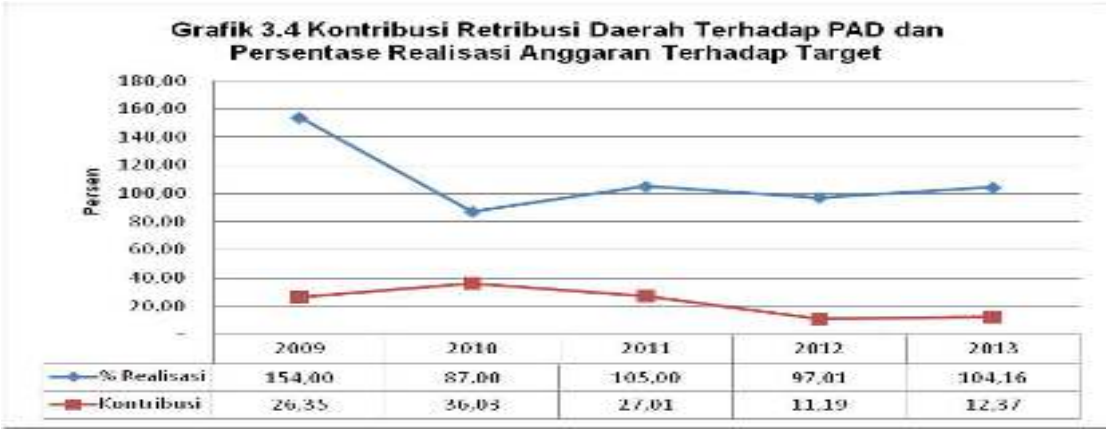

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Dari tabel diatas kontribusi retribusi daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni mencapai hingga 36,03%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012 yakni hanya sebesar 11,19%. Dari sisi realisasi retribusi daerah terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan realisasi sebesar 154% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 87%. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah tahun 2009 terhadap tahun 2008 sebesar -3,37%, kemudian pada tahun 2010 pertumbuhan meningkat menjadi 45,16%. Tahun 2013 pertumbuhan retribusi daerah mencapai 24,15%, dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mencapai -29,39%.

Grafik 3.5 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2009 - 2013
(ribuan rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013
Anggaran	5.689.555	14.598.037	8.457.073	6.468.037	7.479.237
Realisasi	8.790.107	12.745.020	8.886.887	6.274.889	7.790.197
Selisih	3.090.552	(1.853.017)	429.814	(193.148)	310.960
%	154,32	87,31	105,08	97,01	104,16

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun telah menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2009 retribusi daerah hanya sebesar 8,8 milyar rupiah dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,8 milyar rupiah. Dengan demikian, peningkatan trend retribusi daerah dari tahun 2009 – 2013 rata-rata mencapai 109,58%.

3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pencapaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan sebesar 3,3 milyar rupiah dan meningkat menjadi 4 milyar rupiah pada tahun 2013. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini

terdiri dari komponen penyertaan modal pada Bank Sumsel dan Bank Syariah Bangka.

Grafik 3.6 Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang Dipisahkan 2009 - 2013 (ribuan rupiah)

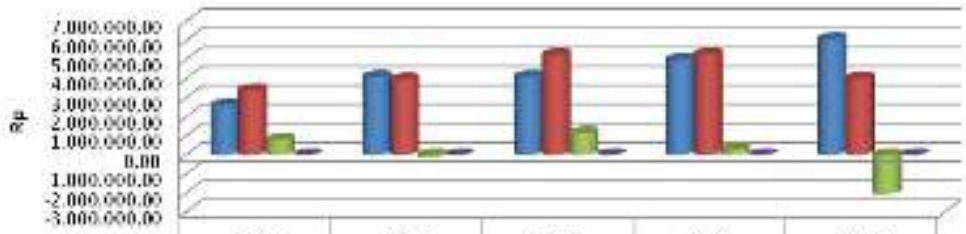

	2009	2010	2011	2012	2013
Anggaran	2.600.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	5.000.000,00	6.080.000,00
Realisasi	3.383.289,00	3.957.315,00	5.253.249,00	5.274.886,00	4.019.174,00
Selisih	783.289,00	-142.685,00	1.153.249,00	274.886,00	-2.060.826,00
%	130,13	96,52	128,13	105,50	66,10

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

3.1.1.4. Lain-Lain Pedapatan Asli Daerah yang Disahkan

Kontribusi realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Kabupaten Bangka terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sebesar 33,54% atau sebesar Rp. 11.174.757.667,43, tahun 2010 menurun menjadi 27,86% atau sebesar Rp. 9.855.399.467,56. Selanjutnya di tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 7.681.728.174,06 atau 23,35%, dan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 30.364.628.661,90 atau 54,16%. Namun, pada tahun 2013 kontribusi mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 53,68% atau sebesar Rp. 33.808.982.743,-. Dari sisi realisasi anggaran terhadap target menunjukkan fluktuasi yang beragam, pada tahun 2009 terealisasi 77% dari target sebesar Rp. 14.530.000.000,-, kemudian menurun pada tahun 2010 hingga mencapai 53% dari target Rp. 18.495.000.000,-. Di tahun 2011 dan 2012 justru mengalami peningkatan secara berturut-turut hingga mencapai 55% dan 144% dari target sebesar Rp. 14.064.500.000,- dan Rp. 21.127.100.000,- dan pada tahun 2013 realisasi anggaran kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 107,99% dari target sebesar Rp. 31.306.945.000,-.

Grafik 3.7 Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap PAD dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target

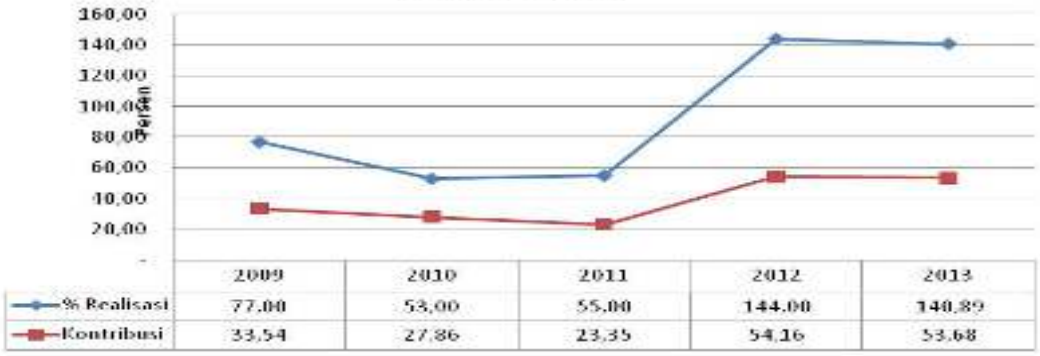

	2009	2010	2011	2012	2013
% Realisasi	77,00	53,00	55,00	144,00	140,89
Kontribusi	33,54	27,86	23,35	54,16	53,68

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

3.1.1.5. Pendapatan Transfer

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Bangka menunjukkan trend yang positip. Hasil ini terlihat dari realisasi pendapatan tranfer tahun 2009 sebesar 447,9 milyar rupiah dan meningkat menjadi 744,3 milyar rupiah pada tahun 2013. Capaian dari komponen pendapatan transfer tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik 3.8 Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2009 - 2013 (ribuan rupiah)

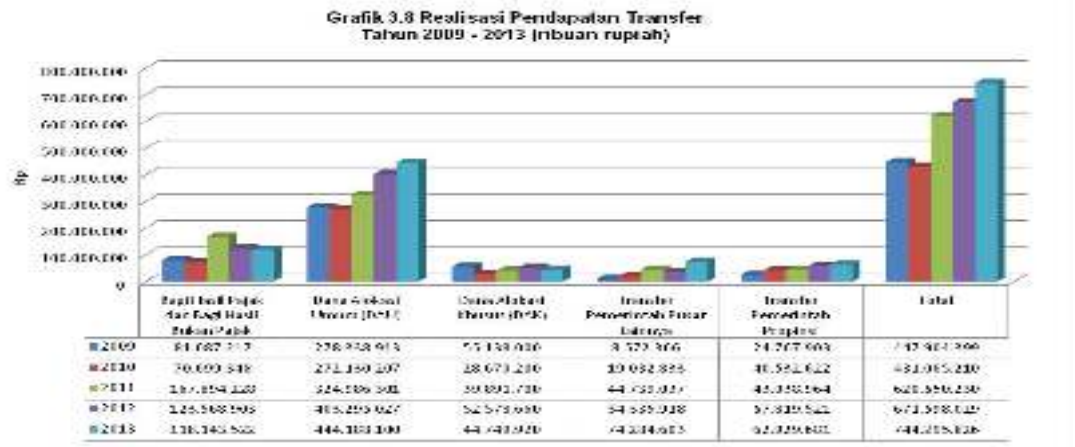

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Grafik 3.9 Kontribusi Pendapatan Transfer 2009 - 2013

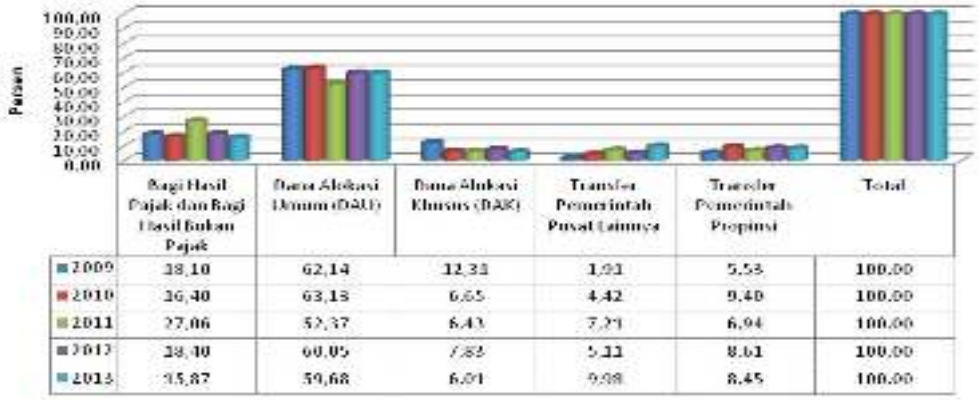

	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Transfer Pemerintah Propinsi	Total
2009	18,10	62,14	12,31	1,01	5,53	100,00
2010	16,40	63,18	6,65	4,42	9,40	100,00
2011	27,06	52,37	6,43	7,21	6,94	100,00
2012	18,40	60,05	7,82	5,11	8,61	100,00
2013	15,87	59,68	6,01	9,98	8,45	100,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

3.1.1.6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan hibah merupakan katalisator utama pembentukan dana dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam kurun waktu lima tahun, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan trend yang cenderung terus mengalami penurunan dengan kontribusi rataan hanya sebesar 0,41% dari total realisasi pendapatan, namun dengan rataan pertumbuhan yang cukup besar hingga mencapai (31,08%). Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh tidak terealisasinya pos lain-lain realisasi pendapatan daerah yang sah pada kurun waktu 2009 dan 2010. Secara detail, perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendapatan Hibah			6.533.200	4.508.416	3.407.300
2	Pendapatan Dana Darurat					
3	Pendapatan Lainnya					
	Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah			**6.533.200**	**4.508.416**	**3.407.300**

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Salah satu ukuran untuk mengatahui kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari perbandingan tersebut, kepasitas kuangan daerah Kabupaten Bangka cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif dengan rataan yang berkisar pada level 6%. Tahun 2009 rasio sebesar 6,92% kemudian tahun 2010 naik menjadi 7,58%. Kemudian kembali mengalami penurunan hingga mencapai 4,98% di tahun 2011 dan kembali meningkat di tahun berikutnya hingga mencapai 7,66%. Namun, pada tahun 2013 rasio perbandingan PAD dengan APBD Kabupaten Bangka mengalami lonjakan penurunan yang sangat signifikan yakni hingga mencapai 5,15%.

3.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2009 – 2013 mengalami pertumbuhan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**	**13.15**
1.1.	**ASET LANCAR**	**33,40**
1.1.1.	Kas	171,86
1.1.2.	Piutang	134,75
1.1.3.	Persediaan	21,63
1.2.	**INVESTASI**	**9,14**
1.3.	**ASET TETAP**	**15,48**
1.3.1.	Tanah	82,81
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	16,34
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	23,29
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,87
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	68,31
1.3.6.	Kontruksi dalam Pengerjaan	(19,18)
1.4.	**ASET LAINNYA**	**2.178,08**
1.4.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	189,87
1.4.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-
1.4.3.	Kemitraan dengan Pihak Kedua	3,51
1.4.4.	Aset tak Berwujud	58,92
1.4.5.	Aset Lain-Lain	(60,33)
	JUMLAH ASET DAERAH	**13,15**
2.	**KEWAJIBAN**	**150,12**
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**189,21**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	158,89
2.1.2.	Hutang Usaha BLUD	9,32
2.1.3.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	435,26
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**(20,00)**
2.2.1.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	-
2.2.2.	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	-
2.2.3.	Utang Jangka Panjang Lainnya	(20,00)
3.	**EKUITAS DANA**	**13,22**
3.1.	**EKUITAS DANA LANCAR**	**31,64**
3.1.1.	SILPA	171,81
3.1.2.	Cadangan Piutang	134,75
3.1.3.	Cadangan Persediaan	21,63
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan	(20,00)
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	194,29
3.2.	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**15,94**
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	15,46
3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2.318,35
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	9,14
3.2.4.	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**13,15**

Sumber : data diolah

Aset tetap merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2009 – 2013, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai 13% yang menandakan bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bangka meningkat sebesar 13% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 33%, komponen terbesar adalah kas yang merupakan aset lancar dalam bentuk uang dan disajikan dalam neraca menggunakan nilai nominal, kas mengalami kenaikan sebesar 171,86%, sementara persediaan tumbuh sebesar 21,63% dan piutang tumbuh sebesar 134,75%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Bangka berada pada kondisi yang sehat.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2009 – 2013 dengan rata-rata sebesar 150,12%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, dengan total aktiva lancar yang jauh lebih besar dibandingkan total hutang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*current ratio*) yang menggambarkan kemampuan pemda dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*) menggambarkan kemampuan pemda dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Tabel 3.5
Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	Rataan (%)
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	201	137	154	68,39	10,26	**114,13**
2	Rasio Cepat (Quick Ratio)	189	107	145	63,93	9,51	**102,89**
3	Rasio Kas (Cash Ratio)	183	35	112	61,03	8,24	**79,85**
4	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,0050	0,0073	0,0065	0,0146	0,0974	**0,0262**
5	Rasio Hutang terhadap Modal	0.0004	0,0002	0,0005	0,1056	0,0935	**0,04995**

Sumber : data diolah

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rataan rasio lancar (*current ratio*) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2009 – 2013 sangat baik, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rataan rasio lancar (*current ratio*) pada tahun 2013 mencapai 114,13% yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Bangka adalah 114,13 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo.

Rataan rasio cepat (*quick ratio*) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2009-2013 mencapai 102,89%. Hal ini

mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dalam waktu dekat.

Rataan rasio kas (*cash ratio*) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2009-2013 mencapai 79,85%. Dengan tingkat rasio yang lebih dari 75% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan kas yang disimpan di bank.

Rasio salvobilitas, menggambarkan kemampuan aset pemda dalam menutupi seluruh utang pemda baik jangka pendek maupun jangka panjang. yaitu perbandingan total utang dengan total aset. Tabel diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2009-2013 rasio total kewajiban terhadap total aset sebesar 0,03% artinya aset pemda sangat jauh lebih dari cukup untuk menutupi seluruh utang pemda, dan rataan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditutupi oleh modal pemerintah Kabupaten Bangka.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Sebagaimana amanah RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2013 – 2018, belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemeritah dan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar dan pelayanan umum lainnya, serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi unggulan daerah (*core competensy*).

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2009 – 2013 diproritaskan untuk membiayai program prioritas sebagaimana termuat dalam visi dan misi Bupati terpilih. Kebijakan tersebut antara lain :

a) Untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b) Untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

c) Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 realisasi belanja sebesar 811 milyar rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya mencapai 540 milyar rupiah. Realisasi belanja daerah tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 3.10 Proporsi Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2013 (ribuan rupiah)

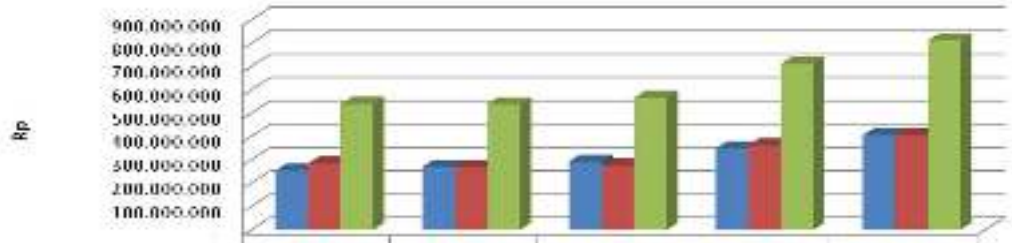

	2009	2010	2011	2012	2013
Belanja Tidak Langsung	254.835.678	269.760.179	292.084.052	349.876.211	405.689.997
Belanja Langsung	285.218.483	268.392.871	275.189.270	362.695.239	405.806.052
Total Belanja	540.054.161	538.153.050	567.273.322	712.571.450	811.496.049

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2013 mencapai 86,07%. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya terealisasi 89,72%. Realisasi belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan, pendidikan, industri kecil dan menengah (UKM), swadaya masyarakat, pertanian, keagamaan, kepemudaan, olahraga, kewanitaan, organisasi lainnya dan partai politik.

3.2.2.2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Realisasi belanja langsung pada tahun 2013 mencapai 88,47%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yang justru mencapai 84,46%. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi dan

efektifnya penggunaan belanja sehingga anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan banyaknya kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran jauh dibawah target. Realisasi belanja langsung Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.11 Persentase Realisai Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2013

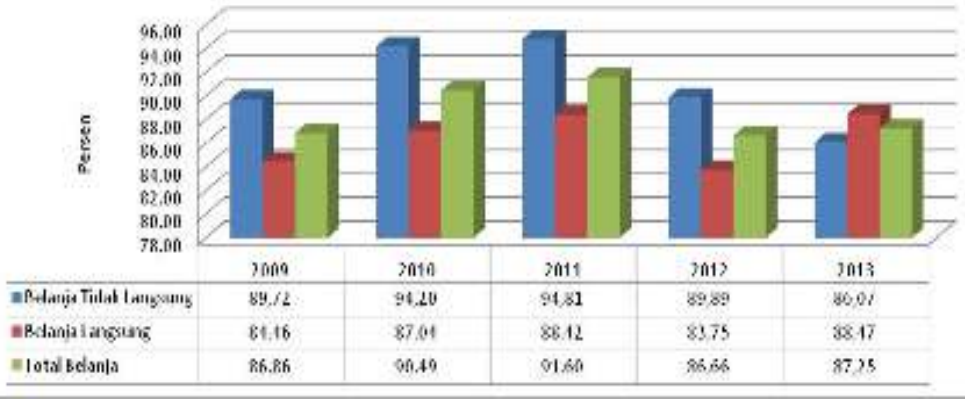

	2009	2010	2011	2012	2013
Belanja Tidak Langsung	89,72	94,20	94,81	89,89	86,07
Belanja Langsung	84,16	87,01	88,42	83,75	88,47
Total Belanja	86,86	90,49	91,60	86,66	87,25

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013

Gambaran lebih rinci tentang anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013

URAIAN		REALISASI				
		TA.2009	TA.2010	TA.2011	TA.2012	2013
BELANJA DAERAH						
Belanja Tidak Langsung	**Rencana**	**284.044.020.453**	**286.375.761.556**	**308.081.038.330**	**389.217.535.553**	**471.375.209.103**
	Realisasi	**254.835.678.222**	**259.450.515.615**	**292.084.052.009**	**349.876.211.248**	**405.689.997.345**
	%	**89,72**	**90,60**	**94,81**	**89,89**	**86,07**
Belanja Pegawai	Rencana	235.630.671.953	242.016.079.956	269.607.374.330	334.345.776.053	386.372.056.528
	Realisasi	208.719.669.579	227.601.655.901	255.063.530.630	303.921.067.086	340.406.851.357
	%	88,58	94,04	94,61	90,90	88,10
Belanja Subsidi	Rencana	5.500.000.000	5.280.000.000	5.400.000.000	2.850.100.000	150.000.000
	Realisasi	5.500.000.000	5.280.000.000	5.205.723.750	100.000.000	100.000.000
	%	100,00	100,0	96,40	3,51	66,67
Belanja Hibah	Rencana	11.636.187.000	10.362.110.000	4.950.883.000	14.267.040.500	2.597.257.425
	Realisasi	11.235.555.630	10.319.983.000	4.549.313.000	12.055.430.950	28.231.805.703
	%	96,56	99,59	91,89	84,50	1086,99
Belanja Bantuan Sosial	Rencana	4.211.611.000	1.900.000.000	1.078.590.000	772.500.000	45.169.351.150
	Realisasi	4.057.312.500	1.847.940.000	972.380.000	687.350.000	2.566.400.000
	%	96,34	97,26	90,15	88,98	5,68
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rencana	1.620.055.500	2.590.303.600	2.174.400.000	3.104.063.500	3.381.924.000
	Realisasi	1.605.013.500	1.588.296.707	2.170.543.629	3.050.084.519	2.558.500.000
	%	99,07	61,32	99,82	98,26	75,65
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rencana	22.945.495.000	23.427.268.000	24.869.791.000	32.063.122.000	31.079.620.000
	Realisasi	22.789.245.000	22.695.310.593	24.122.561.000	29.002.717.193	30.479.620.000
	%	99,32	96,88	97,00	90,46	98,07

URAIAN		REALISASI				
		TA.2009	TA.2010	TA.2011	TA.2012	2013
BELANJA DAERAH						
Belanja Tidak Terduga	Rencana	2.500.000.000	800.000.000	1.809.947.100	1.814.933.500	2.625.000.000
	Realisasi	928.881.784	426.992.431	722.950.150	1.059.561.500	1.346.820.285
	%	37,16	53,37	39,94	58,38	51,31
Belanja Langsung	**Rencana**	**337.687.264.200**	**308.351.672.500**	**311.221.379.301**	**433.090.666.024**	**458.703.739.825**
	Realisasi	**285.218.483.225**	**268.392.870.801**	**275.189.269.647**	**362.695.239.205**	**405.806.051.488**
	%	**84,46**	**87,04**	**88,42**	**83,75**	**88,47**
Belanja Pegawai	Rencana	49.200.406.800	49.222.139.400	62.133.828.235	75.044.153.000	79.958.078.050
	Realisasi	42.094.116.947	42.985.662.635	57.992.473.120	67.385.940.248	73.515.991.261
	%	85,56	87,33	93,33	89,80	91,94
Belanja Barang dan Jasa	Rencana	111.721.756.725	142.997.390.400	153.565.580.066	173.893.031.008	195.958.710.425
	Realisasi	94.600.793.528	128.629.772.580	137.438.403.563	140.047.254.926	170.088.934.092
	%	84,68	89,95	89,50	80,54	86,80
Belanja Modal	Rencana	176.765.100.675	116.132.142.700	95.521.971.000	184.153.482.016	182.786.951.350
	Realisasi	148.523.572.750	96.777.435.586	79.758.392.964	155.262.044.031	162.201.126.135
	%	84,02	83,33	83,50	84,31	88,74
Jumlah Belanja	**Rencana**	**621.731.284.653**	**594.727.434.056**	**619.302.417.631**	**822.308.201.577**	**930.078.948.928**
	Realisasi	**540.054.161.447**	**527.843.386.416**	**567.273.321.656**	**712.571.450.453**	**811.496.048.833**
	%	**86,86**	**88,75**	**91,60**	**86,66**	**87,25**
Surplus / (Defisit)	**Rencana**	**(140.218.198.575)**	**(80.741.701.877)**	**(6.228.342.301)**	**(95.635.677.467)**	**(93.893.441.328)**
	Realisasi	**(56.986.477.198)**	**(71.717.424.915)**	**91.406.186.266**	**14.588.138.172**	**(815.175.062**
	%	**40,64**	**88,82**	**(1.468)**	**(15,25(**	**0,87**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2013

3.2.3. Analisa Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah kurun waktu tahun 2009 – 2013 dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2011 dan 2012 terjadi surplus anggaran, yaitu realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah sebesar 91,4 milyar rupiah pada tahun 2011 dan 14,6 milyar rupiah pada tahun 2012. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa selama periode tersebut seluruh belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya.

Namun untuk mendapatkan gambaran surplus/defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan pengeluaran daerah seperti penyertaan modal, sehingga angka suplus/defisit anggaran tersebut harus dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi keuangan pemerintah Kabupaten Bangka mengalami surplus rill sebesar 88,4 milyar rupiah pada tahun 2011 dan 12,6 milyar rupiah pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2009, 2010 dan 2013 terjadi defisit riil sebesar 63,8 milyar rupiah, 73 milyar rupiah dan 15 milyar rupiah.

Tabel 3.7
Surplus/(Defisit) Rill Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka
Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	481.223.240	466.435.625	659.980.393	732.169.289	810.680.874
2	Dikurangi Realisasi Belanja Daerah	538.209.717	538.153.049	568.545.521	717.581.151	811.496.049
A1	**Surplus/(Defisit) Anggaran**	**(56.986.477)**	**(71.717.425)**	**91.434.872**	**14.588.138**	**(815.175)**
3	Dikurangi Realiasi Pengeluaran	5.252.398	1.322.500	3.000.000	2.000.000	14.175.000

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
	Pembiayaan Daerah					
A2	**Surplus/(Defisit) Rill**	**(63.810.238)**	**(73.039.925)**	**88.434.872**	**12.588.138**	**(14.990.175)**

Sumber : data diolah

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka selama ini cukup kuat untuk membiayai realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Defisit riil hanya terjadi pada tahun 2009 dan 2010 dalam jumlah yang cukup besar yaitu sebesar 63,8 milyar rupiah atau 11,82% dari total realisasi belanja sebesar 540 milyar rupiah pada tahun 2009 dan 73 milyar rupiah atau sebesar 13,57% dari total realisasi belanja daerah sebesar 538 milyar rupiah.

Defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama harus ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pinjaman daerah, bila realisasi penerimaan pembiayaan daerah melebihi defisit riil anggaran, maka akan memunculkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Realisasi penutupan defisit riil pemerintah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2009 – 2013 dapat digambarkan komposisinya pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	144.550.739	79.765.427	8.118.395	97.575.678	110.334.341
2	Pencairan Dana Cadangan					

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	309.838	2.202.840	1.022.410	251.026	126.442
A	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	144.860.577	81.968.267	9.140.806	97.826.703	110.460.783
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	80.741.702	8.928.342.	97.575.678	110.414.841	95.470.608

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas terlihat penutupan defisit riil anggaran tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 80,7 milyar rupiah atau 14,95% dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2009, tahun anggaran 2010 sebesar 8,9 milyar rupiah atau 1,66% dari realiasi belanja daerahnya, tahun anggaran 2011 sebesar 97,6 milyar rupiah atau 17,16% dari total realisasi belanja daerahnya, tahun anggaran 2012 sebesar 110 milyar rupiah atau 15,39% dari total realisasi belanja daerahnya dan tahun anggaran 2013 sebesar 95,5 milyar rupiah atau 11,76% dari total realisasi belanja daerahnya.

Besarnya SILPA tahun anggaran sebelumnya dan relatif kecilnya realisasi defisit riil anggaran atau bahkan terjadinya surplus riil anggaran, pada akhirnya menyebabkan terjadinya realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan yang cukup besar dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 sebesar 97,6 milyar rupiah atau 17,59%

dari total belanja daerah, pada tahun 2012 sebesar 110 milyar rupiah atau 19,91% dari total belanja daerah dan pada tahun 2013 sebesar 95,5 milyar rupiah atau 10,26% dari total belanja daerah. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diatas menjadi sumber dana yang sangat potensial untuk membiayai belanja dan menutup defisit anggaran daerah tahun berikutnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut apabila dianalisis lebih mendalam berasal dari terjadinya pelampauan realisasi penerimaan daerah dari anggaran penerimaan dana perimbangan dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Disamping itu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga berasal dari terjadinya realisasi belanja daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan pada tahun yang bersangkutan. Dari tabel berikut, dapat dijelaskan secara detail terjadinya penyebab terjadinya SILPA pada tahun 2010 sampai dengan 2013.

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2013 (ribuan rupiah)

No	Uraian	2010		2011		2012		2013	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	79.765.427	100,00	8.118.395	100,00	97.575.677	100,00	110.334.341	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	35.370.415	44,34	32.896.963	405,22	56.062.844	57,64	62.977.749	57,08
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	371.499.755	465,74	532.772.229	6562,53	579.442.590	593,84	607.081.542	550,22
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			6.533.200	80,47	4.508.416	4,62	3.407.300	3,09
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	54.840.420	68,75	52.361.217	644,97	101.612.667	104,14	118.582.900	107,48
6	Pelampauan	80.645.767	101,10	6.140.806	75,64	95.826.703	98,21	96.285.783	82,27

No	Uraian	2010		2011		2012		2013	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	Pembiayaan Netto								
7	Anggaran SILPA Tahun Berjalan	8.928.342	11,19	97.575.677	1201,91	110.414.841	113,16	95.470.608	86,53

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa sumber terjadinya SILPA yang paling besar adalah dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya seperti tidak selesai atau tidak terlaksananya kegiatan yang direncanakan, yang pada tahun 2010 mencapai 54,8 milyar rupiah atau 68,75%, pada tahun 2011 mencapai 52,4 milyar rupiah atau 644,97%, pada tahun 2012 mencapai 101,6 milyar rupiah atau 104,14% dari jumlah SILPA serta pada tahun 2013 mencapai 118,6 milyar rupiah atau 107,48% dari jumlah SILPA. Dana tersebut dapat menggambarkan semakin meningkatnya proporsi pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah sebagai sumber terjadinya SILPA.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun ke depan tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.

Penyusunan proyeksi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun kedepan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang diperoleh berdasarkan analisa data historis keuangan daerah

beberapa tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi kedepan, prediksi belanja-belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun kedepan. Disamping itu, perlu juga dilakukan perhitungan mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan selama lima tahun kedepan. Secara detail, kapasitas riil kemampuan daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka (ribuan rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pendapatan	955.106.031	1.040.168.007	1.163.782.108	1.248.967.609	1.358.235.264
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	95.470.608	116.261.067	127.816.011	118.433.361	103.175.829
	Total Penerimaan	1.050.576.639	1.156.429.074	1.291.598.119	1.367.400.970	1.461.411.093
	Dikurangi :					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	336.054.049	344.608.170	356.437.329	367.048.76	377.640.796
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	**714.522.590**	**811.820.904**	**935.160.791**	**1.000.351.994**	**1.083.770.297**

Sumber : data diolah

Tabel diatas secara nyata menunjukkan bahwa kapasitas riil Kabupaten Bangka selama periode lima tahun kedepan diperkirakan terus mengalami peningkatan. Jika di tahun 2014 kapasitas riil keuangan daerah hanya mencapai 714,5 milyar rupiah, kemudian kembali meningkat hingga mencapai 811,8 milyar rupiah, maka pada tahun 2017 sampai 2018 kapasitas riil keuangan daerah diharapkan tembus pada level 1,0 sampai dengan 1,1 triliun rupiah. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya indikator-indikator pendapatan seperti pendapatan asli daerah maupun besaran dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Bangka. Faktanya, semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar signifikansi pembangunan daerah, semakin lancar

pembangunan maka semakin maju perkembangan daerah, disamping itu, tentunya juga diiringi dengan membaiknya indikator-indikator pembangunan lainnya seperti produk domestik regional bruto, pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, semakin meratanya distribusi pendapatan hingga tingkat ketimpangan antar daerah yang semakin menurun.

Untuk membiayai pembangunan daerah lima tahun kedepan, setelah besaran kapasitas riil keuangan daerah diukur, maka perlu dilakukan rencana terkait penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut, terutama berkenaan dengan belanja program-program unggulan (*core programs*) yang berkorelasi lansung dengan visi dan misi daerah yakni "**Bangka Bermartabat**", besaran belanja langsung terkait program prioritas di tingkat SKPD, serta besaran belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial maupun belanja lainnya. Secara detail, rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka (ribuan rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	**Kapasitas Riil Kemampuan Daerah**	**955.106.031**	**1.040.168.007**	**1.163.782.108**	**1.248.967.609**	**1.358.235.264**
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	531.069.649	589.077.232	689.474.402	728.661.148	769.693.105
II.b	Pembentukan Dana Cadangan					
	Dikurangi :					
II.c	Belanja Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	38.644.481	36.165.276	38.057.193	39.886.432	41.807.133
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	35.711				
II	**Total Rencana**	**492.425.132**	**552.911.955**	**651.417.209**	**688.774.716**	**727.885.972**

No	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pengeluaran Prioritas I					
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I	222.097.458	258.908.948	283.743.582	311.577.278	355.884.325
III.a	**Belanja Tidak Langsung**	**511.071.279**	**580.607.418**	**613.123.718**	**651.739.822**	**686.217.989**
	Dikurangi :					
III.b	**Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**	**288.973.821**	**321.698.470**	**329.380.135**	**340.162.544**	**330.333.664**
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II	222.097.458	258.908.948	283.743.582	311.577.278	355.884.325
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : data diolah

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014, kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bangka direncanakan untuk membiayai program unggulan (*dedicated*) kepala daerah terpilih sesuai dengan arah kebijakan nasional sebesar 492 milyar rupiah, kemudian mengalami peningkatan hingga 12,28 persen, yakni hanya mencapai 552 milyar rupiah pada tahun 2015. Trend tersebut diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,38 persen dengan besaran hingga mencapai 728 milyar rupiah. Kondisi diatas tidak jauh berbeda dengan besaran plafon anggaran yang akan direncanakan untuk membiayai program prioritas di tingkat SPKD (prioritas II). Jika pada tahun 2014, besaran rencana belanja prioritas II sebesar 222 milyar rupiah, maka di tahun berikutnya mencapai 258 milyar rupiah, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya dengan interval besaran antara 284 milyar rupiah hingga 356 milyar rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 12,55 persen. Dari total rencana pengeluaran prioritas I dan prioritas II maka surplus anggaran riil selama kurun waktu 2014 – 2018 adalah sebesar 0 rupiah.

Tabel 3.12
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (ribuan rupiah)

No	Jenis Data	Alokasi									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	Prioritas I	26,74	278.635.898	29,93	350.088.425	29,58	385.295.783	29,64	409.137.983	29,20	425.068.062
2	Prioritas II	24,22	252.433.751	20,43	238.988.807	23,35	304.178.618	23,15	319.523.165	23,67	344.625.042
3	Prioritas III	49,04	511.071.279	49,64	580.607.418	47,07	613.123.718	47,21	651.739.822	47,13	686.217.989
	Total	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	

Sumber : data diolah

Tabel 3.12 menunjukkan alokasi kapasitas riil keuangan daerah yang akan membiayai belanja langsung program-program yang masuk ke dalam prioritas I dan prioritas II serta prioritas III yang akan digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung. Disamping itu, tabel tersebut menggambarkan bahwa alokasi belanja tidak langsung secara signifikan terus semakin berkurang sedangkan belanja diatasnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa, kedepan, pemerintah Kabupaten Bangka *concern* terhadap frekuensi pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata proprosi belanja 51,98% dibandingkan dengan belanja pegawai yang hanya 48,02% saja.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi sumber pendapatan daerah untuk lima tahun kedepan dari tahun anggaran 2014 seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 3.12 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Bangka Tahun 2014 - 2018 (ribuan rupiah)

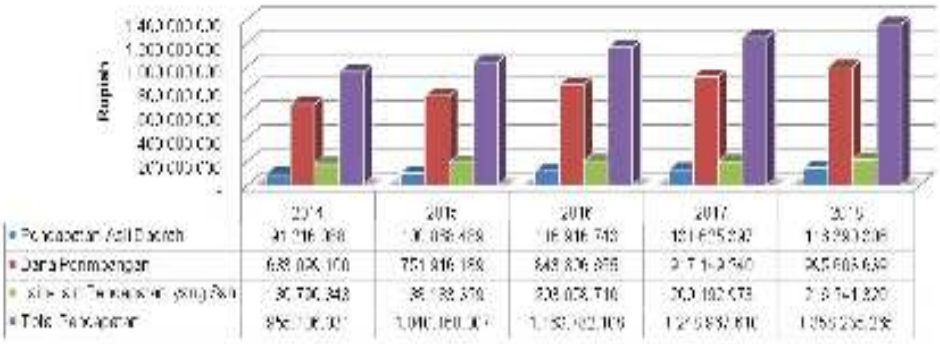

Sumber : data diolah

Grafik diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2018, ketergantungan keuangan Kabupaten Bangka pada dana perimbangan masih cukup tinggi yaitu sekitar 71,52% pada tahun 2014 dan diharapkan perannya akan semakin bertambah hingga mencapai 73,30% pada tahun 2018, sementara PAD ditargetkan mampu meningkat rata-rata 10,11% per tahun, yang pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 9,55% dan pada akhir tahun 2018 diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 10,78%.

Grafik 3.13 Proyeksi Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 (%)

Sumber : data diolah

Pada tahun 2014 terjadi peningkatan proporsi PAD secara signifikan, dan disisi lainnya, terjadi peningkatan proyeksi pendapatan dari dana perimbangan, hal tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan

perundangan, yaitu dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan pengelolaan pendapatan PPHTB dan PBB kepada daerah, sehingga masuk dalam PAD yang semula merupakan kelompok pendapatan dari dana perimbangan pajak. Selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan 2018 peningkatan PAD diproyeksikan akan tumbuh sebesar 15,89% pertahun, dana perimbangan sebesar 10,48% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 6,28%, proyeksi pertumbuhan pendapatan tersebut diperhitungkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi makro Kabupaten Bangka.

Dengan mendasarkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Bangka empat periode sebelumnya (6,68%), maka proyeksi pertumbuhan PAD pada pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.14 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 (ribuan rupiah)

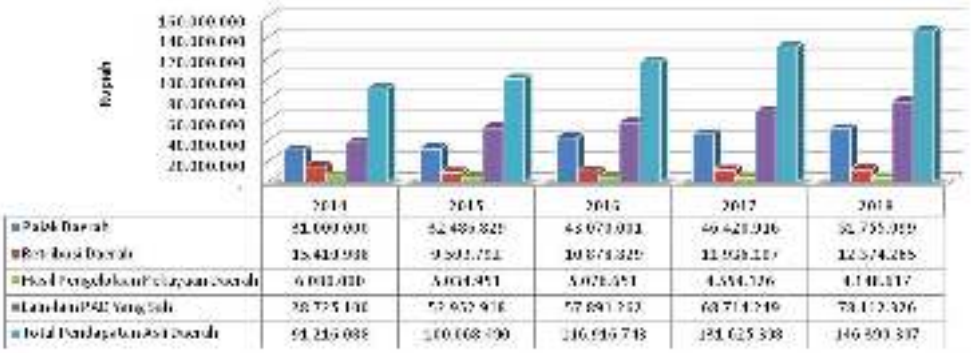

Sumber : data diolah

Untuk peningkatan PAD seperti yang diproyeksikan diatas, masih banyak yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang

ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya kongkret bagi peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang menurut Undang-Undang pajak yang baru yang akan dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis pemerintah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga mempertimbangka proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Hingga tahun 2013, komposisi belanja daerah Kabupaten Bangka terdiri dari pos belanja langsung (50,68%) dan pos belanja tidak langsung (49,32%). Untuk lima tahun kedepan, belanja daerah Kabupaten Bangka diproyeksikan sebagai berikut :

Grafik 3.15 Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 (ribuan rupiah)

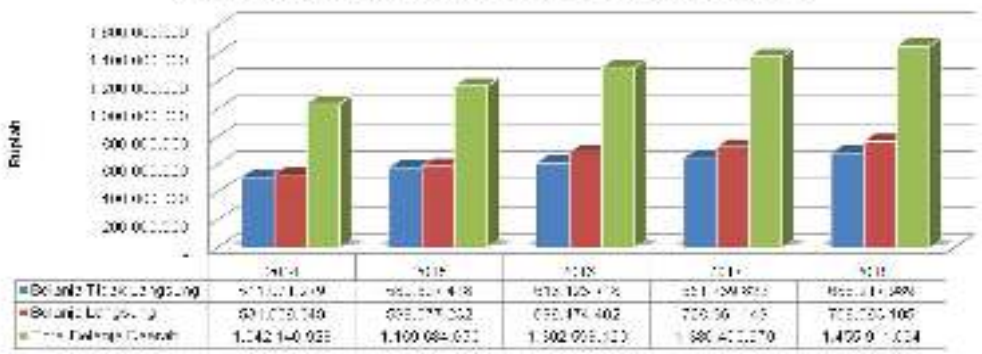

Sumber : data diolah

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan akan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung yang merupakan belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Bangka, proyeksi komposisi belanja langsung rata-rata adalah sebesar 51,98% dari total belanja daerah, sedangkan belanja tidak langsung berisi belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial rata-rata adalah sebesar 48,02% dari total belanja daerah.

Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 36,56% yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja langsung direncanakan sebesar 44,23%, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung adalah sebesar 29,10%.

Belanja tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang rata-rata mencapai 82,90% dari belanja tidak langsung atau 48,02% dari total belanja daerah. Belanja pegawai ini merupakan belanja untuk pembayaran gaji/uang representasi dan tunjangan seluruh pegawai dan anggota DPRD Kabupaten Bangka dan diproyeksikan tumbuh sebesar 8,58% setiap tahunnya.

Tabel 3.13
Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangka
Tahun 2014 – 2018 (ribuan rupiah)

No	Belanja Tidak Langsung	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Pegawai	428.860.026	463.500.282	505.200.137	543.764.250	582.876.699
2	Belanja Subsidi	3.150.000	3.150.000	3.500.000	5.000.000	6.005.000
3	Belanja Hibah	37.583.064	30.306.520	20.044.737	12.613.321	4.348.283
4	Belanja Bantuan Sosial	2.252.750	2.172.750	2.776.250	2.563.996	2.609.694
5	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.851.950	4.891.098	4.480.828	5.235.415	5.669.001
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31.973.489	74.586.768	75.121.766	80.875.340	83.349.312
7	Belanja Tidak Terduga	3.400.000	2.000.000	2.000.000	1.687.500	1.360.000

No	Belanja Tidak Langsung	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
8	Total Belanja Tidak Langsung	511.071.279	580.607.418	613.123.718	651.739.822	686.217.989

Sumber : data diolah

Belanja Hibah akan meningkat pada tahun 2018 sejalan dengan rencana adanya Pemilukada pada tahun yang bersangkutan. Belanja bantuan sosial merupakan bantuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata adalah sebesar 1,02% dari total belanja tidak langsung sedangkan belanja tidak terduga direncanakan disediakan secara konstan untuk mengantisipasi pembiayaan bila terjadi keadaan darurat yang memerlukan biaya besar.

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.

Grafik 3.16 Proyeksi Surplus/Defisit APBD
Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 (ribuan rupiah)

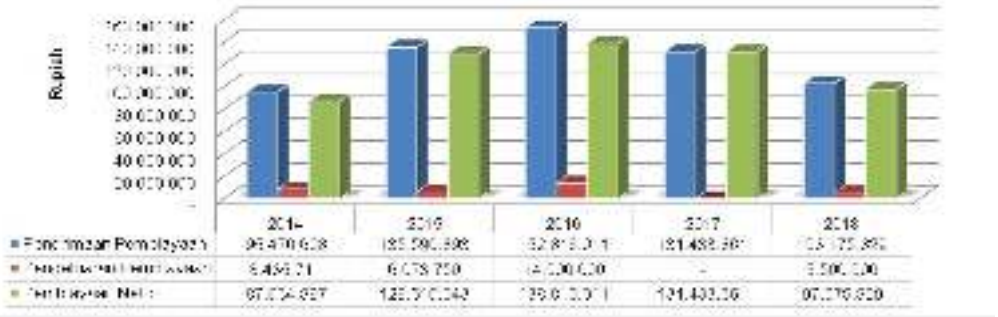

Sumber : data diolah

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan dalam pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin

meningkatkan peran pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan berupaya menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. Oleh karena itu proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah 9,42% lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang mencapai 10,22% sehingga defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan semakin berkurang.

Grafik 3.17 Proyeksi Proporsi Pendanaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018

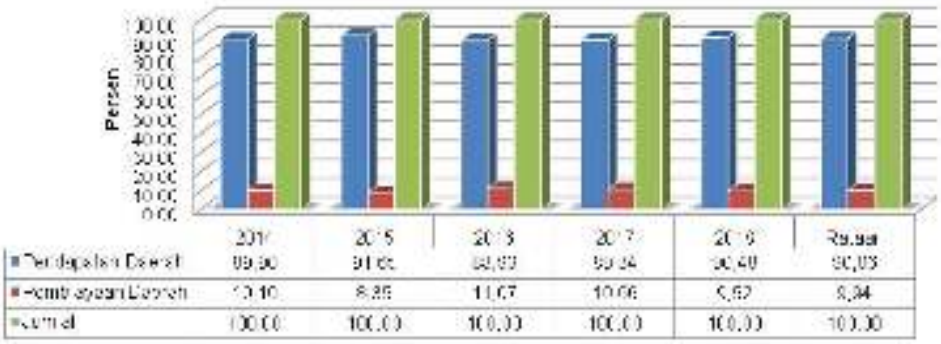

	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Pendapatan Daerah	89,90	91,65	88,93	89,94	90,48	90,09
Pembiayaan Daerah	10,10	8,35	11,07	10,06	9,52	9,94
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : data diolah

Komposisi pendanaan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa belanja daerah didanai oleh pendapatan daerah sebesar 95,66%, sedangkan sisanya sebesar 4,34% didanai dari pembiayaan daerah terutama dari SILPA, dalam lima tahun kedepan secara bertahap peran pendapatan akan lebih maksimal (90,06%) sedangkan peran pembiayaan diturunkan (9,94%) sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Secara bertahap maka pada tahun 2018 diharapkan belanja daerah 90,48% akan didanai dari pendapatan daerah.

Secara lebih rinci, proyeksi pembiayaan Kabupaten Bangka tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 – 2018 (ribuan rupiah)

No	Pembiayaan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**95.470.608**	**135.590.393**	**152.816.011**	**131.433.361**	**103.175.829**
1.1	SILPA TA. Tahun Sebelumnya	95.470.608	116.261.067	127.816.011	118.433.361	103.175.829
1.2	Pencairan Dana Cadangan					
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah					
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
1.6	Penerimaan Piutang Daerah		19.329.326	25.000.000	13.000.000	
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.435.711**	**6.073.750**	**14.000.000**	**-**	**5.000.000**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.500.000				
2.3	Pembayaran Pokok Utang	35.711				
2.4	Pembentukan Dana Bergilir					
2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	1.900.000		14.000.000		5.500.000
	Pembiayaan Netto	**87.034.897**	**6.073.750**	**138.816.011**	**131.433.361**	**97.675.829**

Sumber : data diolah

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bangka

a. Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka

Secara umum perekonomian Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2010 - 2014 masih di dominasi oleh tiga sektor utama yang menjadi *core business*. Secara rataan, ketiga *core business* dapat di klasifikasikan berdasarkan peringkat, yakni: (1) industri pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; serta (3) pertambangan dan penggalian. Kontribusi ketiga sektor ini sangat dominan dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka. Distribusi persentase atas harga berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2014, seperti yang tersaji pada tabel berikut dapat menjustifikasi fakta kondisi perekonomian tersebut.

Tabel 4.1
Perkembangan *Core Business* Perekonomian
Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014

No	Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB (%)						Real Growth (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Rataan	2010	2011	2012	2013	2014	Rataan
1.	Industri Pengolahan	26,26	25,87	24,86	24,14	23,21	22,74		-1,49	-3,90	-2,90	-3,85	-3,03
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,79	17,95	18,73	18,87	20,95	21,63		0,90	4,35	0,75	11,02	4,25
3.	Pertambangan dan Penggalian	19,00	18,51	16,66	14,89	14,13	19,47		-2,58	-9,99	-10,62	-5,10	-7,08
	Total (1+2 +3)	63,05	62,33	60,25	57,90	58,29	60,36		-3,16	-9,55	-12,77	2,07	-5,86

Tabel diatas memperlihatkan bahwa secara rataan, perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2010- 2014 sangat di dominasi oleh tiga *core sector* tersebut dengan kontribusi 60,36 persen dari total PDRB, dengan laju pertumbuhan yang bervariasi dari -12,77 persen hingga 2,07 persen. Dengan *core sector* yang sama,

kontribusi tersebut jauh lebih baik yakni sebesar 21,68 persen dibandingkan total kontribusi periode tahun 2003 - 2007 yang hanya mencapai 42,15 persen.

Core business pertama selain sebagai salah satu kontributor PDRB terbesar dalam perekonomian, sekaligus juga diproyeksi menjadi *the nextprime mover* adalah sektor pertanian yang didominasi sub sektor perkebunan dengan kontribusi sebesar 22,74% ditinjau dari sisi rataan sektor tersebut dalam lima tahun terakhir. Namun, secara agregat, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2009, kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 24,46 perse dan kontribusi tersebut merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dan pada tahun 2010 sebesar 23,06 persen, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 21,90 persen pada tahun 2011, maka kontribusi tersebut pada tahun 2013 hanya sebesar 22,34 persen. Kondisi tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 21,92 persen saja.

Sektor pertanian dapat disebut *the nextprime mover* karena sektor ini mampu (1) memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, baik ditinjau dari aspek harga berlaku, harga konstan, tanpa timah maupun dengan timah, (2) memiliki derajat kepekaan dan derajat penyebaran yang tinggi, dan (3) merupakan sektor utama yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap sektor lain. Tiga keunggulan utama sektor pertanian yang menjadikannya selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah adalah (i) *input* produksinya yang sebagian besar *domestic resource base*, (ii) memiliki tingkat *backward and forward linkage* yang tinggi dengan sektor-sektor lainnya, serta (iii) *output*-nya *yang export oriented*. Dengan ketiga unggulan ini, sektor pertanian menjadi sektor yang paling tahan terhadap krisis ekonomi dan moneter. Bahkan hingga saat ini, sebagian besar komoditi dan devisa ekspor

Kabupaten Bangka berasal dari sektor pertanian, terutama yang berasal dari komoditi perkebunan dan perikanan.

Hal lain yang menjadikan sektor pertanian sebagai *the nextprime mover* adalah laju pertumbuhannya yang selalu berada diatas 3,00 persen. Pada tahun 2013, pertumbuhan sektor pertanian diproyeksi mencapai 6,97 persen. Ditengah-tengah tekanan alih fungsi dan degradasi lahan pertanian, sektor pertanian tetap mampu bertahan bahkan terus mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Peningkatan ini disamping disebabkan keberhasilan ekstensifikasi pertanian, juga disebabkan efektifnya program intensifikasi, yang disertai dengan perbaikan inovasi dan teknologi produksi yang mendorong peningkatan produksi hasil-hasil pertanian. Selain itu, kondisi ekonomi internasional yang mulai membaik mengakibatkan meningkatnya permintan dunia yang berimplikasi pada meningkatnya harga jual beberapa komoditi utama seperti lada, karet dan kelapa sawit. Dimasa depan seharusnya kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan agroindustri. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena sektor pertanian memiliki tingkat *backward and forward linkage* yang tinggi.

Core business kedua adalah sektor yang menjadi karakteristik daerah yaitu pertambangan dan penggalian dengan produk utama seperti pertambangan timah, penggalian pasir kuarsa, penggalian tanah kaolin dan pasir bangunan lainnya. Pada periode tahun 2009 – 2013, secara rataan, konstribusi sektor ini berdasarkan harga berlaku adalah 21,63%. Secara agregat, perkembangan sektor pertambangan dan penggalian cenderung mengalami fluktuasi dengan laju kontribusi yang semakin menurun. Jika pada tahun 2009, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian justru mencapai 22,43 persen, pada tahun 2010 sebesar 23,21 persen, dan menjadi kontribusi terbesar sektor tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 21,91 persen pada tahun 2011, maka kontribusi tersebut pada tahun 2013 hanya sebesar 19,58

persen. Kondisi tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru mencapai 21,00 persen. Tingginya kontribusi sektor ini dikarenakan kondisi geologis Kabupaten Bangka yang sangat kaya dengan kandungan mineral bumi. Saat ini, disamping tambang inkonvensional yang banyak diusahakan oleh masyarakat, terdapat juga PT.Timah sebagai perusahaan besar yang mengelola penambangan.

Disamping memberikan kontribusi besar, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan *trend* yang cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2005, pertumbuhannya mencapai 6,37%, dan tahun 2010, pertumbuhannya mencapai 1,42%, maka pada tahun 2013 pertumbuhannya justru kembali mengalami penurunan hingga mencapai 0,62%. Dengan demikian, sektor ini tidak dapat terus-menerus dijadikan andalan perekonomian. Hal ini disebabkan karena tingkat produksi yang terus berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang *unrenewable* serta daya degradasi lahan dan *landscape* yang sangat tinggi.

Core business ketiga dalam perekonomian dengan rataan kontribusi sebesar 19,47% terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang *notabene* merupakan representasi dari sektor pariwisata. Selama beberapa tahun terakhir, sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu memberikan kontribusi dominan terhadap perekonomian. Secara agregat, perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2009, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 19,53 persen, dan pada tahun 2010 sebesar 18,12 persen, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 19,06 persen pada tahun 2011, maka kontribusi tersebut pada tahun 2013 sebesar 21,99, dan merupakan kontribusi terbesar sektor tersebut dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 18,67 persen saja.

Tingginya kontribusi ini disebabkan karena secara tradisional, Kabupaten Bangka merupakan daerah dengan transaksi jasa yang tinggi dan di dukung sektor pariwisata yang banyak menjadi tujuan utama wisatawan, dengan disertai berbaga potensi, baik kondisi alam maupun sosial budaya masyarakat yang mendukung serta letak strategis antar pulau sebagai tempat untuk pertemuan-pertemuan penting, olah raga dan istirahat. Konsekwensi logis tradisi pariwisata tersebut adalah cepat tumbuhnya subsektor perdagangan dan restoran serta tingginya tingkat hunian hotel-hotel dan penginapan yang ada.

Faktor lain yang menyebabkan tingginya kontribusi sector perdagangan, hotel dan restoran, adalah karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang digerakkan oleh sektor pertambangan dan pertanian. Fluktuasi yang terjadi di sektor pertambangan dan pertanian akan diikuti juga oleh fluktuasi di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun, laju pertumbuhan sektor ini di tahun 2013, tetap berada pada kisaran 5,84%. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat khususnya di sektor tersier walaupun kondisi perekonomian daerah yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, juga disebabkan rendahnya realisasi investasi yang *include* kedalam sektor ini terutama sektor pariwisata ditengah-tengah tingginya tingkat persaingan antar daerah, hal ini terlihat jelas dari sedikitnya sarana maupun prasarana infrastruktur penunjang di sektor pariwisata, baik itu hotel, restoran maupun sarana penunjang lainnya. Dengan kata lain, keberadaan infrastruktur penunjang ibarat suplemen atau vitamin bagi pertumbuhan investasi. *Finally*, dengan berlimpahnya potensi pariwisata yang dimiliki, hingga sebagian potensi tersebut secara tidak langsung telah menjadi ikon tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada masa mendatang, dengan stimulus investasi, diperkirakan kontribusi dan pertumbuhan sektor ini akan semakin

meningkat berjalan linear dengan peningkatan industry pariwisata dan penurunan kontribusi sektor-sektor yang *unrenewable resource base.*

Dari gambaran perekonomian di atas dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun kedepan ketika deposit timah sudah habis terkuras, maka *core business* dan posisi relatif sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka akan mengalami pergeseran. Potret kondisi perekonomian tanpa timah ini sekaligus juga memberikan gambaran bagaimana prospek perekonomian di masa depan. Sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran tetap akan mendominasi. Sedangkan sektor pertambangan diperkirakan tidak lagi menjadi bagian *core business* yang bisa dikembangkan, sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan kepada sektor bangunan, sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di masa depan, mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bangka sudah mulai mempersiapkan infra dan suprastruktur pengembangan sektor-sektor prospektif yang akan menjadi *core business* beberapa tahun kedepan, melalui beberapa kegiatan pembangunan dan berbagai regulasi yang dapat dijadikan akseleratornya.

b. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan kondisi empirik yang terjadi secara garis besar permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dapat dikelompokkan kedalam dua komponen yaitu permasalahan mendasar dan permasalahan ril.

Permasalahan mendasar yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut :

- Masih lemahnya karakter daerah

  Aspek penting untuk diperhitungkan dalam melakukan pembinaan karakter daerah adalah pengaruh dari kemajuan kapasitas berpikir

manusia yang pada umumnya diartikulasikan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi. Kedua jenis teknologi tersebut secara radikal telah mengakselerasi proses interaksi antar manusia dari berbagai bangsa dan memberikan dampak adanya amalgamasi berbagai kepentingan lintas bangsa (globalisasi). Dan salah satu unsur yang ada dalam proses amalgamasi kepentingan antar manusia adalah daya saing atau *competitiveness*. Pentingnya kemampuan daya saing bagi suatu daerah untuk dapat menjadi daerah yang mandiri di era globalisasi sehingga dibutuhkan suatu pembinaan dan penguatan karakter daerah.

- Belum optimalnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan
- Pembangunan ekonomi masa depan paska timah
- Rentannya sistem pembangunan dan pemerintahan dalam menghadapi perubahan global

Sedangkan permasalahan riil :

1. Permasalahan dibidang sosial budaya antara lain :
   - Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kab.Bangka (peringkat ke 3 di Babel dan 170-an di Indonesia);
   - Pertumbuhan penduduk yang tinggi (angka kelahiran dan imigrasi yang tinggi;
   - Prilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang.
2. Permasalahan infrastruktur :
   - Kondisi jalan-jembatan yang 60,60 persen dalam keadaan rusak;
   - Terbatasnya sumber daya energi listrik dan air ;
   - Tidak menyatunya fungsi perlindungan lingkungan dengan fungsi pemanfaatan sumber daya alam;
   - Konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam dengan lingkungan.
3. Permasalahan ekonomi :

- Perekonomian yang hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,96 persen, cenderung terus menurun dan lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat.

4. Permasalahan tata pemerintahan :
   - Layanan publik yang belum mengarah kepada akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa.

c. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Terdapat kesenjangan antara kemampuan daerah (SDM dan anggaran) dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan alokasi anggaran minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan dan kesehatan serta belanja modal.
- Target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan urusan wajib
- Belum ada batasan yang jelas antara kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangka

a. Isu Strategis Global dan Regional

Berkembangnya wilayah-wilayah kerjasama ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk ASEAN diperkirakan akan menumbuhkan iklim persaingan antar wilayah. Wilayah Kabupaten Bangka sebagai bagian dari NKRI sangatlah perlu untuk memperhatikan aspek strategis dari adanya kerjasama ekonomi tersebut dalam upaya menumbuhkan daya saing wilayah. Wilayah Kabupaten Bangka memiliki letak geografis yang cukup strategis karena lokasinya berdekatan dengan wilayah kerjasama regional IMS-GT (Indonesia - Malaysia – Singapore – Growth Triangle) dan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand – Growth Triangle) serta adanya keterkaitan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah kerjasama ekonomi Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle (IMS – GT) dan Indonesia – Malaysia – Thailand – Growth Triangle (IMT-GT) dan adanya kerjasama regional seperti ASEAN Free Trade (AFTA), APEC tahun 2020, NAFTA dan Word Trade Organization (WTO) telah membuka peluang bagi berbagai produk pertanian untuk memasuki pasar global.

Dengan letak geografis yang demikian strategis disamping menjadi peluang dan tantangan, tetapi juga menjadi ancaman bagi perkembangan sosial dan budaya masyarakat karena luasnya garis perbatasan laut yang terbuka yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba, dan komoditas perdagangan serta illegal fishing dan illegal minning di wilayah laut.

Isu perubahan iklim dunia, terutama dengan meningkatnya trend suhu bumi akibat eksploitasi sumber daya alam yang *over capacity*, *over limit* sehingga dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap sarana dan prasarana, meningkatnya wabah penyakit, menurunnya debit sumber daya air, dan bencana alam hingga tingginya harga pangan akibat *supply* yang semakin terbatas sedangkan *demand* terus meningkat.

b. Isu Strategis Nasional

- Ancaman terhadap wibawa negara, terutama dalam memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, lemahnya penegakan hukum, penyelesaian konflik sosial.
- Kelemahan sendi perekonomian bangsa, masih tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam dan ketergantungan dalam hal pangan, energy, keuangan dan teknologi.

- Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa mengakibatkan terdegradasinya nilai-nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang.
- Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah.
- Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

c. Isu Strategis Daerah

Beberapa isu strategis daerah antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pemenuhan hak dasar masyarakat
  - Akses terhadap pertanian dan ketahanan pangan;
  - Akses terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
  - Akses dan mutu atas layanan pendidikan yang berkualitas;
  - Akses dan mutu atas layanan kesehatan yang berkualitas;
  - Akses atas layanan infratruktur
  - Akses atas kesempatan kerja dan berusaha
  - Akses atas kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas
- Penciptaan landasan pembangunan yang kokoh
  - Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat;
  - Meningkatkan kapasitas diri dan kualitas kehidupan;
  - Memantapkan Penegasan batas wilayah (desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten)
  - Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa serta melayani.
  - Memenuhi tuntutan pemekaran wilayah (Bangka Utara, Bangka Timur dan Kota Sungailiat)

- Pembangunan Berkelanjutan
  - Melaksanakan pembangunan dengan proses yang kontinyu, yang direncanakan secara rasional, agar terjadi perubahan/ pertumbuhan, untuk modernisasi dan nation building serta menjamin kelestarian lingkungan;
- Peningkatan Daya Saing Daerah
  - Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata serta kelautan dan perikanan yang tangguh.

    Menurut Michael Porter (1999), dalam bukunya Daya Saing sebuah Bangsa (*The Competitiveness of A Nation*), pemahaman daya saing sebagai salah satu keunggulan yang dimiliki suatu entitas dibandingkan dengan entitas lainnya. Keunggulan yang dimaksud dapat berkembang ke berbagai pengertian maupun penerapan. Keunggulan tersebut dapat diartikan sebagai keunggulan ekonomi, keunggulan politik, keunggulan militer dan lain-lain.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka 2005-2025. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah :**"*Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera*"**.

Visi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita melalui peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor potensial (*leading sectors)* yang dimiliki kabupaten Bangka selama ini berupa industri dan perdagangan yang terkait dengan perkebunan seperti lada, karet dan kelapa sawit, sub sektor perikanan darat dan laut serta sub sektor pariwisata. Pada tahap awal, upaya untuk memantapkan pengembangan sektor-sektor unggulan /potensial ini akan menjadi prioritas untuk mampu mencapai tahapan menjadi daerah industri dan perdagangan yang mengolah dan memasarkan hasil-hasil perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka 2005-2025 di atas akan dilaksanakan melalui 6 misi pembangunan berikut:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung
5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*)

Berdasarkan arahan RPJPD Kabupaten Bangka, pada tahap pembangunan lima tahun kedua, prioritas pembangunan ekonomi masih ditekankan pada semakin memantapkan peran sektor unggulan daerah (*leading sectors*) yang dalam lima tahun sebelumnya sudah semakin berkembang. Pada lima tahun kedua ini, perhatian yang lebih perlu dilakukan dalam upaya melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi yang berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam kepada keunggulan kompetitif melalui perdagangan dan industri pengolahan produk yang dihasilkan dari sektor unggulan daerah dari perkebunan dan perikanan serta industri pariwisata.

Pengembangan kawasan agropolitan (termasuk pengembangan kawasan industri perikanan terpadu) yang selama ini telah dicanangkan, secara perlahan mulai direalisir pada periode ini. Kawasan agropolitan yang dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan agropolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud. Di samping itu, mengingat pengembangan kawasan agropolitan ini menggunakan potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal (*local social culture*).

Sejalan dengan hal tersebut, agar mampu memanfaatkan berbagai peluang dan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan di era global ini, upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif akan terus ditingkatkan, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Di samping itu, hal yang paling penting dan mendasar adalah upaya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM harus mulai

diprioritaskan penanganannya dalam upaya untuk mendukung paradigma pembangunan kemandirian lokal yang menempatkan faktor manusia sebagai pusat dalam proses pembangunan.

Guna mewujudkan paradigma ini, birokrasi daerah juga perlu melakukan pembenahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum, konsensus dan memiliki visi strategis harus menjadi prinsip pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam arti yang lebih luas.

Sejalan dengan arahan RPJPD tersebut maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1. Visi

Dalam periode 2014-2018, Visi Pembangunan Kabupaten Bangka adalah:

"Bangka Bermartabat",

sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Bangka secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih sejahtera dan memiliki Martabat yang tinggi.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci

Pada Visi Kabupaten Bangka 2014-2018 terdapat 2 (dua) kata kunci yaitu ***"Bangka"*** dan ***"Bermartabat"***.

Kata "Bangka" merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, dunia usaha/swasta, dan Pemerintahan Daerah.

Kata "Bermartabat"merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang mempunyai harga diri, tatanan masyarakat yang mempunyai tingkat harkat kemanusiaan yang tinggi tercermin dalam keadaan: pertanian yang tangguh; pemerintahan yang bersih dan

melayani; rakyat yang sejahtera; dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari.

5.2. Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bangka Bermartabat”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Bangka 2013 -2018” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut

1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani
3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari

Penjelasan Misi :

1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh

Sektor pertanian, yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, berperan besar dalam perekonomian masyarakat Bangka. Pada periode 1998-2004, sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Bangka dengan kontribusi 24-28 persen terhadap PDRB, dengan rataan serapan tenaga kerja 54 persen. Namun para periode 2005-sekarang, dominasi tersebut diambil alih oleh sektor pertambangan dengan rataan kontribusi 23-25 persen terhadap PDRB, sementara sektor pertanian hanya menempati peringkat kedua dengan rataan kontribusi tidak lebih dari 23 persen dan serapan tenaga berkurang hingga menjadi 33,3 persen. Jika kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka tidak mengalami perubahan radikal, dalam kurun 5 tahun ke depan, sektor pertanian akan makin tenggelam, 33-50 persen tenaga kerja terancam kehilangan perekerjaan, kemiskinan akan mencapai klimaks. Harus ada kebijakan yang revolusioner untuk menyelamatkan pertanian sekaligus menyelematkan stakeholder pertanian.

Misi “Mewujudkan Pertanian yang Tangguh” ini, mendepankan tentang bagaimana membangun kembali sektor pertanian, hingga

mampu menjadi *prime mover* dalam perekonomian masyarakat, yang akan ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih Dan Melayani

Rakyat menaruh harapan besar terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*) dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu faktor dan aktor utama yang berperan secara strategis dalam mewujudkan *Clean Govemment* dan *Good Governance* adalah birokrasi. Dalam posisi dan peranannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

4. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari**

   Mengelola SDA yang lestari dapat dilakukan melalui revitalisasi dan refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan.

   Untuk mengatasi pasca tambang, perlu dilakukan reklamasi dengan tanam tumbuh yang mudah beradaptasi dengan lahan eks tambang dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

   Ada beberapa jenis tanaman yang memenuhi persyaratan ini, yakni: jambu mete, jarak, dan buah naga. Dalam merealisasikan hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan dana reklamasi yang dapat diambil dari perusahaan tambang.

5.3. Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasahalan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan yang perlu dilakukan dalam menjalankan misi dan mencapai visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya.
2. Meningkatkan Pengamanan Ketahanan Pangan.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih.
4. Meningkatkan Pelayanan Publik Prima bagi Seluruh Masyarakat.
5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
6. Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat.
7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
8. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas.

5.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 tahun ke depan. Rumusan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Daerah.
2. Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Pangan dalam Jumlah dan Kualitas yang cukup sepanjang Waktu dengan Harga Terjangkau.
3. Meningkatnya Pemenuhan Konsumsi Pangan.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
5. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel.
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat.
7. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
8. Menurunnya Angka Kemiskinan.
9. Meningkatnya Usaha Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal.
10. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan yang Lebih Berkualitas.
11. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas.
12. Meningkatnya Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi dalam Kondisi Baik.
13. Meningkatnya Akses Air Minum yang Aman serta Sanitasi yang Layak.
14. Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup.
15. Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang.

5.3.3. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan
Kabupaten Bangka 2014-2018

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Mewujudkan Pertanian yang Tangguh	Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya	Nilai tukar petani	86,73	91,59
	Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan	Persentase wilayah ketahanan pangan	38,88	80,55
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Indeks reformasi birokrasi	na	65,00
	Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat	Zona kepatuhan standar pelayanan publik	Merah	Hijau
Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,62	4,95
		Indeks Gini	0,303	0,240
	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	70,43	70,90
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Derajat kesehatan masyarakat	70,35	70,37
	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Indeks skalogram	22,77	24,52
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	na	65,01

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Kabupaten Bangka 2014-2018

VISI: BANGKA BERMARTABAT

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Misi 1 : Mewujudkan Pertanian yang Tangguh	**Tujuan 1.1** : Meningkatkan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya	**Sasaran 1.1.1** : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Daerah	Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	5,08	6,77
			PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Rp. 1.843.751,00	Rp. 2.241.500,00
			PDRB sub sektor perikanan	Rp. 670.903,00	Rp. 823.190,00
Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	**Tujuan 2.1** : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih	**Sasaran 2.1.1** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	CC	BB
			Hasil EKPPD terhadap LPPD	ST	ST
		Sasaran 2.1.2 :	Opini Hasil	WTP	WTP

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya		
	Tujuan 2.2 : Meningkatkan Pelayanan Publik Prima bagi Seluruh Masyarakat	**Sasaran 2.2.1 :** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	64,39	67,20
Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera	**Tujuan 3.1 :** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	**Sasaran 3.1.1** : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB Perkapita (%)	4,73	5,81
			Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	53,18	54,05
		Sasaran 3.1.2 : Stabilitas Harga	Tingkat Inflasi Bahan Pangan (%)	6,18	5,16
		Sasaran 3.1.3 : Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)	5,52	5,40
		Sasaran 3.1.3 Meningkatnya	Peningkatan Kunjungan	4,48	5,50

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		Usaha Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal	Wisatawan (%)		
	Tujuan 3.2 : Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat	**Sasaran 3.2.1** : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,96	8,02
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,37	12,43
	Tujuan 3.3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	**Sasaran 3.3.1** : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas	Angka Harapan Hidup	70,52	70,56
			Persentase Balita Gizi Buruk	1,34	1,30
			Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	4,40/1000 KH	4,20/1000 KH
			Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1000 Kelahiran Hidup	0,85	0,82
	Tujuan 3.4 : Pemerataan	**Sasaran 3.4.1** : Meningkatnya	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	70,00	77,75

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
	Pembangunan Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi dalam Kondisi Baik	(%)		
			Persentase Panjang Jembatan Baik di Kabupaten Bangka (%)	88,70	92,26
			Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	96,76	100,00
			Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat (%)	62,35	82,00
		Sasaran 3.4.2 : Meningkatnya Akses Air Minum yang Aman serta Sanitasi yang Layak	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	89,60	98,85
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	86,90	98,20

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Misi 4 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari	**Tujuan 4.1** : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	**Sasaran 4.1.1** Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Penilaian Adipura (Skor)	75.00	75,50
			Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	64,99	65,01
		Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW (%)	95,92	100,00
			Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	32,38	32,38

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hubungan setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan Pertanian yang Tangguh

Misi inidilaksanakan dengan 3 (tiga) tujuan, yakni :

a. Tujuan 1.1 : Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya; terdapat 1 (satu) sasaran yang akan diwujudkan yaitu : "*Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto*"; pencapaian sasaran ini dikaitkan dalam upaya menangkap peluang isu strategis Wilayah Kabupaten Bangka yang memiliki letak geografis yang cukup strategis karena lokasinya berdekatan dengan wilayah kerjasama regional IMS-GT (*Indonesia - Malaysia – Singapore – Growth Triangle*) dan IMT-GT (*Indonesia-Malaysia-Thailand – Growth Triangle*) serta adanya keterkaitan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah kerjasama ekonomi *Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle* (IMS – GT) dan Indonesia – Malaysia – Thailand – Growth Triangle (IMT-GT) dan adanya kerjasama regional seperti *ASEAN Free Trade* (AFTA), APEC tahun 2020, NAFTA dan *Word Trade Organization* (WTO) telah membuka peluang bagi berbagai produk pertanian untuk memasuki pasar global.

b. Tujuan 1.2 : Meningkatkan Pengamanan ketahanan pangan; terdapat 1 (satu) sasaran yang ingin diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan (Ketahanan Pangan Daerah). Pencapaian sasaran ini dikaitkan dengan isu strategis pemenuhan hak dasar rakyat.

c. Tujuan 1.3 : Meningkatkan produktivitas produksi pertanian; terdapat 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai yakni : (1)

Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan serta (2) Mengembangkan Industri Pengolahan (Agroindustri) Hasil Pertanian. Kedua sasaran dimaksud terkait dengan pernyataan isu strategis Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata serta kelautan dan perikanan yang tangguh.

2. **Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani**

   Misi ini dilaksanakan dengan 2 (dua) tujuan, yakni :

   a. Tujuan 2.1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Transparan; terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yakni: (1) Meningkatnya Penataan Kelembagaan yang Tepat Ukuran dan Kewenangan yang Jelas dan tidak Tumpang Tindih; (2) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemkab Bangka; (3) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketiga sasaran tersebut adalah dalam upaya Penciptaan landasan pembangunan yang kokoh terutama terkait dengan upaya untuk "Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa serta melayani".

   b. Tujuan 2.2 : Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat; terdapat 2 (dua) rumusan sasaran yang hendak dicapai yakni : (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat; (2) Meningkatnya Pelayanan Pajak dan Pelayanan Perijinan yang Transparan dan Akuntabel. Kedua sasaran tersebut terkait dengan isu strategis Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

3. Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera.

Misi ini dilaksanakan dengan 5 (lima) tujuan, yakni :

a. Tujuan 3.1 :Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; terdapat 3 (tiga) sasaran utama yang hendak diwujudkan yakni: (1) Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat, (2) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, (3) Meningkatnya Usaha Pariwisata yang Berbasis Masyarakat. Pencapaian sasaran ini dikaitkan dengan isu strategis pemenuhan hak dasar rakyat yakni akses atas kebutuhan hidup yang terjangkau.

b. Tujuan 3.2 : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas; terdapat satu sasaran pokok yang hendak diwujudkan yakni : Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah. Pencapaian sasaran ini dikaitkan dengan isu strategis pemenuhan hak dasar rakyat terutama pemenuhan hak dasar mendapatkan akses atas pendidikan.

c. Tujuan 3.3 : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas; terdapat satu sasaran pokok yang hendak diwujudkan yakni : Peningkatan Usia Harapan Hidup. Pencapaian sasaran ini dikaitkan dengan isu strategis pemenuhan hak dasar rakyat terutama pemenuhan hak dasar mendapatkan akses atas kebutuhan kesehatan.

d. Tujuan 3.4 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya; terdapat 2 (dua) sasaran pokok yang akan dicapai yakni : (1) Pelestarian Budaya Daerah dan (2) Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Keamanan Lingkungan. Pencapaian sasaran ini dikaitkan dengan isu strategis pencipataan landasan yang kokoh bagi pembangunan terutama dalam rangka meningkatkan kapasitas diri dan kualitas kehidupan.

e. Tujuan 3.5 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur; terdapat 5 (lima) sasaran pokok yang akan dicapai, yakni : (1) Peningkatan

Proporsi Infastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik, (2) Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Transportasi yang Aman dan Lancar, (3) Pengamanan Sumber Air Baku dan Peningkatan Layanan Air Minum serta Sanitasi Dasar, (4) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga, (5) Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan dalam upaya untuk mengatasi permsalahan terkait isu strategis pembangunan berkelanjutan terutama dalam rangka melaksanakan pembangunan dengan proses yang kontinyu, yang direncanakan secara rasional, agar terjadi perubahan/pertumbuhan, untuk modernisasi dan *nation building*.

4. Misi 4 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari.
   Misi ini dilaksanakan dengan 1 (satu) tujuan, yakni : Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas. Terdapat 2 (dua) sasaran pokok yang hendak diwujudkan yakni (1) Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Meningkatnya Usaha Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan terkait isu strategis pembangunan berkelanjutan terutama dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Pembangunan Sektoral

6.1.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya yang mencakup :

a. hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih.
b. hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategis.
c. pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun.
d. dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah dan strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi Pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro yang ada di daerah. Oleh karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka.

1. Kekuatan
   a. Kabupaten Bangka merupakan akan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti timah, pasir kuarsa, granit dan kaolin yang selama ini telah berperan memberikan kontribusi penyumbang devisa negara yang terbesar, tetapi juga memiliki potensi di sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan dan sektor pariwisata.
   b. Kabupaten Bangka juga akan kaya adat istiadatnya seperti Rebo Kasan, Barongsai, dan Mandi Belimau, serta Cagar Budaya.
   c. Kabupaten Bangka merupakan daerah berkembang sekaligus menjadi pusat perdagangan, pendidikan dan industri.
   d. Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip “Sepintu Sedulang”.
2. Kelemahan
   a. Belum maksimalnya pengembangan sektor pertanian/peternakan, kehutanan/ perkebunan, perikanan dan kelautan.
   b. Masih lemahnya karakter daerah dari aspek kemajuan kapasitas berpikir manusia yang pada umumnya diartikulasikan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi.
   c. Belum optimalnya sistem pembangunan, pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan.
   d. Belum optimalnya pembangunan ekonomi setelah dan masa depan pasca timah.
   e. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata, pertanian dan kelautan sebagai alternatif baru pertumbuhan ekonomi masyarakat.
   f. Rentannya sistem pembangunan dan pemerintahan dalam menghadapi perubahan global.
3. Peluang
   a. Pengembangan Industri Hilir yang berpeluang untuk menjadi kawasan industri baru.

b. Pengembangan sektor pariwisata, sektor pertanian dan sektor kelautan sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat paska timah.

c. Alih fungsi lahan bekas tambang sebagai lahan produktif perkebunan.

4. Ancaman

a. Krisis lingkungan sebagai ancaman masa depan pembangunan daerah.

b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan adanya angka kelahiran dan migrasi.

c. Perekonomian yang cenderung terus menurun dan lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat.

Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digambarkan dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Untuk Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Internal	Eksternal
Kekuatan	**Peluang**
Sektor pertanian masih cukup luas dan menjadi basis	Minat investor pada bidang pertanian dan perkebunan
Keberadaan hutan lindung dan produksi yang cukup luas	Minat investor pada bidang kelautan dan perikanan
Keberadaan hutan lindung dan produksi yang cukup luas	Minat investor pada bidang kelautan dan perikanan
Potensi sumber daya kelautan dan perikanan	Pengembangan Industri Hilir yang berpeluang untuk menjadi kawasan industri baru

Internal	Eksternal
Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan	Pengembangan sektor pariwisata, sektor pertanian dan sektor kelautan sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat paska timah
Kabupaten Bangka merupakan akan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti timah, pasir kuarsa, granit dan kaolin yang selama ini telah berperan memberikan kontribusi penyumbang devisa negara yang terbesar, tetapi juga memiliki potensi di sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan dan sektor pariwisata	Alih fungsi lahan bekas tambang sebagai lahan produktif perkebunan
Kabupaten Bangka juga akan kaya adat istiadatnya seperti Rebo Kasan, Barongsai, Mandi Belimau dan sebagainya	
Kabupaten Bangka merupakan daerah berkembang sekaligus menjadi pusat agro industri dan industri maritim	
Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip “Sepintu Sedulang	
Kelemahan	**Ancaman**
Belum maksimalnya pengembangan sector pertanian/Peternakan,kehutanan/perkebunan, perikanan dan kelautan	Krisis lingkungan sebagai ancaman masa depan pembangunan daerah
Masih lemahnya karakter daerah dari aspek kemajuan kapasitas berpikir manusia yang pada umumnya diartikulasikan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi	Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan adanya angka kelahiran dan migrasi
Belum optimalnya sistem pembangunan, pemerintahan, serta pembangunan yang berkelanjutan	Perekonomian yang cenderung terus menurun dan lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat
Belum optimalnya pembangunan ekonomi setelah dan masa depan pasca timah	
Rentannya sistem pembangunan dan pemerintahan dalam menghadapi perubahan global	

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 :

Mewujudkan Pertanian yang Tangguh ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian,
2. Pemanfaatan Pangan yang Memenuhi Kaidah Mutu, Keragaman, Kandungan Gizi, Keamanan dan Kehalalan.

Misi 2 :

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Tingkat Ketersediaan Data yang Akurat dan Up to Date.
2. Penyelenggaraan Pendidikan untuk Aparatur Pemerintahan Daerah.
3. Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.
3. Penataan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Lebih Baik (Cepat dan Berkualitas).
4. Revitalisasi dan Refungsionalisasi Tempat Ibadah (Masjid/Kelenteng/Gereja) sebagai Pusat Pemberdayaan Umat.
5. Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat.
6. Menumbuhkembangkan Potensi dan Kreativitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
7. Pengendalian Pertambahan Penduduk.
8. Pembudayaan Tradisiliterasi Masyarakat.

Misi 3 :

Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat.

2. Kesempatan Kerja yang didukung Peningkatan Kompetensi dan Optimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja.
3. Meningkatkan Produksi, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat.
4. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Barang dan Jasa serta Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Stock Barang.
5. Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kesetaraan Gender
7. Revitalisasi Sumber Daya Pariwisata.
8. Pengembangan Seni dan Tradisi Budaya Daerah.
9. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Memenuhi Standar.
10. Penyelenggaran Kegiatan Belajar Mengajar yang Berkualitas.
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Prima.
12. Optimalisasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Drainase, Irigasi serta Permukiman.
13. Ketersediaan Akses Air Minum Melalui Sistem Jaminan Perpipaan.
14. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal di Lingkungan Permukiman yang Berbasis Masyarakat.
15. Meningkatkan Arus Penumpang dan Barang.
16. Optimalisasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Drainase, Irigasi serta Permukiman.
17. Meningkatkan Arus Penumpang dan Barang.
18. Ketersediaan Akses Air Minum Melalui Sistem Jaringan Perpipaan.
19. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal di Lingkungan Pemukiman yang Berbasis Masyarakat.

Misi 4 :

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peningkatan Kesadaran, Ketaatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan.
3. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Ruang.

6.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Arah kebijakan juga merupakan penjabaran dari strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Strategi Misi 1 akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :

1. Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Efisiensi Produksi.
2. Mengembangkan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Bantuan Subsidi dan Sarana Produksi yang Tepat Sasaran.
4. Mengembangkan Sistem Mutu, Kehalalan dan Keamanan Pangan termasuk Pengendalian Risiko Penyakit *Zoonosis*.
5. Membangun dan Memperbaiki Sarana dan Prasarana Produksi, Distribusi Pertanian.
6. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Perikanan.
7. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Perikanan.
8. Penyediaan Data Informasi Pangan Daerah.
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketahanan Pangan Daerah.

Strategi Misi 2 akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penataan Kelembagaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
3. Penetapan Standar bagi Pegawai yang akan Menerima Fasilitas Mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan Bergelar (Tugas Belajar).
4. Penelitian dan Pengembangan Data Statistik dalam Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Penyelenggaraan Pendidikan untuk Aparatur Pemerintah Daerah.
6. Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien.
7. Meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PAD.
8. Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah.
9. Mengoptimalkan Pengawasan Pembangunan Daerah.
10. Penerapan Prinsip *Performance Based Budgeting* secara Optimal.
11. Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Prima.
12. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dengan Siskambling/Roda Kampung.
13. Melakukan Perbaikan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.
14. Penyediaan Sarana Olahraga.
15. Penyelenggaraan Turnamen Olahraga.
16. Penyelenggaraan Event Kepemudaan dan Organisasi Pemuda.
17. Meningkatkan Keluarga Sejahtera.
18. Tata Kelola Kearsipan yang Tertib dan Sesuai Standar.
19. Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Sumber Daya dan Informatika yang Berintegrasi sesuai dengan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (Stakeholders).

Strategi Misi 3 akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :

1. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi.
2. Pengembangan Industri yang disertai Penguatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran.
3. Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda.
4. Perluasan Kesempatan, Lapangan Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja.
5. Peningkatan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan Daerah.
6. Mendorong Kelancaran Distribusi dan Pemasaran Barang dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat.
7. Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS.
8. Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
9. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan.
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
11. Penyelenggaraan Even yang Terintegrasi antar Objek Wisata.
12. Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha Wisata.
13. Wajib Belar Sembilan Tahun (Pendidikan Gratis sampai Tingkat SLTP).
14. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Budaya.
15. Peningkatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Budaya.
16. Penerapan Kurikulum Sesuai Ketentuan Berlaku.
17. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
18. Pengembangan Pendidikan Usia Dini yang Berkarakter.
19. Peningkatan Kompetensi Guru.
20. Pengelolaan Perpustakaan Daerah sebagai Pusat Literasi Daerah dan Pengembangan Perpustakaan Desa serta Taman Bacaan Masyarakat.
21. Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar.
22. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Irigasi dan Pemukiman.
23. Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi.

24. Pengamanan Sumber Air Baku yang Konsisten.
25. Advokasi Pembangunan Sanitasi yang Layak dan Aman bagi Masyarakat.
26. Peningkatan Sarana Transportasi dan Lalu Lintas.

Strategi Misi 4 akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :

1. Optimalisasi Pengelolaan Sampah.
2. Pengendalian Dampak Lingkungan yang Konsisten terhadap Dokumen Lingkungan.
3. Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang tepat.
4. Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan.
5. Optimalisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan arah kebijakan jangka menengah tersebut, maka pembangunan di Kabupaten Bangka untuk priode 2014-2018 adalah :

1. **Tahun pertama** diarahkan untuk melanjutkan dan menguatkan konsolidasi antarapemangku kepentingan dalam rangka memperkuat program-program yang sudah berlangsung dan melakukan berbagai pengembangan-pengembangan dan inovasi yang kontekstual. Tahun pertama ditandai dengan meningkatnya mutu produk pertanian, kualitas pelayanan pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai jenjang pelayanan, dan meningkatnya koordinasi antar stakeholder baik di tingakat pusat, prpvinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.
2. **Tahun kedua** pembangunan diarahkan pada Mengembangkan kepariwisataan, ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi produktif, meningkatnya investasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai kawasan. Tahun kedua juga diarahkan koordinasi atas pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

3. **Tahun ketiga** diarahkan pada upaya melanjutkan pengembangan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan keadilan di berbagai kawasan. Tahun ketiga juga ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan. Berbagai pembangunan pada tahun ketiga ini lebih diintensifkan. Evaluasi dalam rangka perbaikan pembangunan tahun setelahnya dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan adanya pencapaian pembangunan pada akhir periode perencanaan.
4. **Tahun keempat** diarahkan untuk mengevaluasi kinerja program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang merata di semua kawasan, kualitas layanan pemerintahan yang semakin baik, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, sinkronisasi pembangunan antara level pemerintahah daerah, memantapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dan pembangunan sudah sesuai dengan pemanfatan ruangnya.
5. **Tahun kelima** diarahkan untuk memastikan ketercapaian prinsip kemandirian, kemajuan, dan keadilan yang didasarkan pada daya saing yang optimal yang didukung oleh sinergi antar daerah dan meratanya hasil pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Tahun kelima ditandai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terciptanya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai, terberdayanya masyarakat melalui partisipasi di berbagai jenjang, terkelolanya lingkungan hidup dengan baik, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujudnya Bangka Bermartabat.

Perumusan Strategi dan Arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 secara matriks sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten BANGKA YANG BERMARTABAT (BANGKA BERMARTABAT)

MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tujuan 1.1 : Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya	**Sasaran 1.1.1:** Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Daerah	**Strategi 1.1.1.1 :** Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Dan Pemasaran Produk Pertanian	**Arah Kebijakan 1.1.1.1.1 :** Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Efisiensi Produksi
			Arah Kebijakan 1.1.1.1.2 : Mengembangkan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
			Arah Kebijakan 1.1.1.1.3 : Bantuan Subsidi dan Sarana Produksi yang Tepat Sasaran
		Strategi 1.1.1.2 : Pemanfaatan Pangan yang Memenuhi Kaidah Mutu, Keragaman, Kandungan Gizi, Keamanan dan Kehalalan	**Arah Kebijakan 1.1.1.2.1 :** Mengembangkan Sistem Mutu, Kehalalan dan Keamanan Pangan termasuk Pengendalian Resiko Penyakit Zoonosis
			Arah Kebijakan 1.1.1.2.2. : Membangun dan Merehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi, Distribusi Pertanian
			Arah Kebijakan 1.1.1.2.3 : Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Perikanan
			Arah Kebijakan 1.1.1.2.4 : Peningkatan Produktivitas dan Mutu Perikanan
Tujuan 1.2 : Meningkatkan Pengamanan Ketahanan Pangan	**Sasaran 1.2.1** : Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Pangan dalam	**Strategi 1.2.1.1 :** Tingkat Ketersediaan Data yang Up to Date	**Arah Kebijakan1. 2.1.1.1 :** Penyediaan Data Informasi Pangan
			Arah Kebijakan 1.2.1.1.2 : Penyediaan Data/Informasi Pangan Daerah

MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Jumlah yang cukup sepanjang Waktu dengan Harga yang Terjangkau		
	Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	**Strategi 1.3.1.1 :** Tingkat Ketersediaan Data yang Akurat dan Up to Date	**Arah Kebijakan 1. 3.1.1.1:** Penyediaan Data Informasi Pangan Daerah

MISI II. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih	**Sasaran 2.1.1** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	**Strategi 2.1.1.1 :** Tingkat Ketersediaan Data yang Akurat dan Up to Date	**Arah Kebijakan 2.1.1.1.1 :** Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
			Arah Kebijakan 2.1.1.1.2 : Penelitian dan Pengembangan Data Statistik dalam Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Arah Kebijakan 2.1.1.1.3 : Penataan Kelembagaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
			Arah Kebijakan 2.1.1.1.4 : Penetapan Standar bagi Pegawai yang akan Menerima Fasilitas Mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan Bergelar (Tugas Belajar)
		Strategi 2.1.2.1 : Penyelenggaraan Pendidikan untuk Aparatur Pemerintahan Daerah	**Arah Kebijakan 2.1.2.1.1 :** Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efisien dan Efektif
			Arah Kebijakan 2.1.2.1.2 : Meningkatnya Ekstensifikasi dan Instensifikasi PAD

MISI II. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Arah Kebijakan 2.1.2.1.3 : Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah
	Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	**Strategi 2.1.3.1 :** Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	**Arah Kebijakan 2.1.3.1.1 :** Penerapan Prinsip *Performance Based Budgeting* secara Optimal
Tujuan 2.2 : Meningkatkan Pelayanan Publik Prima bagi Seluruh Masyarakat	**Sasaran 2.2.1** : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	**Strategi 2.2.1.1 :** Penataan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Lebih Baik (Cepat dan Berkualitas)	**Arah Kebijakan 2.2.1.1.2 :** Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Prima
			Arah Kebijakan 2.2.1.1.2 : Revitalisasi dan Refungsionalisasi Tempat Ibadah (Masjid/Kelenteng/Gereja) sebagai Pusat Pemberdayaan Umat
			Arah Kebijakan 2.2.1.1.3. : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dengan Siskambling/Ronda Kampung
			Arah Kebijakan 2.2.1.1.4. : Melakukan Perbaikan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
		Strategi 2.2.1.2 : Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat	**Arah Kebijakan 2.2.1.2.1. :** Penyediaan Sarana Olahraga
			Arah Kebijakan 2.2.1.2.2. : Penyelenggaraan Turnamen Olahraga
		Strategi 2.2.1.3 : Menumbuhkembangkan Potensi dan Kreativitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	**Arah Kebijakan 2.2.1.3.1. :** Penyelenggaraan Event Kepemudaan dan Organisasi Pemuda

MISI II. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Strategi 2.2.1.4 : Pengendalian Pertambahan Penduduk	**Arah Kebijakan 2.2.1.4.1. :** Meningkatkan Keluarga Sejahtera
			Arah Kebijakan 2.2.1.4.2. : Tata Kelola Kearsipan yang Tertib dan sesuai Standar
		Strategi 2.2.1.6 : Penataan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Lebih Baik	**Arah Kebijakan 2.2.1.5.1. :** Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Sumber Daya dan Informatika yang Berintegrasi sesuai dengan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
			Arah Kebijakan 2.2.2.1.2 : Menyederhanakan Jalur Birokrasi Perijinan dengan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

MISI III. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	**Sasaran 3.1.1** : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Strategi 3.1.1.1 :** Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat	**Arah Kebijakan 3.1.1.1.1 :** Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi
			Arah Kebijakan 3.1.1.1.2 : Pengembangan Industri yang disertai Penguatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran
		Strategi 3.1.1.2 : Kesempatan Kerja yang didukung Peningkatan Kompetensi, dan Optimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja	**Arah Kebijakan 3.1.1.2.1 :** Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda
			Arah Kebijakan 3.1.1.2.2 : Perluasan Kesempatan, Lapangan Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja

MISI III. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Sasaran 3.1.2 : Stabilitas Harga	**Strategi 3.1.2.1 :** Meningkatnya Produksi, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	**Arah Kebijakan 3.1.2.1.1 :** Peningkatan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan Daerah
		Strategi 3.1.2.2 : Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Barang dan Jasa serta Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Stock Barang	**Arah Kebijakan 3.1.2.1.1 :** Mendorong Kelancaran Distribusi dan Pemasaran Barang dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat
	Sasaran 3.1.3 : Menurunnya Angka Kemiskinan	**Strategi 3.1.3.1 :** Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	**Arah Kebijakan 3.1.3.1.1 :** Peningkatan Pelayanan kepada PMKS
		Strategi 3.1.3.2 : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesetaraan Gender	**Arah Kebijakan 3.1.3.2.1 :** Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
			Arah Kebijakan 3.1.3.2.2 : Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan
	Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Usaha Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal	**Strategi 3.1.4.1 :** Revitalisasi Sumber Daya Pariwisata	**Arah Kebijakan 3.1.4.1.1 :** Penyelenggaraan Even yang Terintegrasi antar Objek Wisata
			Arah Kebijakan 3.1.4.1.2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
			Arah Kebijakan 3.1.4.1.3 : Penyelenggaraan Even yang Terintegrasi antar Objek Wisata
			Arah Kebijakan 3.1.4.1.4 : Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha Wisata
		Strategi 3.1.4.2 : Pengembangan Seni dan Tradisi	**Arah Kebijakan 3.1.4.2.1 :** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI III. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Budaya Daerah	Pelaku Budaya
			Arah Kebijakan 3.1.4.2.2 : Peningkatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Budaya Daerah
Tujuan 3. 2 : Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat	**Sasaran 3.2.1** : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan yang Lebih Berkualitas	**Strategi 3.2.1.1 :** Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Memenuhi Standar	**Arah Kebijakan 3.2.1.1.1 :** Wajib Belar Sembilan Tahun (Pendidikan Gratis sampai Tingkat SLTP)
			Arah Kebijakan 3.2.1.1.2 : Penerapan Kurikulum sesuai Ketentuan Berlaku
			Arah Kebijakan 3.2.1.1.3 : Pengembangan Pendidikan Usia Dini Berkarakter
			Arah Kebijakan 3.2.1.1.4 : Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
		Strategi 3.2.1.2 : Penyelenggaran Kegiatan Belajar Mengajar yang Berkualitas	**Arah Kebijakan 3.2.1.2.1 :** Peningkatan Kompetensi Guru
		Strategi 3.2.1.3 : Peningkatan Pendidikan Berkarakter	**Arah Kebijakan 3.2.1.3.1 :** Pengembangan Pendidikan Usia Dini yang Berkarakter
		Strategi 3.2.1.4 : Pembudayaan Tradisi Literasi Masyarakat	**Arah Kebijakan 3.2.1.4.1 :** Pengelolaan Perpustakaan Daerah sebagai Pusat Literasi Daerah dan Pengembangan Perpustakaan Desa serta Taman Bacaan Masyarakat
Tujuan 3.3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	**Sasaran 3.3.1** : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas	**Strategi 3.3.1.1 :** Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Prima	**Arah Kebijakan 3.3.1.1.1 :** Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar
Tujuan 3.4 : Pemerataan	**Sasaran 3.4.1:** Meningkatnya	**Strategi 3.4.1.1 :** Optimalisasi	**Arah Kebijakan 3.4.1.1.1 :** Pembangunan dan

MISI III. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Pembangunan Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi dalam Kondisi Baik	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Drainase, Irigasi dan Permukiman	Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Irigasi dan Pemukiman
		Strategi 3.4.1.2 : Meningkatnya Arus Penumpang dan Barang	**Arah Kebijakan 3.4.1.2.1 :** Peningkatan Sarana Transportasi dan Lalu lintas
	Sasaran 3.4.2 : Meningkatnya Akses Air Minum yang Aman serta Sanitasi yang Layak	**Strategi 3.4.2.1 :** Ketersediaan Akses Air Minum Melalui Sistem Jaringan Perpipaan	**Arah Kebijakan 3.4.2.1.1 :** Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi
			Arah Kebijakan 3.4.2.1.2 : Pengamanan Sumber Air Baku yang Konsisten
		Strategi 3.4.2.2 : Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal di Lingkungan Pemukiman yang Berbasis Masyarakat	**Arah Kebijakan 3.4.2.2.1 :** Advokasi Pembangunan Sanitasi yang Layak dan Aman bagi Masyarakat

MISI IV. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tujuan 4.1 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	**Sasaran 4.1.1** Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	**Strategi 4.1.1.1 :** Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	**Arah Kebijakan 4.1.1.1.1:** Optimalisasi Pengelolaan Sampah
		Strategi 4.1.1.2 : Peningkatan Kesadaran, Ketaatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan	**Arah Kebijakan 4.1.1.2.1 :** Pengendalian Dampak Lingkungan yang Konsisten terhadap Dokumen Lingkungan
			Arah Kebijakan 4.1.1.2.2 : Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Tepat

MISI IV. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Arah Kebijakan 4.1.1.2.3 : Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan
	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang	**Strategi 4.1.2.1 :** Peningkatan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat dalam Tata Ruang	**Arah Kebijakan 4.1.2.1.1 :** Optimalisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
			Arah Kebijakan 4.1.2.1.2 : Rehabiltasi dan Pemulihan Cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6.2. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam lima tahun kedepan, pembangunan di Kabupaten Bangka harus secara proprosional memperhatikan tingkat perkembangan wilayah dan karakteristik potensi perekonomian yang ada. Dengan pembangunan yang proporsional ini, diharapkan pembangunan makro dapat mencapai targetnya. Dari aspek *pro poor*, diharapkan terjadinya peningkatan beberapa indikator makro seperti PDRB, Pendapatan per Kapita dan penurunan tingkat kemiskinan. Dari aspek p*ro job*, pembangunan diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran diseluruh kecamatan, sehingga diharapkan secara agregat, tingkat pengangguran Kabupaten Bangka mengalami penurunan. Dari aspek *pro growth*, pembangunan harus disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan yang proporsional, disertai dengan tingkat inflasi yang terus terjaga.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kecamatan tahun 2015 diarahkan pada pembangunan dengan fokus pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial,pengembangan wilayah kecamatan harus memperhatikan dengan cermat RTRW Kabupaten Bangka. Dalam hirarki rencana sistem tata kota di Kabupaten Bangka, Sungailiat dan Belinyu

menjadi Pusat Kegiatan Lokal, Puding Besar menjadi Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi, sedangkan Mendo Barat, Riau Silip, Bakam, Pemali dan Merawang menjadi Pusat Pelayanan Kecamatan. Dari dimensi perekonomian, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kondisi perekonomian dalam rangka menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka adalah dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing, produktivitas dan efek multiplier yang tinggi dan *sustainable.* Perekonomian dengan produktivitas rendah dan cenderung stagnan hanya akan memberikan upah dan tingkat pengembalian modal yang rendah. Persaingan global yang semakin ketat akan mengakibatkan aktivitas perekonomian tersebut semakin lama semakin terpinggirkan. Sebaliknya perekonomian yang produktivitasnya tinggi dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan akan memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Selain itu, upah yang tinggi akan mendorong masyarakat meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya.

Dalam konteks inilah, implikasi kebijakan pengembangan perekonomian di berbagai kecamatan adalah dengan terus mendorong, mengembangkan dan meningkatkan daya saing sektor yang memiliki tingkat keunggulan komparatif, kompetitif dan *sustainable.* Untuk memenuhi persyaratan *sustainable* ini, maka sektor-sektor dan komoditi yang berbasis *unrenewable resource* (pertambangan non migas, penggalian, industri logam dasar dan barang galian non logam) meskipun secara faktual mampu memberikan kontribusi perekonomian (PDRB) yang besar, namun tidak akan dikategorikan dalam kelompok unggulan dan berdaya saing tinggi. Sektor dan komoditi yang memiliki keunggulan daya saing tersebut selanjutnya harus dikelompokkan dalam beberapa prioritas pengembangan.

Dengan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek spasial dan ekonomi tersebut, kedepan diharapkan permasalahan disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabuapaten Bangka dapat dituntaskan dan keseimbangan antara pertumbuhah ekonomi kecamatan maju dan tertinggal melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya buatan dan sumberdaya alam dapat dikedepankan. Pentingnya

pemecahanan masalah disparitas pembangunan di Kabupaten Bangka disebabkan beberapa hal berikut: (1) untuk mencapai pembangunan perekonomian yang stabil; (2) untuk medapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi; (3) dalam rangka pemanfaatan dan konservasi sumberdaya secara berkelanjutan; (4) untuk menciptakan dan promosi kesempatan kerja; (5) untuk mengurangi tekanan beban penduduk pada sektor primer terutama sektor pertambangan; (6) untuk mengurangi tekanan dan dampak negatif ”urbanisasi” dan polusi; (7) untuk menghindari konflik dan stabilitas politik daerah; dan (8) untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah.

6.2.1. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Sungailiat

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Sungailiat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Sungailiat adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Sungailiat adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland*; (4) Pendorong perkembangan wilayah;

(5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Sungailiat diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot Rumah tangga
		Industri Kertas, percetakan dan penerbitan
		Industri Barang Logam, Mesin dan Peralatan
		Listrik
		Bangunan
		Perdagangan besar dan eceran
		Restoran
		Angkutan Jalan Raya
		Angkutan Laut
		Jasa penunjang angkutan
		Pos dan Telekomunikasi
		Bank dan lembaga keuangan bukan bank
		Jasa Perusahaan
		Jasa Administrasi Pemerintahan
2	II	Perikanan
		Peternakan dan hasil-hasilnya
		Industri Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
		Air bersih
		Hotel
		Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		Jasa penunjang komunikasi
		Sewa bangunan
		Sosial kemasyarakatan
		Hiburan dan rekreasi
		Perorangan dan rumah tangga
3	III	Tanaman bahan makanan
		Tanaman perkebunan
4	IV	Kehutanan

6.2.2. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Belinyu

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Belinyu, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Belinyu adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Belinyu yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah;

1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat;
2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan;
3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Belinyu adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Belinyu diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
	I	Kehutanan
		Industri Makanan, minuman dan tembakau
		Industri Kimia, karet, plastik, m. Bumi dan batubara
		Air bersih
		Restoran
		Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		Jasa penunjang komunikasi
		Sewa bangunan
		Jasa administrasi pemerintahan
		Perorangan dan rumah tangga
2	II	Perikanan
		Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga
		Industri Barang logam, mesin dan peralatannya
		Listrik
		Bangunan
		Perdagangan besar dan eceran
		Angkutan jalan raya
		Angkutan laut
		Jasa penunjang angkutan
		Pos dan telekomunikasi
		Bank
		Lembaga keuangan bukan bank
		Jasa perusahaan
		Sosial kemasyarakatan
		Hiburan dan rekreasi
3	III	Tanaman bahan makanan
4	IV	Tanaman perkebunan
		Peternakan dan hasil-hasilnya

6.2.3. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Mendo Barat

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Mendo Barat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah

Kecamatan Mendo Barat adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

- Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;
- Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Mendo Barat adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland; (4)* Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Mendo Barat diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.5
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1.	I	Tanaman Perkebunan
		Perdagangan Besar dan Eceran
		Restoran
		Angkutan Jalan Raya
		Lembaga Keuangan Bukan Bank
		Jasa Perusahaan
		Sosial Kemasyarakatan
		Industri Makanan, Minuman dan tembakau
		Industri Kimia, Karet, Plastik, Minyak Bumi dan Batubara
		Industri Barang logam, mesin dan peralatan
2	II	Tanaman Bahan Makanan
		Peternakan dan hasil-hasilnya
		Kehutanan
		Jasa Penunjang Angkutan
		Sewa Bangunan
		Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan
		Perorangan dan Rumah Tangga
		Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot RT
		Listrik
3	III	Hotel
		Pengangkutan
		Pos dan Telekomunikasi
		Jasa Penunjang Komunikasi
		Bank
		Air bersih
4	IV	Perikanan

6.2.4. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Merawang

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Merawang, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Merawang adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur

yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Merawang adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland*; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Merawang diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.6
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Air bersih
2	II	Tanaman bahan makanan
		Industri Kimia, karet, plastik, m. Bumi dan batubara
		Hotel
		Hiburan dan rekreasi
3	III	Tanaman perkebunan
		Kehutanan
		Perikanan
		Industri Makanan, minuman dan tembakau
		Listrik
		Pos dan telekomunikasi
		Jasa penunjang komunikasi
		Administrasi pemerintahan dan pertahanan
		Perorangan dan rumah tangga
4	IV	Peternakan dan hasil-hasilnya

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
		Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga
		Industri Barang logam, mesin dan peralatannya
		Bangunan

6.2.5. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Pemali

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Pemali, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Pemali adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Pemali adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland*; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Pemali diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi

dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.7
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Hiburan dan Rekreasi
2	II	Perkebunan
3.	III	Tanaman Bahan Makanan
		Kehutanan
		Perikanan
		Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah Tangga
		Industri Barang logam, Mesin dan Peralatan
		Listrik
		Bangunan
		Angkutan Jalan Raya
		Pos dan Telekomunikasi
		Bank
		Lembaga Keuangan Bukan Bank
		Sewa Bangunan
		Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
4.	IV	Peternakan
		Industri Makanan
		Perdagangan
		Restoran
		Jasa Penunjang komunikasi
		Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan
		Sosial Kemasyarakatan

6.2.6. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Riau Silip

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Riau Silip, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Riau Silip adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Riau Silip yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah;

1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat;
2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan;
3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Riau Silip adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Riau Silip diarahkan pada pengembangan sub sektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.8
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Tanaman Perkebunan
2	II	Kehutanan
3	III	Perikanan
		Industri Kayu, bambu, rotan dan perabotan RT

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
		Bahan galian bukan logam
		Bahan logam, mesin dan peralatan
		Perdagangan besar dan eceran
		Pengangkutan
		Bank
		Lembaga keuangan bukan bank
		Sewa Bangunan
		Jasa perusahaan
		Sosial kemasyarakatan
		Perorangan dan rumah tangga
4	IV	Tanaman bahan makanan
		Peternakan dan hasil-hasilnya
		Industri Makanan, minuman dan tembakau
		Listrik
		Restoran
		Pos dan telekomunikasi
		Jasa penunjang komunikasi
		Administrasi pemerintahan dan pertahanan
		Hiburan dan rekreasi

6.2.7. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Bakam

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Bakam, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Bakam adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung

timur di Desa Kace Timur-Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

- Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;
- Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Bakam pada tahun 2015 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland; (4)* Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Bakam diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.9
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam.

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Kehutanan
2	II	Perkebunan
3	III	Tanaman Bahan Makanan
		Peternakan
		Perikanan
		Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah Tangga
		Listrik
		Bangunan
		Perdagangan
		Restoran
		Angkutan Jalan Raya
		Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
		Sewa Bangunan
		Jasa Perusahaan
		Jasa Administrasi Pemerintahan
		Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
		Barang Logam, Mesin dan Peralatan
		Pos dan Telekomunikasi
		Jasa Pos dan Telekomunikasi
		Jasa Sosial
		Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

6.2.8. Arah Pembangunan Wilayah Kecamatan Puding Besar

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Puding Besar, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Puding Besar adalah sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

- Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan

pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

- Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Puding Besar adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland; (4)* Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Puding Besar diarahkan pada pengembangan sub sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.10
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Perkebunan
		Kehutanan
		Industri Makanan, minuman dan tembakau
		Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga
		Sosial kemasyarakatan
		Perorangan dan rumah tangga
		Industri Barang logam, mesin dan peralatan
2.	II	Listrik
		Bangunan
		Perdagangan
		Restoran
		Angkutan Jalan Raya
		Pos dan Telekomunikasi
		Lembaga Keuangan Bukan Bank
		Sewa Bangunan
		Jasa Perusahaan
		Administrasi pemerintah dan Pertahanan
3	III	Tanaman Bahan Makanan
		Peternakan
		Jasa Penunjang Komunikasi
4.	IV	Perikanan
		Bank

6.3. Pembangunan Pro Growth, *Pro Poor* dan *Pro Job*

6.3.1. Kebijakan Pembangunan *Pro Growth*

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka yang berkeadilan, program-program penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu strategi penanggulan kemiskinan 5 tahun kedepan antara lain :

Arah kebijakan perekonomian daerah antara lain :

a. Meminimalisasi ketergantungan pada sektor unggulan terutama sektor pertambangan timah yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global.
b. Memprioritaskan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan secara interregional dan saling memiliki keterkaitan dalam proses pemerataan pembangunan daerah.
c. Berkaitan dalam hal investasi, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para investor baik dari dalam daerah maupun luar daerah untuk menanamkan modalnya ke dalam sektor ekonomi.
d. Mengurangi ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah.
e. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah.
f. Mencegah pemamfaatan lahan-lahan produktif untuk dialih fungsinya terutama dijadikan lahan pertambangan timah rakyat.
g. Mencegah terjadinya pelarian modal (*Capital Flight*).
h. Mewujudkan kemandirian daerah.
i. Pengembangan sector-sektor ekonomi dan komoditi yang memiliki daya dorong dan sensitivitas tinggi terhadap penciptaan output. Kenaikan permintaan akhir terhadap masing-masing sektor dan komoditi akan memiliki daya dorong tinggi terhadap penciptaan output seluruh perekonomian. Sedangkan penciptaan output masing-masing sector dan komoditi sensitif terhadap perubahan permintaan akhir terhadap seluruh sektor ekonomi Analisis Tabel I-O Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 menyebutkan bahwa sektor yang memenuhi persyaratan ini adalah; industri bahan kimia, industri logam

dasar, besi dan baja, perikanan tangkap, industri makanan, peternakan, pengadaan listrik dan gas, industri tekstil dan pakaian jadi, kontruksi dan pengadaan makanan dan minuman.

6.3.2. Kebijakan Pembangunan *Pro Poor*

Dalam rangka mendukung mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka 5 tahun kedepan yang berkeadilan, program-program penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu strategi penanggulan kemiskinan antara lain :

a. Perluasan kesempatan. Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
b. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
c. Peningkatan kapasitas. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
d. Perlindungan sosial. Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/ penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

e. Penataan kemitraan global. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan menataulang hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi di atas.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah antara lain :

a. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
b. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pemberian akses modal yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
c. Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergisitas pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan (MP3KI).
d. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial yang telah ada sehingga semua penduduk miskin dan rentan dapat berpartisipasi penuh dan menerima manfaatnya.
e. Mengoptimalkan sistem pembangunan partisipatif yang dirancang untuk menjamin partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan diberbagai tahapan proses pembangunan.
f. Memperkuat kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3KI.
g. Pengembangan sektor-sektor ekonomi dan komoditi yang memiliki daya dorong dan sensitivitas tinggi terhadap pendapatan. Kenaikan permintaan akhir terhadap masing-masing sector dan komoditi memiliki daya dorong tinggi terhadap penciptaan pendapatan seluruh perekonomian. Sedangkan penciptaan pendapatan masing-masing sektor sensitif terhadap perubahan permintaan akhir terhadap seluruh sektor ekonomi. Analisis Tabel I-O Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 menyebutkan bahwa sektor yang memenuhi persyaratan ini adalah; industri bahan kimia, administrasi pemerintahan, pertahanan

dan jaminan social wajib, jasa pendidikan, perkebunan karet, industri logam dasar, besi dan baja, jasa perorangan rumah tangga, perkebunan lada, kehutanan dan penebangan kayu, peternakan, jasa perusahaan, perkebunan kelapa sawit, industri barang dari kayu, kontruksi, jasa kesehatan, jasa penunjang pertanian, angkutan sungai danau dan penyebrangan dan agen perjalanan.

6.3.3. Pembangunan Perekonomian *Pro Job*

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan kata lain pertumbuhan ekonomi membawa perubahan struktur tenaga kerja kearah yang lebih baik (*decent work*) dan diproyeksikan terus mengalami penurunan. Untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut, strategi pembangunan yang ditempuh antara lain :

a. Meningkatkan jiwa enterpreneur masyarakat terutama lebih diprioritaskan pada tenaga kerja usia produktif;
b. Meningkatkan riset dan inovasi yang diprioritaskan kepada Usaha Kecil dan Menengah (ekonomi kreatif) sehingga meningkatkan proses produksi menjadi lebih baik;
c. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai program dan kegiatan yang dipanyungi dengan regulasi daerah yang *pro labor* dan *pro job.*

Arah kebijakan penanggulan pengangguran daerah antara lain :

a. Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya sistem dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga ketenangan bekerja dan berusaha;
b. Penerapan kebijakan pengupahan dan penerimaan-pemberhentian pekerja (*hiring-firing*) kearah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja;
c. Penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi dan memperbaiki peraturan yang dapat mempermudah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.

d. Pengembangan sektor-sektor ekonomi dan komoditi yang memiliki daya dorong dan sensitivitas tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja. Kenaikan permintaan akhir terhadap masing-masing sector dan komoditi memiliki daya dorong tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja di seluruh perekonomian. Sedangkan penciptaan lapangan kerja masing-masing sektor sensitif terhadap perubahan permintaan akhir terhadap seluruh sektor ekonomi. Analisis Tabel I-O Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 menyebutkan bahwa sektor yang memenuhi persyaratan ini adalah; perkebunan karet, lada, kehutanan dan penebangan kayu, peternakan, jasa pendidikan, perkebunan kelapa sawit, jasa perorangan rumah tangga, jasa penunjang pertanian, tanaman hortikultura, perikanan tangkap, pertanian palawija, pertanian tanaman tahunan, pertanian padi, jasa kesehatan, jasa rekreasi, penyediaan makanan, perikanan budidaya dan perhotelan.

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
1.1. Meningkatkan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya	1.1.1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	**Strategi 1.1.1.1.** Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian						
		Arah Kebijakan 1.1.1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Efisiensi Produksi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	26,793.05	30,056.30	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Kemitraan (%)	20.00	24.00	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Persentase Poktan yang Menggunakan Benih Padi Bersertifikat	10.00	13.00	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
		Arah Kebijakan 1.1.1.1.2. Mengembangkan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Teknologi Pertanian	75.00	77.00	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna (%)	15.00	17.00	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Arah Kebijakan 1.1.1.1.3. Bantuan Subsidi dan Sarana Produksi yang Tepat Sasaran	Persentase Poktan yang Menggunakan Pupuk Subsidi dan Organik	70.00	77.00	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Persentase Kelompok Tani yang menerima Sarana Prasarana Perkebunan	100.00	100.00			
			Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.65	1.73	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
			Persentase Kelompok Tani yang menerima Sarana Prasarana Pertanian	78.08	100.00			
			Persentase Gapoktan Penerima PUAP	100.00	100.00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
			Persentase Gapoktan dengan usaha agribisnis pedesaan	100.00	100.00			
		Strategi 1.1.1.2 : Pemanfaatan Pangan yang Memenuhi Kaidah Mutu, Keragaman, Kandungan Gizi, Keamanan dan Kehalalan						

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.1 : Mengembangkan Sistem Mutu, Kehalalan dan Keamanan Pangan termasuk Pengendalian Risiko Penyakit Zoonosis	Persentase Kasus Hewan Menular/Zoonosis yang ditangani	100.00	100.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Dinas Pertanian
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.2. : Membangun dan Merehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi, Distribusi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima sarana prasarana perkebunan	100.00	100.00	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Persentase Luas Tanam Pertanian	1.81	2.27	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
			Persentase Kelompok Tani yang Menanam Holtukultura	2.75	3.00			
			Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dengan Cepat dan Tepat	7.00	12.00	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
			Persentase Kelompok Tani yang Menanam Tanaman Perkebunan	2.12	2.40			
			Persentase Ternak yang Sehat	100.00	100.00	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.3 : Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Perikanan	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)	60.00	70.00	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.4 : Peningkatan Produktivitas dan Mutu Perikanan	Prosentase Penurunan Produksi Perikanan yang Menggunakan Zat Adiktif (%)	10.00	5.00	Program Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	517.79	592.70	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA								
3.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Strategi 3.1.1.1 :** Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat						

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 3.1.1.1.1 : Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi	Persentase UMKM yang dilakukan Pembinaan	4.00	6.00	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINPMP2KUMKM
			Persentase Koperasi yang dilakukan Pembinaan	86.00	88.00	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
			Persentase Kerjasama Investasi yang Dilaksanakan	8.00	10.00	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
			Persentase Promosi Investasi yang Dilaksanakan	8.00	10.00			
		Arah Kebijakan 3.1.1.1.2 : Pengembangan Industri yang disertai Penguatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Penjamin Mutu Produk IKM	68.74	70.47	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Urusan Industri	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan IKM	9.58	13.33	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah		
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	9.58	13.33			
			% Peningkatan IKM yang berbasis teknologi	68.74	70.47			
			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	8.07	8.61	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
			Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)	0.00	100.00	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		
		Strategi 3.1.1.2 : Kesempatan Kerja yang didukung peningkatan kompetensi, dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja						
		Arah Kebijakan 3.1.1.2.1. : Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0.02	0.03	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Urusan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Arah Kebijakan 3.1.1.2.2 : Perluasan Kesempatan, Lapangan Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang terampil dan Kompeten	3.12	3.17	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Urusan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Meningktnya Tenaga Kerja yang Terampil dan Kompeten	10.50	13.33			
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	5.58	15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan	4.00	6.00	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi an Usaha Kecil menengah	Dinas Penanaman Modal, P2TSP, Koperasi dan UMKM
	3.1.2 Stabilitas Harga	**Strategi 3.1.2.1.:** Meningkatkan Produksi, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat						
		Arah Kebijakan 3.1.2.1.1 : Peningkatan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Lokal (%)	54.00	58.00	Program Peningkatan Bahan Pangan	Urusan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
			Persentase Masyarakat Yang Mampu Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi (%)	39.51	44.45			
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Toko/Warung Penyedia Bahan Pangan Strategis (%)	1.00	1.50	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		
			Persentase Pasar Tradisional Yang Diawasi	70.00	90.00			
			Persentase Pasar Modern yang Diawasi	70.00	90.00			
			Persentase Desa yang Memiliki Lumbung Pangan	3.70	6.17			
			Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan yang Dimikiki Pemerintah Daerah	0.00	15.00			
		Strategi 3.1.2.2: Pengawasan, monitoring dan evluasi terhadap barang dan jasa serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang						
		Arah Kebijakan 3.1.2.2.1: Mendorong kelancaran distribusi dan pemasaran barang dalam memenuhi kebutuhan pokok	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina terhadap jumlah pasar/ruko yang ada	17.65	29.41	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinakerperindag

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		masyarakat	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina dan jumlah pasar/ruko yang ada	17.65	29.41			
			% Peningkatan Ketersediaan Barang sampai di Tingkat Pasar Kecamatan	70.83	95.83			
	3.1.3. Menurunnya Angka Kemiskinan	**Strategi 3.1.3.1 :** Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin						
		Arah Kebijakan 3.1.3.1.1: Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100.00	100.00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsospemdes
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Jaminan Sosial	100.00	100.00			
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Perlindungan Sosial	0.00	100.00			
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	97.04	98.13			
			Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	50.00	100.00	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsospemdes
			Persentase Data yang Up to Date	100.00	100.00	Program Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan	Dinsospemdes
		Strategi 3.1.3.2 : Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kesetaraan Gender						
		Arah Kebijakan 3.1.3.2.1 : Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	98.85	100.00	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan dan Masyarakat desa	Dinsospemdes
			Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	96.46	100.00	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Persentase Cakupan Kelompok Binaan PKK	100.00	100.00	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Desa		
			Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan	100.00	100.00	Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna		
		Arah Kebijakan 3.1.3.2.2 : Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Cakupan Partisipasi Masyarakat Desa	99.24	100.00	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		
			Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat	61.00	70.00	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		
			Persentase Peningkatan MBR yang memiliki Rumah	62.50	65.00	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	DINPERKPP
	3.1.4. Meningkatnya Usaha Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal	**Strategi 3.1.4.1 :** Revitalisasi Sumber Daya Pariwisata						
		Arah Kebijakan 3.1.4.1.1 : Penyelenggaraan Even yang Terintegrasi antar Objek Wisata	Persentase promosi pariwisata melalui in bound dan in take	100.00	100.00	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga
		Arah Kebijakan 3.1.4.1.2 : Peningkatasan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Persentase objek wisata yang dikelola dengan baik dan beragam	100.00	100.00	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Arah Kebijakan 3.1.4.1.3: Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha Wisata	Persentase Mitra Pariwisata yang dibina	100.00	100.00	Program Pengembangan Kemitraan		
		Strategi 3.1.4.2. : Pengembangan Seni dan Tradisi Budaya Daerah						
		Arah Kebijakan 3.1.4.2.1. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Budaya	Persentase Apresiasi Pemerintah terhadap Seniman dan Budayawan	36.36	54.55	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Arah Kebijakan 3.1.4.2.2 : Peningkatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	35.71	71.43	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
			Pagelaran dan Festival Budaya Daerah	9.09	27.27	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
			Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	25.00	50.00	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		
3.2. Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat	3.2.1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan yang Lebih Berkualitas	**Strategi 3.2.1.1 :** Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Memenuhi Standar						

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.1. : Wajib Belar 9 Tahun (Pendidikan Gratis sampai Tingkat SLTP)	Rasio Siswa SD Usia 7-12 Tahun terhadap Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	96.18	98.18	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rasio Siswa SMP Usia 13-15 Tahun terhadap Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	84.57	88.86			
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.2 : Penerapan Kurikulum Sesuai Ketentuan Berlaku	Siswa SD berprestasi akademis dan non akademis	105.28	107.40	Program Peningkatan Belajar Mengajar		
			Siswa SMP Berprestasi Akademis dan Non Akademis	39 Orang	39 Orang			
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.3. : Pengembangan Pendidikan Usia Dini yang Berkarakter	Rasio ketersediaan ruang kelas terhadap siswa PAUD	35.00	40.00	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
			Nilai rata-rata ujian sekolah siswa SD	50.00	75.00	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan		
			Nilai rata-rata ujian nasional siswa SMP	51.300	55.000			
			Persentase siswa SD yang mendapat beasiswa	106.26	107.05			
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.4. : Peningkatan	Jumlah PKBM	5 PKBM	11 PKBM	Program Pendidikan Non Formal		
			Jumlah LPK	3 LPK	6 LPK			
		Strategi 3.2.1.2 : Penyelenggaran Kegiatan Belajar Mengajar yang Berkualitas						
		Arah Kebijakan 3.2.1.2.1 : Peningkatan Kompetensi Guru	Persentase Guru SD sesuai dengan kompetensi	72.50	82.00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			Persentase Guru SMP sesuai dengan kompetensi	84.20	92.00			
		Strategi 3.2.1.3 : Pembudayaan Tradisiliterasi Masyarakat						
		Arah Kebijakan 3.2.1.3.1. : Pengelolaan Perpustakaan Daerah sebagai Pusat Literasi Daerah dan Pengembangan Perpustakaan Desa serta Taman Bacaan Masyarakat	Persentase Jenis Koleksi, Sarpras dan Layanan Perpustakaan (%)	50.00	66.67	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
			Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daerah	88.89	96.30			
			Persentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	57.33	72.00			
3.3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	3.3.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas	**Strategi 3.3.1.1 :** Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Prima						
		Arah Kebijakan 3.3.1.1.1 : Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar	Presentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular langsung	100.00	100.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit endemik/epidemik	100.00	100.00			

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit menular seksual	100.00	100.00			
			Persentase lingkungan desa/kelurahan sehat	86.00	90.00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
			Persentase balita yang dipantau berat badannya (D/S)	76.90	80.00			
			Persentase pelayaan kesehatan pada usia produktif	0.00	60.00			
			persentase pelayanan kesehatan matra dan haji	100.00	100.00			
			persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100.00	100.00			
			Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	100.00	100.00	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	0.00	80.00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		
			Persentase lingkungan desa/kelurahan sehat	19.48	58.44	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
			Persentase rumah tangga ber PHBS	80.00	100.00	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
			Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100.00	100.00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Persentase balita yang berat badannya naik (N/D)	85.10	86.00			
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0.97	1.00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
			Persentase Pelayanan kesehatan balita	92.08	100.00			
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	0.93	1.00	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
			Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan	0.95	1.00			

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 3.1.2.1.2 : Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Produsen Pangan Segar Yang Mendapatkan Yang Mendapatkan Sertifikasi Halal (%)	0.09	0.13	Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
			Persentase Penjual Yang Diberikan Pembinaan tentang Keamanan Pangan Segar (%)	0.08	0.12			
			Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	1.00	1.00			
			Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita/Tahun (%)	0.00	0.00	Program Pengembangan Pola Pangan		
			Persentase Peningkatan Konsumsi 8 Kelompok Bahan Pangan Per Kapita/Tahun (%)	0.01	0.02			
			Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (%)	0.49	0.62			
			Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengolah Pangan Lokal (%)	0.15	0.26			
			Persentase Produk Pangan Beredar yang Memiliki Sertifikat PIRT	85.00	100.00	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penurunan Barang yang Beredar yang tidak sesuai Standar	16.22	8.11	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinakerperindag
3.4. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	3.4.1. Meningkatnya Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi dalam Kondisi Baik	**Strategi 3.4.1.1. :** Optimalisasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Drainase , Irigasi serta permukiman						
		Arah Kebijakan 3.4.1.1.1. : Pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase,	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	60.00	72.50	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			Persentase Panjang Turap dalam Kondisi Baik	88.69	100.00	Program Pembangunan Turap, Talut dan Bronjong		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Irigasi dan Pemukiman	Indeks Kinerja Irigasi	43.24	45.14	Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Urusan Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap (%)	89.00	93.00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			Persentase Sistem Jaringan Drainase Jalan yang Berfungsi Baik	85.00	95.00	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
			Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota (%)	62.50	78.00	Program Pengendalian Banjir		
		Strategi 3.4.1.2. : Meningkatkan Arus Penumpang dan Barang						
		Arah Kebijakan 3.4.1.2.1. : Peningkatan Sarana Transportasi dan Lalu lintas	Persentase Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Trasportasi yang Aman	50.00	80.00	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan
			Persentase Kecukupan Kelengkapan Sarana Lalu Lintas	50.00	70.00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
			Persentase Pengoperasioan Kendaraan Bermotor yang laik jalan	50.00	75.00	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
			Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3.00	7.00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
	3.4.2. Meningkatnya Akses Air Minum yang Aman serta Sanitasi yang Layak	**Strategi 3.4.2.1. :** Ketersediaan Akses Air Minum Melalui Sistem Jaringan Perpipaan						
		Arah Kebijakan 3.4.2.1.1. : Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Infrastruktur Lingkungan yang Memadai (%)	88.00	100.00	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	DPUPRP/DINPER KPP
		Arah Kebijakan 3.4.2.1.2. : Pengamanan Sumber Air Baku yang Konsisten	Persentase Potensi Sumber Air Baku yang dimanfaatkan	33.33	75.00	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan
			Persentase Fasilitas Umum yang Memadai	12.50	37.50	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPER KPP
			Jumlah Infrastruktur Wilayah Pedesaan yang Memadai (%)	91.79	100.00	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPER KPP
			Persentase Infrastruktur Kebinamargaan dalam Kondisi Mantap	80.00	90.00	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPER KPP

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Cakupan Layanan Air Bersih (%)	70.00	75.75	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPERKPP
		Strategi 3.4.2.2. : Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal di Lingkungan Pemukiman yang Berbasis Masyarakat						
		Arah Kebijakan 3.4.2.2.1. : Advokasi Pembangunan Sanitasi yang Layak dan Aman bagi Masyarakat	Cakupan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota (%)	43.57	50.00	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPERKPP
			Persentase Rumah yang Bersanitasi	0.00	100.00			
			Persentase Pengembangan Perumahan yang Memiliki Site Plan	50.00	100.00	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	DINPERKPP
			Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Strategis Cepat Tumbuh (%)	0.00	100.00	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pekerjaan Umum	DINPERKPP
			Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan yang Mendapatkan Penanganan	0.00	40.00	Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	Pekerjaan Umum	DINPERKPP
MISI 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari								
4.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	4.1.1. Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	**Strategi 4.1.1.1. :** Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup						
		Arah Kebijakan 4.1.1.1.1. : Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	4.00	32.50	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Strategi 4.1.1.2. : Peningkatan Kesadaran, Ketaatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan						
		Arah Kebijakan 4.1.1.2.1. : Pengendalian Dampak Lingkungan yang Konsisten terhadap Dokumen Lingkungan	Indeks Pencemaran Air	0.00	50.01	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup		
			Persentase penurunan kasus lingkungan	42.80	15.00			
			Persentase Peningkatan Lokasi Pelestarian Keanekaragaman Hayati	100.00	100.00	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 4.1.1.2.2. : Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Tepat	Persentase Peingkatan Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	8.08	14.24	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam		
			Persentase Frekuensi Penyampaian Informasi Bidang Lingkungan Hidup	100.00	100.00	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
			Indeks Pencemaran Udara	0.00	90.01	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		
			Persentase Peingkatan Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	0.00	11.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	
		Arah Kebijakan 4.1.1.2.3. : Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Luas Hutan Konservasi	0.00	100.00	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		
			Persentase jumlah keanekaragaman hayati	100.00	100.00	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		
	4.1.2. Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang	**Strategi 4.1.2.1. :** Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Ruang						
		Arah Kebijakan 4.1.2.1.1. : Optimalisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang	2.00	3.00	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	DPUPRP
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW/RDTR	0.00	100.00	Program Pemanfaatan Ruang		
			Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	3 hari	3 hari			
			Pengawasan Ketaatan terhadap Rekomendasi Tata Ruang (%)	0.00	100.00	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Arah Kebijakan 4.1.2.1.2. : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Tutupan Vegetasi	52.41	52.41	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
1.1. Meningkatkan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya	1.1.1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	**Strategi 1.1.1.1.** Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian						
		Arah Kebijakan 1.1.1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Efisiensi Produksi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	26,793.05	30,056.30	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Kemitraan (%)	20.00	24.00	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Persentase Poktan yang Menggunakan Benih Padi Bersertifikat	10.00	13.00	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
		Arah Kebijakan 1.1.1.1.2. Mengembangkan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Teknologi Pertanian	75.00	77.00	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna (%)	15.00	17.00	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Arah Kebijakan 1.1.1.1.3. Bantuan Subsidi dan Sarana Produksi yang Tepat Sasaran	Persentase Poktan yang Menggunakan Pupuk Subsidi dan Organik	70.00	77.00	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Persentase Kelompok Tani yang menerima Sarana Prasarana Perkebunan	100.00	100.00			
			Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.65	1.73	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
			Persentase Kelompok Tani yang menerima Sarana Prasarana Pertanian	78.08	100.00			
			Persentase Gapoktan Penerima PUAP	100.00	100.00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
			Persentase Gapoktan dengan usaha agribisnis pedesaan	100.00	100.00			
		Strategi 1.1.1.2 : Pemanfaatan Pangan yang Memenuhi Kaidah Mutu, Keragaman, Kandungan Gizi, Keamanan dan Kehalalan						

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.1 : Mengembangkan Sistem Mutu, Kehalalan dan Keamanan Pangan termasuk Pengendalian Risiko Penyakit Zoonosis	Persentase Kasus Hewan Menular/Zoonosis yang ditangani	100.00	100.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Dinas Pertanian
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.2. : Membangun dan Merehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi, Distribusi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima sarana prasarana perkebunan	100.00	100.00	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Persentase Luas Tanam Pertanian	1.81	2.27	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
			Persentase Kelompok Tani yang Menanam Holtukultura	2.75	3.00			
			Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dengan Cepat dan Tepat	7.00	12.00	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
			Persentase Kelompok Tani yang Menanam Tanaman Perkebunan	2.12	2.40			
			Persentase Ternak yang Sehat	100.00	100.00	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.3 : Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Perikanan	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)	60.00	70.00	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
		Arah Kebijakan 1.1.1.2.4 : Peningkatan Produktivitas dan Mutu Perikanan	Prosentase Penurunan Produksi Perikanan yang Menggunakan Zat Adiktif (%)	10.00	5.00	Program Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	517.79	592.70	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA								
3.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Strategi 3.1.1.1 :** Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat						

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 3.1.1.1.1 : Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi	Persentase UMKM yang dilakukan Pembinaan	4.00	6.00	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINPMP2KUMKM
			Persentase Koperasi yang dilakukan Pembinaan	86.00	88.00	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
			Persentase Kerjasama Investasi yang Dilaksanakan	8.00	10.00	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
			Persentase Promosi Investasi yang Dilaksanakan	8.00	10.00			
		Arah Kebijakan 3.1.1.1.2 : Pengembangan Industri yang disertai Penguatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Penjamin Mutu Produk IKM	68.74	70.47	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Urusan Industri	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan IKM	9.58	13.33	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah		
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	9.58	13.33			
			% Peningkatan IKM yang berbasis teknologi	68.74	70.47			
			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	8.07	8.61	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
			Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)	0.00	100.00	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		
		Strategi 3.1.1.2 : Kesempatan Kerja yang didukung peningkatan kompetensi, dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja						
		Arah Kebijakan 3.1.1.2.1. : Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0.02	0.03	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Urusan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Arah Kebijakan 3.1.1.2.2 : Perluasan Kesempatan, Lapangan Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang terampil dan Kompeten	3.12	3.17	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Urusan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Meningktnya Tenaga Kerja yang Terampil dan Kompeten	10.50	13.33			
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	5.58	15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan	4.00	6.00	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi an Usaha Kecil menengah	Dinas Penanaman Modal, P2TSP, Koperasi dan UMKM
	3.1.2 Stabilitas Harga	**Strategi 3.1.2.1.:** Meningkatkan Produksi, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat						
		Arah Kebijakan 3.1.2.1.1 : Peningkatan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Lokal (%)	54.00	58.00	Program Peningkatan Bahan Pangan	Urusan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
			Persentase Masyarakat Yang Mampu Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi (%)	39.51	44.45			
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Toko/Warung Penyedia Bahan Pangan Strategis (%)	1.00	1.50	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		
			Persentase Pasar Tradisional Yang Diawasi	70.00	90.00			
			Persentase Pasar Modern yang Diawasi	70.00	90.00			
			Persentase Desa yang Memiliki Lumbung Pangan	3.70	6.17			
			Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan yang Dimikiki Pemerintah Daerah	0.00	15.00			
		Strategi 3.1.2.2: Pengawasan, monitoring dan evluasi terhadap barang dan jasa serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang						
		Arah Kebijakan 3.1.2.2.1: Mendorong kelancaran distribusi dan pemasaran barang dalam memenuhi kebutuhan pokok	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina terhadap jumlah pasar/ruko yang ada	17.65	29.41	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinakerperindag

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		masyarakat	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina dan jumlah pasar/ruko yang ada	17.65	29.41			
			% Peningkatan Ketersediaan Barang sampai di Tingkat Pasar Kecamatan	70.83	95.83			
	3.1.3. Menurunnya Angka Kemiskinan	**Strategi 3.1.3.1 :** Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin						
		Arah Kebijakan 3.1.3.1.1: Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100.00	100.00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsospemdes
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Jaminan Sosial	100.00	100.00			
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Perlindungan Sosial	0.00	100.00			
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	97.04	98.13			
			Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	50.00	100.00	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsospemdes
			Persentase Data yang Up to Date	100.00	100.00	Program Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan	Dinsospemdes
		Strategi 3.1.3.2 : Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kesetaraan Gender						
		Arah Kebijakan 3.1.3.2.1 : Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	98.85	100.00	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan dan Masyarakat desa	Dinsospemdes
			Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	96.46	100.00	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Persentase Cakupan Kelompok Binaan PKK	100.00	100.00	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Desa		
			Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan	100.00	100.00	Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna		
		Arah Kebijakan 3.1.3.2.2 : Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Cakupan Partisipasi Masyarakat Desa	99.24	100.00	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		
			Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat	61.00	70.00	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		
			Persentase Peningkatan MBR yang memiliki Rumah	62.50	65.00	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	DINPERKPP
	3.1.4. Meningkatnya Usaha Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal	**Strategi 3.1.4.1 :** Revitalisasi Sumber Daya Pariwisata						
		Arah Kebijakan 3.1.4.1.1 : Penyelenggaraan Even yang Terintegrasi antar Objek Wisata	Persentase promosi pariwisata melalui in bound dan in take	100.00	100.00	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga
		Arah Kebijakan 3.1.4.1.2 : Peningkatasan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Persentase objek wisata yang dikelola dengan baik dan beragam	100.00	100.00	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Arah Kebijakan 3.1.4.1.3: Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha Wisata	Persentase Mitra Pariwisata yang dibina	100.00	100.00	Program Pengembangan Kemitraan		
		Strategi 3.1.4.2. : Pengembangan Seni dan Tradisi Budaya Daerah						
		Arah Kebijakan 3.1.4.2.1. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Budaya	Persentase Apresiasi Pemerintah terhadap Seniman dan Budayawan	36.36	54.55	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Arah Kebijakan 3.1.4.2.2 : Peningkatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	35.71	71.43	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
			Pagelaran dan Festival Budaya Daerah	9.09	27.27	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
			Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	25.00	50.00	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		
3.2. Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat	3.2.1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan yang Lebih Berkualitas	**Strategi 3.2.1.1 :** Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Memenuhi Standar						

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.1. : Wajib Belar 9 Tahun (Pendidikan Gratis sampai Tingkat SLTP)	Rasio Siswa SD Usia 7-12 Tahun terhadap Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	96.18	98.18	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rasio Siswa SMP Usia 13-15 Tahun terhadap Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	84.57	88.86			
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.2 : Penerapan Kurikulum Sesuai Ketentuan Berlaku	Siswa SD berprestasi akademis dan non akademis	105.28	107.40	Program Peningkatan Belajar Mengajar		
			Siswa SMP Berprestasi Akademis dan Non Akademis	39 Orang	39 Orang			
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.3. : Pengembangan Pendidikan Usia Dini yang Berkarakter	Rasio ketersediaan ruang kelas terhadap siswa PAUD	35.00	40.00	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
			Nilai rata-rata ujian sekolah siswa SD	50.00	75.00	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan		
			Nilai rata-rata ujian nasional siswa SMP	51.300	55.000			
			Persentase siswa SD yang mendapat beasiswa	106.26	107.05			
		Arah Kebijakan 3.2.1.1.4. : Peningkatan	Jumlah PKBM	5 PKBM	11 PKBM	Program Pendidikan Non Formal		
			Jumlah LPK	3 LPK	6 LPK			
		Strategi 3.2.1.2 : Penyelenggaran Kegiatan Belajar Mengajar yang Berkualitas						
		Arah Kebijakan 3.2.1.2.1 : Peningkatan Kompetensi Guru	Persentase Guru SD sesuai dengan kompetensi	72.50	82.00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			Persentase Guru SMP sesuai dengan kompetensi	84.20	92.00			
		Strategi 3.2.1.3 : Pembudayaan Tradisiliterasi Masyarakat						
		Arah Kebijakan 3.2.1.3.1. : Pengelolaan Perpustakaan Daerah sebagai Pusat Literasi Daerah dan Pengembangan Perpustakaan Desa serta Taman Bacaan Masyarakat	Persentase Jenis Koleksi, Sarpras dan Layanan Perpustakaan (%)	50.00	66.67	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
			Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daerah	88.89	96.30			
			Persentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	57.33	72.00			
3.3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	3.3.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas	**Strategi 3.3.1.1 :** Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Prima						
		Arah Kebijakan 3.3.1.1.1 : Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar	Presentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular langsung	100.00	100.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit endemik/epidemik	100.00	100.00			

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit menular seksual	100.00	100.00			
			Persentase lingkungan desa/kelurahan sehat	86.00	90.00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
			Persentase balita yang dipantau berat badannya (D/S)	76.90	80.00			
			Persentase pelayaan kesehatan pada usia produktif	0.00	60.00			
			persentase pelayanan kesehatan matra dan haji	100.00	100.00			
			persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100.00	100.00			
			Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	100.00	100.00	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	0.00	80.00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		
			Persentase lingkungan desa/kelurahan sehat	19.48	58.44	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
			Persentase rumah tangga ber PHBS	80.00	100.00	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
			Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100.00	100.00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Persentase balita yang berat badannya naik (N/D)	85.10	86.00			
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0.97	1.00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
			Persentase Pelayanan kesehatan balita	92.08	100.00			
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	0.93	1.00	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
			Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan	0.95	1.00			

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 3.1.2.1.2 : Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Produsen Pangan Segar Yang Mendapatkan Yang Mendapatkan Sertifikasi Halal (%)	0.09	0.13	Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
			Persentase Penjual Yang Diberikan Pembinaan tentang Keamanan Pangan Segar (%)	0.08	0.12			
			Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	1.00	1.00			
			Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita/Tahun (%)	0.00	0.00	Program Pengembangan Pola Pangan		
			Persentase Peningkatan Konsumsi 8 Kelompok Bahan Pangan Per Kapita/Tahun (%)	0.01	0.02			
			Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (%)	0.49	0.62			
			Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengolah Pangan Lokal (%)	0.15	0.26			
			Persentase Produk Pangan Beredar yang Memiliki Sertifikat PIRT	85.00	100.00	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penurunan Barang yang Beredar yang tidak sesuai Standar	16.22	8.11	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinakerperindag
3.4. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	3.4.1. Meningkatnya Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi dalam Kondisi Baik	**Strategi 3.4.1.1. :** Optimalisasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Drainase , Irigasi serta permukiman						
		Arah Kebijakan 3.4.1.1.1. : Pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase,	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	60.00	72.50	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			Persentase Panjang Turap dalam Kondisi Baik	88.69	100.00	Program Pembangunan Turap, Talut dan Bronjong		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Irigasi dan Pemukiman	Indeks Kinerja Irigasi	43.24	45.14	Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Urusan Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap (%)	89.00	93.00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			Persentase Sistem Jaringan Drainase Jalan yang Berfungsi Baik	85.00	95.00	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
			Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota (%)	62.50	78.00	Program Pengendalian Banjir		
		Strategi 3.4.1.2. : Meningkatkan Arus Penumpang dan Barang						
		Arah Kebijakan 3.4.1.2.1. : Peningkatan Sarana Transportasi dan Lalu lintas	Persentase Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Trasportasi yang Aman	50.00	80.00	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan
			Persentase Kecukupan Kelengkapan Sarana Lalu Lintas	50.00	70.00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
			Persentase Pengoperasioan Kendaraan Bermotor yang laik jalan	50.00	75.00	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
			Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3.00	7.00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
	3.4.2. Meningkatnya Akses Air Minum yang Aman serta Sanitasi yang Layak	**Strategi 3.4.2.1. :** Ketersediaan Akses Air Minum Melalui Sistem Jaringan Perpipaan						
		Arah Kebijakan 3.4.2.1.1. : Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Infrastruktur Lingkungan yang Memadai (%)	88.00	100.00	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	DPUPRP/DINPER KPP
		Arah Kebijakan 3.4.2.1.2. : Pengamanan Sumber Air Baku yang Konsisten	Persentase Potensi Sumber Air Baku yang dimanfaatkan	33.33	75.00	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan
			Persentase Fasilitas Umum yang Memadai	12.50	37.50	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPER KPP
			Jumlah Infrastruktur Wilayah Pedesaan yang Memadai (%)	91.79	100.00	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPER KPP
			Persentase Infrastruktur Kebinamargaan dalam Kondisi Mantap	80.00	90.00	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPER KPP

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
			Cakupan Layanan Air Bersih (%)	70.00	75.75	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPERKPP
		Strategi 3.4.2.2. : Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal di Lingkungan Pemukiman yang Berbasis Masyarakat						
		Arah Kebijakan 3.4.2.2.1. : Advokasi Pembangunan Sanitasi yang Layak dan Aman bagi Masyarakat	Cakupan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota (%)	43.57	50.00	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	DPUPRP/DINPERKPP
			Persentase Rumah yang Bersanitasi	0.00	100.00			
			Persentase Pengembangan Perumahan yang Memiliki Site Plan	50.00	100.00	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	DINPERKPP
			Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Strategis Cepat Tumbuh (%)	0.00	100.00	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pekerjaan Umum	DINPERKPP
			Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan yang Mendapatkan Penanganan	0.00	40.00	Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	Pekerjaan Umum	DINPERKPP
MISI 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari								
4.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	4.1.1. Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	**Strategi 4.1.1.1. :** Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup						
		Arah Kebijakan 4.1.1.1.1. : Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	4.00	32.50	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Strategi 4.1.1.2. : Peningkatan Kesadaran, Ketaatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan						
		Arah Kebijakan 4.1.1.2.1. : Pengendalian Dampak Lingkungan yang Konsisten terhadap Dokumen Lingkungan	Indeks Pencemaran Air	0.00	50.01	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup		
			Persentase penurunan kasus lingkungan	42.80	15.00			
			Persentase Peningkatan Lokasi Pelestarian Keanekaragaman Hayati	100.00	100.00	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Capaian Program	Target Capaian		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH								
		Arah Kebijakan 4.1.1.2.2. : Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Tepat	Persentase Peingkatan Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	8.08	14.24	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam		
			Persentase Frekuensi Penyampaian Informasi Bidang Lingkungan Hidup	100.00	100.00	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
			Indeks Pencemaran Udara	0.00	90.01	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		
			Persentase Peingkatan Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	0.00	11.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	
		Arah Kebijakan 4.1.1.2.3. : Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Luas Hutan Konservasi	0.00	100.00	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		
			Persentase jumlah keanekaragaman hayati	100.00	100.00	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		
	4.1.2. Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang	**Strategi 4.1.2.1. :** Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Ruang						
		Arah Kebijakan 4.1.2.1.1. : Optimalisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang	2.00	3.00	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	DPUPRP
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW/RDTR	0.00	100.00	Program Pemanfaatan Ruang		
			Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	3 hari	3 hari			
			Pengawasan Ketaatan terhadap Rekomendasi Tata Ruang (%)	0.00	100.00	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Arah Kebijakan 4.1.2.1.2. : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Tutupan Vegetasi	52.41	52.41	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bangkaberisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari 10 (sepuluh) program unggulan dan 184 (seratus delapan puluh empat) program strategis yang dirumpunkan ke dalam 26 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD,

URUSAN WAJIB

1. URUSAN PENDIDIKAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pendidikan antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan pendidikan
8. Program Kegiatan Belajar Mengajar

2. URUSAN KESEHATAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kesehatan antara lain :

1. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
2. Program Upaya kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
9. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
10. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
11. Program Kemitraaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
14. Program keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
15. Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kepada Masyarakat

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pekerjaan Umum antara lain :

1. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong
3. Program Pembangunan Turap, Talut dan Brojong
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
8. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
9. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10. Program Pengendalian Banjir
11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
12. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
13. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
14. Program Peningkatan Pengembangan Prasarana Daerah

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perumahan Rakyat lain :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencagahan Bahaya Kebakaran

4. Program Pengelolaan Area Pemakaman

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Penataan Ruang antara lain :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perencanaan Pembangunan antara lain :

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
4. Program Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

7. URUSAN PERHUBUNGAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perhubungan antara lain :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasiliats Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9. URUSAN PERTANAHAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan antara lain :

1. Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
3. Program Pengembangan Sistem Infomasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan
3. Program Pemberdayaan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Keluarga Berencana Dan KeluargaSejahtera antara lain :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
5. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

13. URUSAN SOSIAL

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sosial antara lain :

1. Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Ketenagakerjaan antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

Program untuk urusan Penanaman Modal antara lain :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Pengembangan Sumber Daya Alam
3. Program Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam

17. URUSAN KEBUDAYAAN

Program yang akan dilakukan untuk urusan Kebudayaan antara lain :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Penyelamatan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program yang akan dilakukan urusan Pemuda dan Olahraga antara lain :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program yang akan dilakukan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
6. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program yang akan dilakukan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandianantara lain :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Insani
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
8. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program Penataan Kelembagaan
12. Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik
14. Program Advokasi dan Bantuan Hukum
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

17. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
18. Program Pendidikan dan Pelatihan
19. Program Ketatalaksanaan
20. Program Reformasi Birokrasi
21. Program Pelayanan Barang dan Jasa
22. Program Sosialisasi Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah
23. Program Pendidikan Kedinasan

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Program yang akan dilakukan untuk urusan Ketahanan Pangan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)
3. Program Peningkatan Bahan Makanan
4. Program Pengembangan Pola Pangan

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program yang akan dilakukan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
6. Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
7. Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Desa
8. Program Penataan Desa

23. URUSAN STATISTIK

Program yang akan dilakukan untuk urusan Statistik antara lain :

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

24. URUSAN KEARSIPAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kearsipan antara lain :

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

2. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program untuk urusan Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
2. Program Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perpustakaan antara lain :

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

URUSAN PILIHAN

27. URUSAN PERTANIAN

Program untuk urusan Pertanian antara lain :

1. Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Petani/Perkebunan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan

28. URUSAN KEHUTANAN

Program untuk urusan Kehutanan antara lain :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Program untuk urusan Energi dan Sumberdaya Mineral antara lain :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

30. URUSAN PARIWISATA

Program untuk urusan Pariwisata antara lain :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

31. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Program untuk Kelautan dan Perikanan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
3. Peningkatan Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan
4. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Kelautan
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
7. Program Pembangunan Sistem Penyuluhan Perikanan
8. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
9. Program Pengembangan Kawasan Pesisir
10. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kelautan
11. Program Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
12. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Perikanan
13. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
14. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
15. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan.

32. URUSAN PERDAGANGAN

Program untuk urusan Perdagangan antara lain :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

33. URUSAN INDUSTRI

Program untuk urusan Industri antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Pada tabel 8.1 disajikan program prioritas pembangunan yang disertai indikator kinerja serta pendanaannya secara indikatif sesuai dengan proyeksi keuangan daerah, sebagai berikut.

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			URUSAN RUTIN								
			Program Pada Setiap SKPD				**124,500,508,900**		**133,960,547,300**		**257,911,056,200**
X	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani	100.00	100.00	67,334,847,600	100.00	72,353,711,200	100.00	139,688,558,800
X	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100.00	100.00	40,497,862,500	100.00	43,657,702,200	100.00	84,155,564,700
				Persentase puskesmas yang memiliki manajemen dan informasi kesehatan	83.33	92.00		100.00		100.00	
X	1	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai	100.00	100.00	2,349,119,800	100.00	2,525,303,800	100.00	4,874,423,600
X	1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	100.00	100.00	10,740,364,300	100.00	11,545,891,600	100.00	22,286,255,900
				Persentase Auditor yang bersertifikat penjenjangan							
				Persentase Auditor yang bersertifikat							
X	1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu (%)	100.00	100.00	2,401,503,700	100.00	2,581,616,500	100.00	4,983,120,200
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan benar dan sesuai standar.	100.00	100.00		100.00		100.00	
X	1	07	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	Informasi Hasil Pembangunan Daerah (%)	100.00	100.00	926,811,000	100.00	996,322,000	100.00	1,923,133,000
X	1	09	Program Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Aset Pemerintah Daerah	Dukungan Sarana dan Prasarana Aset Pemerintah Daerah (%)	100.00	100.00	250,000,000	100.00	300,000,000	100.00	550,000,000
				Persentase Aset dan Barang Daerah yang diinventarisir	100.00	100.00		100.00		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			**URUSAN WAJIB**				**550,293,947,400**		**573,238,275,500**		**1,114,310,409,900**
1	01		**URUSAN PENDIDIKAN**				**54,082,194,600**		**58,138,359,100**		**112,220,553,700**
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio ketersediaan ruang kelas terhadap siswa PAUD	35.00	35.00	1,303,995,600	40.00	1,401,795,300	40.00	2,705,790,900
1	01	16	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Rasio Siswa SD Usia 7-12 Tahun terhadap Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	96.18	97.18	43,109,532,800	98.18	46,342,747,700	98.18	89,452,280,500
				Rasio Siswa SMP Usia 13-15 Tahun terhadap Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	84.57	86.69		88.86		88.86	
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM	5 PKBM	11 PKMB	1,523,331,900	11 PKBM	1,637,581,800	11 PKBM	3,160,913,700
				Jumlah LPK	3 LPK	6 LPK		6 LPK		6 LPK	
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD sesuai dengan kompetensi	72.50%	0.80	4,333,771,700	82.00	4,658,804,500	82.00	8,992,576,200
				Persentase Guru SMP sesuai dengan kompetensi	84.20%	0.91		92.00		92.00	
1	01	22	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian sekolah siswa SD	50.00	70.00	1,390,341,000	75.00	1,494,616,600	75.00	2,884,957,600
				Nilai rata-rata ujian nasional siswa SMP	51.30	53.00		55.00		55.00	
				Persentase siswa SD yang mendapat beasiswa	106.26	106.65		107.05		107.05	
1	01	23	Program Peningkatan Belajar Mengajar	Siswa SD berprestasi akademis dan non akademis	105.28	106.33	2,421,221,600	107.40	2,602,813,200	107.40	5,024,034,800
				Siswa SMP Berprestasi Akademis dan Non Akademis	39 Orang	39 Orang		39 Orang		39 Orang	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	**02**		**URUSAN KESEHATAN**				**124,389,138,100**		**115,735,944,400**		**240,125,082,500**
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan	80.00	80.00	11,473,270,100	90.00	12,333,765,300	90.00	23,807,035,400
				Persentase ketersedian perbekalan kesehatan sesuai standar	60.00	60.00		65.00		65.00	
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang menjalankan manajemen puskesmas	100.00	100.00	37,128,149,300	100.00	38,912,760,500	100.00	76,040,909,800
				Persentase lingkungan desa/kelurahan sehat	86.00	87.50		90.00		90.00	
				% Puskesmas yang memiliki sistem manajemen dan informasi pelayanan kesehatan	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase ketersedian perbekalan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase balita yang dipantau berat badannya (D/S)	76.90	79.00		80.00		80.00	
				Persentase pelayaan kesehatan pada usia produktif	0.00	50.00		60.00		60.00	
				persentase pelayanan kesehatan matra dan haji	100.00	100.00		100.00		100.00	
				persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase gedung RS yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase pengadaan alat kesehatan RS yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase obat-obatan yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase sarana dan prasaana keperawatan yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	02	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase produk pangan beredar yang memiliki sertifikat PIRT	85.00	100.00	15,329,300	100.00	16,479,000	100.00	31,808,300
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber PHBS	80.00	80.00	822,739,100	95.00	884,444,500	100.00	1,707,183,600

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan	100.00	100.00	171,731,600	100.00	184,611,500	100.00	356,343,100
				Persentase balita yang berat badannya naik (N/D)	85.10	86.00		86.00		86.00	
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Presentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular langsung	100.00	100.00	1,089,279,400	100.00	1,170,975,300	100.00	2,260,254,700
				Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit endemik/epidemik	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit menular seksual	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang menjalankan manajemen puskesmas	30.77	75.00	764,012,500	100.00	821,313,500	100.00	1,585,326,000
				Persentase FKTP yang memiliki SDM sesuai standar	16.60	60.00		60.00		60.00	
				Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	80.00	80.00		80.00		80.00	
				Persentase elemen penilaian akreditasi bagian tata usaha yang memenuhi standar akreditasi	85.00	85.00		85.00		85.00	
				Persentase elemen penilaian akreditasi bidang pelayanan yang memenuhi standar akreditasi	85.00	85.00		85.00		85.00	
				Persentase elemen penilaian akreditasi bidang perencanaan yang memenuhi standar akreditasi	85.00	85.00		85.00		85.00	
				Persentase elemen penilaian akreditasi bidang keperawatan yang memenuhi standar akreditasi	85.00	85.00		85.00		85.00	
				Persentase indikator SPM bagian tata usaha yang mencapai target	90.00	90.00		90.00		90.00	
				Persentase indikator SPM bagian pelayanan yang mencapai target	90.00	90.00		90.00		90.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase indikator SPM bagian perencanaan yang mencapai target	90.00	90.00		90.00		90.00	
				Persentase indikator SPM bagian keperawatan yang mencapai target	90.00	90.00		90.00		90.00	
				Persentase penyelesaian pengadauan masyarakat jasa rumah sakit	30 Kasus	30 Kasus		30 Kasus		30 Kasus	
				Bed Occupation Rate (BOR), Length of Stay (LOS), Turn Over Interval (TOI)	3 hari	3 hari		3 hari		3 hari	
				Persentase pelaksanaan mutu keperawatan	90.00	90.00		90.00		90.00	
1	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	80.00	82.00	18,599,150,600	85.00	19,224,808,300	85.00	37,823,958,900
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	100.00	100.00	18,400,646,000	100.00	5,567,594,000	100.00	23,968,240,000
				Persentase Gedung Rumah Sakit yang Terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase IPAL Rumah Sakit yang Terpenuhi	50.00	50.00		100.00		100.00	
				Persentase Gedung Rumah Sakit yang direhabilitasi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Alat Kesehatan yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Alat Penunjang Medis Rumah Sakit yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Obat-Obatan yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Bahan Logistik Rumah Sakit/Habis Pakai yang Terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	02	27	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase gedung RS yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase pengadaan alat kesehatan RS yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase sarana dan prasaana keperawatan yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	02	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97.23	100.00	52,494,200	100.00	56,431,300	100.00	108,925,500
				Persentase Pelayanan kesehatan balita	92.08	100.00		100.00		100.00	
1	02	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	0.00	60.00	73,887,800	80.00	79,429,400	80.00	153,317,200
1	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	92.71%	0.95	240,635,700	1.00	258,683,400	1.00	499,319,100
				Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan	94.64%	0.95		1.00		1.00	
1	02	38	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan	persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar	100.00	100.00	35,557,812,500	100.00	36,224,648,400	100.00	71,782,460,900
				persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pengembangan wajib sesuai standar	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase tenaga medis yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop	85.00	90.00		95.00		95.00	
				Persentase tenaga keperawatan dan kebidanan yang megikuti pelatihan/seminar/workshop	85.00	90.00		95.00		95.00	
				Persentase pendapatan rumah sakit	85.00	90.00		95.00		95.00	
				Persentase efisiensi anggaran rumah sakit	85.00	90.00		95.00		95.00	
				Persentase gedung RS yang terpenuhi	85.00	90.00		95.00		95.00	
				Persentase pengadaan alat kesehatan RS yang terpenuhi	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase obat-obatan yang terpenuhi	3 Hari	3 Hari		3 Hari		3 Hari	
				Persentase sarana dan prasaana keperawatan yang terpenuhi	3 Hari	3 Hari		3 Hari		3 Hari	
	03		**URUSAN PEKERJAAN**				**223,356,566,200**		**237,933,697,200**		**461,290,263,400**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	60.00	63.00	150,562,515,900	72.50	154,972,204,600	72.50	305,534,720,500
				Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap (%)	89.00	91.00		93.00		93.00	
1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Sistem Jaringan Drainase Jalan yang Berfungsi Baik	85.00	90.00	4,461,012,900	95.00	4,795,588,900	95.00	9,256,601,800
1	03	17	Program Pembangunan Turap, Talut dan Bronjong	Persentase Panjang Turap dalam Kondisi Baik	88.69	93.26	780,046,800	100.00	838,550,300	100.00	1,618,597,100
1	03	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	60.00	63.00	22,107,597,000	72.50	24,711,416,800	72.50	46,819,013,800
				Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap (%)	89.00	91.00		93.00		93.00	
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Indeks Kinerja Irigasi	43.24	43.24	5,405,912,400	45.14	9,970,995,200	45.14	15,376,907,600
1	03	26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Potensi Sumber Air Baku yang dimanfaatkan	33.33	66.67	239,930,800	75.00	257,925,600	75.00	497,856,400
1	03	27	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	70.00	72.15	16,078,315,400	75.75	17,391,689,000	75.75	33,470,004,400
				Cakupan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota (%)	43.57	47.14		50.00		50.00	
				Persentase Rumah yang Bersanitasi	0.00	100.00		100.00		100.00	
1	03	28	Program Pengendalian Banjir	Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota (%)	62.50	70.00	4,722,186,900	78.00	5,076,350,900	78.00	9,798,537,800
1	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Strategis Cepat Tumbuh (%)	0.00	50.00	12,614,655,500	100.00	12,808,254,000	100.00	25,422,909,500
1	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Infrastruktur Wilayah Pedesaan yang Memadai (%)	91.79	95.89	4,516,800,100	100.00	4,855,560,000	100.00	9,372,360,100
1	03		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Persentase Infrastruktur Kebinamargaan dalam Kondisi Mantap	80.00	84.31	1,500,000,000	90.00	2,000,000,000	90.00	3,500,000,000
1	03	33	Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan yang Mendapatkan Penanganan	0.00	30.00	167,592,500	40.00	180,161,900	40.00	347,754,400

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	03	42	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase Data dan Informasi terkait Infrastruktur	0.00	30.00	200,000,000		75,000,000		275,000,000
1	04		**URUSAN PERUMAHAN**				**13,846,444,200**		**14,884,928,200**		28,731,372,400
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan yang Memiliki Site Plan	50.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Peningkatan MBR yang memiliki Rumah	62.50	63.60		65.00		65.00	
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Infrastruktur Lingkungan yang Memadai (%)	88.00	94.00	12,822,144,000	100.00	13,783,805,500	100.00	26,605,949,500
1	04	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK	0.00	100.00	766,300,200	100.00	823,772,700	100.00	1,590,072,900
1	04	20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Fasilitas Umum yang Memadai	12.50	25.00	258,000,000	37.50	277,350,000	37.50	535,350,000
	05		**PENATAAN RUANG**				**1,117,239,500**		**1,201,032,400**		**2,318,271,900**
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang	2.00	2.00	729,986,900	3.00	784,735,900	3.00	1,514,722,800
1	05		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW/RDTR	0.00	100.00	215,000,000	100.00	231,125,000	100.00	446,125,000
				Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	3 hari	3 hari		3 hari		3 hari	
1	05		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Ketaatan terhadap Rekomendasi Tata Ruang (%)	0.00	100.00	172,252,600	100.00	185,171,500	100.00	357,424,100
	06		**URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**				**5,322,459,100**		**5,441,905,950**		**10,764,365,050**
1	06	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Data lyang Akurat dan Up to Date	100.00	100.00	1,018,542,700	100.00	1,071,547,700	100.00	2,090,090,400
				Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian	100.00	100.00		100.00		100.00	
				IKM Perikanan Tangkap	3.20	3.20		3.20		3.20	
				IKM Perikanan Budidaya	3.20	3.20		3.20		3.20	
				IKM Bidang Pencatatan dan Perizinan	3.20	3.20		3.20		3.20	
				IKM Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.20	3.20		3.20		3.20	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditempatkan	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Data yang Up to Date	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase puskesmas yang menjalankan manajemen puskesmas	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Cakupan Pelayanan Perpajakan sesuai SOP	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Kesesuaian Perencanaan Kawasan Permukiman	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase ketersediaan data yang akurat dan up to date	100.00	100.00	358,842,000	0.00		100.00	358,842,000
1	06	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kelengkapan Administrasi Penyelesaian Kasus Batas Wilayah Perbatasan	66.70	80.00	118,250,000	100.00	127,118,750	100.00	245,368,750
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian RKPD Bidang Sarana Prasarana terhadap RPJMD	100.00	100.00	3,196,104,000	100.00	3,710,788,000	100.00	6,906,892,000
				Persentase Kesesuaian RKPD Bidang Sosial Ekonomi terhadap RPJMD	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Kesesuaian Renja Bidang Sarana Prasana terhadap RKPD	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Kesesuaian Renja Bidang Sosial Ekonomi terhadap RKPD	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Kesesuaian Renstra Bidang Sarana Prasarana terhadap RPJMD	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Kesesuaian Renstra Bidang Sosial terhadap RPJMD	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Pelaksanaan Program OPD yang sesuai dengan Renja OPD	81.92	85.00		88.00		88.00	
				Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	97.01	100.00		100.00		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam musrenbang	25.00	28.00		30.00		30.00	
				Persentase usulan masyarakat melalui DPRD yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	0.00	0.00		100.00		100.00	
				Jumlah Dokumen Perencaaan Teknis KePUan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		3 Dokumen	
				Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	06	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan	100.00	100.00	420,728,000	100.00	452,283,000	100.00	873,011,000
1	06	23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan	100.00	100.00	74,575,000	100.00	80,168,500	100.00	154,743,500
1	06	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan	0.00	100.00	135,417,400			100.00	135,417,400
	07		**URUSAN PERHUBUNGAN**				**6,735,950,000**		**7,241,147,400**		**13,977,097,400**
1	07	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Trasportasi yang Aman	50.00	75.00	127,193,000	80.00	136,733,400	80.00	263,926,400
1	07	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Kecukupan Kelengkapan Sarana Lalu Lintas	50.00	66.67	615,948,000	70.00	662,144,000	70.00	1,278,092,000
1	07	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Pengoperasioan Kendaraan Bermotor yang laik jalan	50.00	65.00	2,018,101,000	75.00	2,169,459,000	75.00	4,187,560,000
1	07	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3.00	5.00	3,974,708,000	7.00	4,272,811,000	7.00	8,247,519,000
	08		**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**				**9,749,774,000**		**10,516,487,000**		**20,266,261,000**
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	4.00	32.00	7,839,612,000	32.50	8,427,583,000	32.50	16,267,195,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	0.00	50.00	1,098,036,000	50.01	1,180,389,000	50.01	2,278,425,000
				Persentase penurunan kasus lingkungan	42.80	25.00		15.00		15.00	
1	8	17	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Lokasi Pelestarian Keanekaragaman Hayati	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	8	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Peingkatan Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	8.08	0.00		14.24	35,480,000	14.24	35,480,000
1	8	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Frekuensi Penyampaian Informasi Bidang Lingkungan Hidup	100.00	100.00	34,911,000	100.00	37,529,000	100.00	72,440,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	8	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Pencemaran Udara	0.00	90.00	91,375,000	90.01	98,228,000	90.01	189,603,000
1	8	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Tutupan Vegetasi	52.41	52.41	685,840,000	52.41	737,278,000	52.41	1,423,118,000
	09		**URUSAN PERTANAHAN**				**8,005,246,500**		**8,605,639,000**		**16,610,885,500**
1	9	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	0.00	50.00	7,343,880,000	60.00	7,894,671,000	60.00	15,238,551,000
				Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	9	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penurunan Konflik Pertanahan	100.00	100.00	636,616,000	100.00	684,362,000	100.00	1,320,978,000
1	9	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen Informasi Pertanahan	1.00	1.00	24,750,500	1.00	26,606,000	1.00	51,356,500
	10		**URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**				**197,575,000**		**2,123,932,000**		**2,321,507,000**
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Proses Penerbitan Dokumen Kependudukan :			197,575,000		2,123,932,000		2,321,507,000
				- Akta Kelahiran	7 hari	3 hari		2 hari		2 hari	
				- Kartu Keluarga	7 hari	3 hari		2 hari		2 hari	
				- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	7 hari	3 hari		2 hari		2 hari	
				- Akta Kematian	7 hari	3 hari		2 hari		2 hari	
				- Akta Perkawinan	11 hari	3 hari		2 hari		10 hari	
				- Akta Perceraian	11 hari	3 hari		2 hari		10 hari	
	11		**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**818,233,500**		**879,600,000**		**1,697,833,500**
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan dan Pembinaan KDRT	0.25	0.20	127,711,000	0.15	137,289,000	0.15	265,000,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan	Peningkatan Keluarga Berkualitas	64117	73748.00	647,562,500	75069.00	696,129,000	75069.00	1,343,691,500
1	11	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Pembangunan (Orang)	90.00	90.00	42,960,000	90.00	46,182,000	450.00	89,142,000
	12		**URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**				**1,368,744,000**		**1,471,399,500**		**2,840,143,500**
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	76.83%	0.89	832,356,000	0.92	894,783,500	0.92	1,727,139,500
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pasangan Usia Subur yang Istrinya Berusia dibawah 20 Tahun (PUS)	2,269.00	2559.00	55,019,000	2723.00	59,145,000	2723.00	114,164,000
1	12	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap Tahun (Alkon)	112,471.00	129341.00	233,437,000	134965.00	250,945,000	134965.00	484,382,000
1	12	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Jumlah Kelompok KB/KR yang Mandiri	71.00	75.00	37,625,000	77.00	40,446,000	77.00	78,071,000
1	12	22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Dokumen Data Informasi Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	0.00	1.00	210,307,000	1.00	226,080,000	5.00	436,387,000
	13		**URUSAN SOSIAL**				**5,982,430,200**		**6,369,237,500**		**12,351,667,700**
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100.00	100.00	5,923,390,200	100.00	6,305,769,500	100.00	12,229,159,700
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Jaminan Sosial	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Perlindungan Sosial	0.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	11.00	11.00		28.00		39.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	50.00	100.00	59,040,000	100.00	63,468,000	100.00	122,508,000
1	13		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Efektivitas Implementasi Managemen Penanggulangan Bencana Alam	100.00	100.00	415,000,000	100.00	490,000,000	100.00	905,000,000
	14		**URUSAN KETENAGAKERJAAN**				**220,950,000**		**237,522,000**		**458,472,000**
1	14	15	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang terampil dan Kompeten	3.12	3.17	100,887,000	3.17	108,454,000	3.17	209,341,000
				Persentase Meningktnya Tenaga Kerja yang Terampil dan Kompeten	10.50	10.53		13.33		13.33	
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	5.58	18.42	120,063,000	18.89	129,068,000	18.89	249,131,000
1	14	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang membuat & Mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku	13.41	18.29		23.10		23.10	
	15		**URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**				**551,752,200**		**593,133,000**		**1,144,885,200**
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan Yang Dilayani	4.00	5.00		6.00		6.00	
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan Yang Dilayani	4.00	5.00	513,407,200	6.00	551,912,000	6.00	1,065,319,200

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pembinaan, Berkreteria Sehat, Minimal Melakanakan RAT Setahun sekali sesuai Permenkop UKM Nomor 22 Tahun 2017	86.00	87.00	38,345,000	88.00	41,221,000	88.00	79,566,000
	16		**URUSAN PENANAMAN MODAL**				**328,903,200**		**353,570,000**		**682,473,200**
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Investasi Yang Dilaksanakan	8.00	9.00		10.00		10.00	
				Persentase Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	8.00	9.00		10.00		10.00	
1	16	17	Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam	Evaluasi Kebijakan KDH dalam Bidang Sumber Daya Alam (%)	70.00	100.00	161,525,200	100.00	173,639,000	100.00	335,164,200
1	16	18	Program Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam	BUMD Berkinerja Baik (%)	25.00	50.00	167,378,000	75.00	179,931,000	75.00	347,309,000
	17		**URUSAN KEBUDAYAAN**				**1,821,902,000**		**1,958,544,000**		**3,780,446,000**
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Apresiasi Pemerintah terhadap Seniman dan Budayawan	36.36	36.36	1,321,272,000	54.55	1,420,367,000	54.55	2,741,639,000
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	35.71	57.14	176,489,000	71.43	189,726,000	71.43	366,215,000
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pagelaran dan Festival Budaya Daerah	9.09	18.18	265,886,000	27.27	285,827,000	27.27	551,713,000
1	17	18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	25.00	25.00	58,255,000	50.00	62,624,000	50.00	120,879,000
1	**18**		**URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**7,833,910,000**		**8,421,454,000**		**16,255,364,000**
1	18	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif berorganisasi	95.00	95.00	1,301,262,000	100.00	1,398,857,000	510 Orang	2,700,119,000
1	18	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0.02	0.02	175,589,000	0.03	188,758,000	0.03	364,347,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	18	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Kepemudaan	Persentase sarana dan prasarana pemuda yang memadai	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi	100.00	100.00	80,634,000	100.00	86,682,000	100.00	167,316,000
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang berkembang di Masyarakat	95.00	95.00	3,650,649,000	100.00	3,924,448,000	100.00	7,575,097,000
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	0.00	100.00		0.00		100.00	
1	18	21	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	99.99	99.99	2,625,776,000	100.00	2,822,709,000	100.00	5,448,485,000
1	**19**		**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**				**6,384,854,000**		**7,210,404,500**		**13,595,258,500**
1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Siskamling	100.00	100.00	140,717,500	100.00	151,271,000	100.00	291,988,500
1	19	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	97.00	98.00	4,612,068,000	100.00	4,957,973,000	100.00	9,570,041,000
				Angka Tunawisma (%)	0.60	0.50		0.50		0.50	
				Angka Prostitusi (%)	1.50	1.50		1.25		1.25	
				Persentase Penjualan Minuman Beralkohol tanpa	0.80	0.70		0.70		0.70	
				Persentase Angka Kasus Perjudian	7.00	7.00		6.75		6.75	
				Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adiktif	7.80	7.80		7.80		7.80	
1	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.00	3.00	1,383,691,000	4.00	1,487,467,000	4.00	2,871,158,000
1	19	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota per 10.000	40.00	41.00	182,230,500	42.00	195,897,000	42.00	378,127,500
1	19	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Tingkat Kriminalitas yg terkait dengan Penyakit Masyarakat (%)	20.00	17.50	66,147,000	17.00	71,109,000	17.00	137,256,000
1	19	23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU	Presentase Objek Vital Pemda yang Aman dan Terawasi	0.00	100.00	-	100.00	346,687,500	100.00	346,687,500

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	**20**		**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**				**66,557,094,000**		**71,476,379,850**		**128,811,660,850**
1	20	08	Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Insani	Jumlah Prestasi Regional dan Nasional di Bidang IMTAQ	20.00	50.00	3,590,601,000	50.00	3,859,896,000	50.00	7,450,497,000
1	20	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	% Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Perundang-Undangan	0.00	100.00	33,956,926,000	100.00	36,503,696,000	100.00	70,460,622,000
				% Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Keuangan	0.00	100.00		100.00		100.00	
				% Cakupan Pemenuhan SOP Bidang Umum	0.00	100.00		100.00		100.00	
1	20	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Koordinasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100.00	100.00	3,839,026,000	100.00	4,126,953,000	100.00	7,965,979,000
1	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibanding Target	100.00	100.00	8,973,337,000	100.00	9,646,338,000	100.00	18,619,675,000
				Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor PBB dan BPHTB	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Potensi PAD	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Penerimaan Daerah dari Sektor Dana Perimbangan/Transfer	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Penerimaan dari dana transfer provinsi	73.63	74.00		75.00		75.00	
				Persentase OPD yang Menerapkan Penganggaran yang Tepat Sasaran dan Tepat Waktu	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase OPD yang Mencatat Aset ke dalam Buku Inventaris secara	100.00	100.00		100.00		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Benar dan sesuai Standar	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase OPD yang menggunakan Aset secara tepat	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan benar dan sesuai standar.	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase OPD yang menerapkan sistem pengelolaan informasi keuangan daerah yang baik/ Persentase tercapainya target kinerja	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Penatausahaan Perbendaharaan dengan baik	100.00	100.00		100.00		100.00	
				Persentase Penyerapan Belanja Daerah Tahunan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	20	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan penyusunan dan Pelaporan APBDesa Tepat Waktu (%)	90.00	98.00	53,750,000	100.00	57,781,250	100.00	111,531,250
1	20	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SAKIP OPD yang dibina	0.00	34 OPD	1,966,268,000	34 OPD	2,113,738,000	34 OPD	4,080,006,000
				Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Keuangan yang Material	34 OPD	34 OPD		34 OPD		34 OPD	
				Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset yang Material	34 OPD	34 OPD		34 OPD		34 OPD	
				Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti	34 OPD	34 OPD		34 OPD		34 OPD	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat		14.00					
				Persentase OPD yang menerapkan SPIP							
1	20	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dokumen)	0.00	2.00	1,429,525,000	2.00	1,536,739,000	2.00	2,966,264,000
1	20	25	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah	0.00	1.00	200,000,000	1.00	265,000,000	3.00	465,000,000
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda yang diajukan dan Raperbup yang disahkan (%)	100.00	100.00	344,979,000	100.00	370,852,000	100.00	715,831,000
1	20	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Kelengkapan Administrasi Pemekaran Wilayah (Kel/Lingk)	9/47	19/55	167,807,000	21/64	180,393,000	21/64	348,200,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	20	29	Program Penataan Kelembagaan	Jumlah SKPD yang telah Memiliki SOP, Anjab, ABK dan Tupoksi yang Transparan dan Akuntabel	48.00	53.00	292,808,000	53.00	314,769,000	53.00	607,577,000
1	20	30	Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance	Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan	Baik	Baik	93,568,000	Baik	100,586,200	Baik	194,154,200
1	20	32	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Jenis dan Jumlah Pelayanan Publik	2/15	2/15	133,652,000	2/15	143,676,000	2/15	277,328,000
				Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan sesuai SOP	96.00	97.00		99.00		99.00	
1	20	33	Program Advokasi dan Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum	1 Kasus	2 Kasus	445,084,000	2 Kasus	478,465,000	2 Kasus	923,549,000
1	20	39	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	12.00	14.00	86,648,000	40.00	93,147,400	40.00	179,795,400
				Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	39.00	39.00		50.00		50.00	
				Persentase data profil aparatur yang up to date	39.00	39.00		50.00		50.00	
1	20	40	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Aparatur	70.00	75.00	1,524,555,000	85.00	1,638,897,000	85.00	2,741,639,000
				Persentase aparatur yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya	12.00	14.00		40.00		40.00	
1	20	41	Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase rekrutmen aparatur yang kompeten	50.00	50.00	2,188,488,000	50.00	2,352,625,000	50.00	4,541,113,000
				Persentase aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi	50.00	50.00		100.00		100.00	
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai SOP berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	20	44	Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100.00	100.00	332,631,000	0.00	357,579,000	100.00	690,210,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	20	45	Program Ketatalaksanaan	SKPD yang Menerapkan SiNovik (Sistem Inovasi Pelayanan Publik)	0.00	4.00	512,730,000	8.00	551,184,000	8.00	1,063,914,000
1	20	46	Program Reformasi Birokrasi	Peningkatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)	0.00	30.00	107,785,000	40.00	115,869,000	40.00	223,654,000
1	20	47	Program Pelayanan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan RUP (%)	0.00	50.00	1,932,623,000	75.00	2,077,570,000	75.00	4,010,193,000
1	20		Program Sosialisasi Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah	Persentase Tercapainya Target Kinerja (%)	100.00	100.00	84,303,000	100.00	90,626,000	100.00	174,929,000
1	20		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan yang ditindaklanjuti (%)	0.00	100.00	4,300,000,000	100.00	4,500,000,000	100.00	8,800,000,000
1	**21**		**URUSAN KETAHANAN PANGAN**				**2,066,045,000**		**2,128,740,900**		**4,194,785,900**
1	21	21	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Toko/Warung Penyedia Bahan Pangan Strategis (%)	1.00	1.12	748,543,000	1.50	748,543,000	1.50	1,497,086,000
				Persentase Pasar Tradisional Yang Diawasi	70.00	80.00		90.00		90.00	
				Persentase Pasar Modern yang Diawasi	70.00	80.00		90.00		90.00	
				Persentase Desa yang Memiliki Lumbung Pangan	3.70	3.70		6.17		6.17	
				Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan yang Dimikiki Pemerintah Daerah	0.00	0.00		15.00		15.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	21	27	Program Peningkatan Bahan Makanan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Lokal (%)	54.00	54.00	16,280,000	100.00	17,908,000	100.00	34,188,000
				Persentase Masyarakat Yang Mampu Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi (%)	39.51	41.97		44.45		44.45	
1	21	28	Program Pengembangan Pola Pangan	Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita/Tahun (%)	0.10	0.15	30,679,000	0.15	33,746,900	0.15	64,425,900
				Persentase Peningkatan Konsumsi 8 Kelompok Bahan Pangan Per Kapita/Tahun (%)	1.25	1.50		1.75		1.75	
				Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (%)	49.38	55.56		61.73		61.73	
				Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengolah Pangan Lokal (%)	15.35	21.28		26.28		26.28	
1	21		Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Produsen Pangan Segar Yang Mendapatkan Yang Mendapatkan Sertifikasi	8.65	10.00	522,000,000	12.50	580,000,000	12.50	1,102,000,000
				Persentase Penjual Yang Diberikan Pembinaan tentang Keamanan Pangan Segar (%)	8.12	9.60		12.00		12.00	
				Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	100.00	100.00		100.00		100.00	
1	21		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/ 2013)	60.00	65.00	748,543,000	70.00	748,543,000	70.00	1,497,086,000
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**5,861,720,000**		**6,301,348,100**		**12,163,068,100**
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat	61.00	67.75	382,195,000	70.00	410,859,000	70.00	793,054,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	22	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	96.46	100.00	380,567,000	100.00	409,110,100	100.00	789,677,100
1	22	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi Masyarakat Desa	99.24	100.00	2,392,598,000	100.00	2,572,042,000	100.00	4,964,640,000
	22	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	98.85	100.00	955,540,000	100.00	1,027,205,000	100.00	1,982,745,000
1	22	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan (%)	75.04	78.23	37,788,000	79.07	40,623,000	79.07	78,411,000
				Persentase TK Wanita yang bekerja pada sektor IKM	23.50	24.08		24.76		24.76	
1	22	20	Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan	100.00	100.00	146,989,000	100.00	158,013,000	100.00	305,002,000
1	20	23	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase Cakupan Kelompok Binaan PKK	100.00	100.00	1,417,646,000	100.00	1,523,969,000	100.00	2,941,615,000
1	20	46	Program Penataan Desa	Peraturan Bupati tentang Batas Desa	80.00	80.00	148,397,000	82.00	159,527,000	82.00	307,924,000
	23		**URUSAN STATISTIK**				**385,292,600**		**458,900,000**		**844,192,600**
1	23	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Data Informasi Statistik yang Akurat dan Up to Date	100.00	100.00	385,292,600		458,900,000	100.00	844,192,600
	24		**URUSAN KEARSIPAN**				**226,403,000**		**240,608,000**		**467,011,000**
1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Arsip Dinamis Daerah yang terselamatkan	3.39	7.49	37,015,000	20.04	37,015,000	20.44	74,030,000
				Persentase Arsip Dinamis Daerah yang disusutkan dan dimusnahkan	0.00	0.00		12.55		12.55	
				Persentase Arsip Statis Daerah yang diselamatkan dan diakuisisi	0.00	0.00		17.65		17.65	
				Persentase Arsip Statis Daerah yang direproduksi	0.00	0.00		2.99		2.99	
1	24	17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang Tertib Arsip	48.65	83.48	34,899,000	100.00	37,517,000	100.00	72,416,000
				Persentase Arsip Dinamis dan Statis Daerah yang tertata dan terpelihara baik	100.00	100.00		100.00		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	24	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang Dibina dan Dilatih	87.83	87.83	154,489,000	100.00	166,076,000	100.00	320,565,000
	25		**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**2,536,551,500**		**2,726,792,500**		**5,263,344,000**
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional (%)	60.00	90.00	1,217,644,500	100.00	1,308,967,000	100.00	2,526,611,500
1	25	17	Program Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat	50.00	90.00	43,571,000	100.00	46,839,500	100.00	90,410,500
1	25	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Citra Positif Pemerintah di Mata Masyarakat (%)	100.00	100.00	1,275,336,000	100.00	1,370,986,000	100.00	2,646,322,000
	26		**URUSAN PERPUSTAKAAN**				**546,575,000**		**587,569,000**		**1,134,144,000**
1	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jenis Koleksi, Sarpras dan Layanan Perpustakaan (%)	50	50.00	546,575,000	66.67	587,569,000	66.67	1,134,144,000
				Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daerah	88.89	92.59		96.30		96.30	
				Persentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	57.33	59.00		72.00		72.00	
2			**URUSAN PILIHAN**				**30,673,325,025**		**34,353,398,400**		**64,621,822,925**
2			**URUSAN PERTANIAN**				**16,769,389,700**		**20,063,685,500**		**36,833,075,200**
	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Gapoktan Penerima PUAP	100.00	100.00	1,361,456,000	100.00	1,463,566,000	100.00	2,825,022,000
				Persentase Gapoktan dengan usaha agribisnis	100.00	100.00		100.00		100.00	
2	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Benih/Bibit Tanaman	1.65	1.69	1,132,988,000	1.73	1,217,962,000	1.73	2,350,950,000
				Persentase Kelompok Tani yang menerima Sarana Prasarana Pertanian	78.08	85.00		100.00		100.00	
				Persentase Kelompok Tani yang Menanam Holtukultura	2.75	2.94		3.00		3.00	
				Persentase Luas Tanam Pertanian	1.81	1.93		2.27		2.27	
2	01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Teknologi Pertanian	75.00	75.00	223,396,000	77.00	240,150,000	77.00	463,546,000

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Poktan yang Menggunakan Benih Padi Bersertifikat	10.00	11.00	8,090,276,000	13.00	10,822,741,000	13.00	18,913,017,000
				Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dengan Cepat dan Tepat	7.00	10.00		12.00		12.00	
				Persentase Poktan yang Menggunakan Pupuk Subsidi dan Organik	70.00	75.00		77.00		77.00	
				Persentase Kelompok Tani yang Menanam Tanaman Perkebunan	2.12	2.26		2.40		2.40	
				Persentase Kelompok Tani yang menerima Sarana Prasarana Perkebunan	100.00	100.00		100.00		100.00	
2	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular/Zoonosis yang ditangani	100.00	100.00	685,967,000	100.00	737,415,000	100.00	1,423,382,000
2	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Ternak yang Sehat	100.00	100.00	1,711,177,000	100.00	1,839,515,500	100.00	3,550,692,500
2	01	25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan	Persentase Kelompok Tani yang menerima sarana prasarana perkebunan	100.00	100.00	3,564,129,700	100.00	3,742,336,000	100.00	7,306,465,700
2	**02**		**URUSAN KEHUTANAN**				**437,890,000**		**-**		**437,890,000**
2	02	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Peingkatan Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	0.00	11.16	62,890,000	0.00	-	11.16	62,890,000
2	02	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase jumlah keanekaragaman hayati	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-
2	02	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase peningkatan Luas hutan konservasi	0.00	100.00	375,000,000	0.00	-	100.00	375,000,000
2	**03**		**URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**				**-**		**-**		**-**
2	03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikkan	Jumlah dan Jenis Energi Alternatif yang dikembangkan (Unit)	3.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-
2	**04**		**URUSAN PARIWISATA**				**3,578,223,000**		**3,846,591,100**		**7,424,814,100**
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi pariwisata melalui in bound dan in take	100.00	100.00	2,484,901,000	100.00	2,671,269,000	100.00	5,156,170,000
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase objek wisata yang dikelola dengan baik dan beragam	100.00	100.00	878,725,000	100.00	944,630,100	100.00	1,823,355,100

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Mitra Pariwisata yang dibina	100.00	100.00	214,597,000	100.00	230,692,000	100.00	445,289,000
2	**05**		**URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN**				**5,140,304,100**		**5,059,056,500**		**10,199,360,600**
2	05	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	517.79	553.93	2,092,752,900	592.70	2,182,938,900	592.70	4,275,691,800
				Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna (%)	15.00	16.00		17.00		17.00	
				Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Kemitraan	20.00	22.00		24.00		24.00	
2	05	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	26,793.05	28090.00	3,014,153,700	30056.30	2,840,215,300	30056.30	5,854,369,000
2	05	27	Program Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Prosentase Penurunan Produksi Perikanan yang Menggunakan Zat Adiktif	10.00	10.00	33,397,500	5.00	35,902,300	5.00	69,299,800
2	**06**		**URUSAN PERDAGANGAN**				**4,289,412,500**		**4,891,601,000**		**8,776,113,000**
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penurunan Peredaran Barang dan jasa yang tidak sesuai standar	16.22	10.81	34,512,000	8.11	37,101,000	8.11	71,613,000
				Persentase Alat UTTP yang ditera/tera Ulang	100.00	100.00		100.00		100.00	
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	17.65	23.53	3,850,000,000	29.41	4,854,500,000	29.41	8,704,500,000
				Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	17.65	23.53		29.41		29.41	
				% Peningkatan Ketersediaan Barang sampai di Tingkat Pasar	70.83	91.67		95.83		95.83	
2	06	14	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	% Peningkatan Nilai ekspor perdagangan	8.07	8.25	404,900,500	8.61	560,300,000	8.61	965,200,500
2	**07**		**URUSAN INDUSTRI**				**458,105,725**		**492,464,300**		**950,570,025**
2	07	15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase Peningkatan Penjamin Mutu Produk IKM	68.74	69.20	27,145,600	70.47	29,184,000	70.47	56,329,600
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan IKM	9.58	11.11	391,294,600	13.33	420,641,700	13.33	811,936,300
				Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	9.58	11.11		13.33		13.33	
				% Peningkatan IKM yang berbasis teknologi	68.74	69.20		70.47		70.47	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	07	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)	0.00	0.00	39,665,525	100.00	42,638,600	100.00	82,304,125
							705,467,781,325		**741,552,221,200**		**1,436,843,289,025**

SKPD Penanggung Jawab
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Dinkes
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
BPKAD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
BPKAD

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Kesehatan
RSUD Sungailiat
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
RSUD Sungailiat

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
RSUD Sungailiat
RSUD Sungailiat

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
RSUD Sungailiat

SKPD Penanggung Jawab
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
DINPERKPP
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
DINPERKPP

SKPD Penanggung Jawab
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
DINPERKPP
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
BAPPEDA
DINPERKAN

SKPD Penanggung Jawab
DINAKERPERINDAG
DINSOSPEMDES
Dinas Kesehatan
BP2RD
DINPERKPP
Bag. Adm. Pemerintahan Umum Setda Bangka/Seluruh SKPD
Bag. Adm. Pemerintahan Umum Setda
BAPPEDA

SKPD Penanggung Jawab
DINPERKPP
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Lingkungan Hidup

SKPD Penanggung Jawab
DINPERKPP
DINPERKPP
DINPERKPP
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

SKPD Penanggung Jawab
Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DINPERKPP

SKPD Penanggung Jawab
Dinsospemdes
Satpol PP
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Penanaman Modal, P2TSP, Koperasi dan UMKM

SKPD Penanggung Jawab
Bag. Perekonomian Setda Kab. Bangka
Bag. Perekonomian Setda Kab. Bangka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

SKPD Penanggung Jawab
BKPSDMD
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Kesbangpol
Satuan Polisi Pamong Praja
Kesbangpol/Setda
Satuan Polisi Pamong Praja
Kesbangpol/Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja

SKPD Penanggung Jawab
Setda Bag. Administrasi Kesra dan Kesejahteraan Masyarakat/Kecamata
Sekretariat DPRD
Setda Bag. Umum dan Perlengkapan
BP2RD

SKPD Penanggung Jawab
BPKAD
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

SKPD Penanggung Jawab
Bag. Hukum dan HAM Setda Bangka
Bag. Adm. Pemerintahan Umum Setda Bangka/Seluruh SKPD
Bag. Hukum dan HAM Setda Bangka
Bag. Adm. Pemerintahan Setda

SKPD Penanggung Jawab
Bag. Organisasi Setda
Bagian Adm. Pemerintahan Umum
Bagian Adm. Pemerintahan Umum/Kecamatan/DPMP2TSP,Koperasi dan UMKM
DINPMP2KUMKM
Bag. Hukum dan HAM Setda Bangka
BKPSDMD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
BKPSDMD/Bag. Organisasi Setda
BKPSDMD
BKPSDMD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

SKPD Penanggung Jawab
Bag. Organisasi Setda
Bag. Organisasi Setda
Bag. Adm. Pembangunan dan Bag. Administrasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Bag. Humas dan Pratokol Setda Bangka
Kecamatan
Dinas Pangan
Dinas Pertanian

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pangan
Dinas Pangan
Dinas Pangan
Dinas Pertanian
Kecamatan

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinakerperindag
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAPPEDA
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dinas Kominfo dan Statistik/Bag.Adm.Humas dan Pratokol
Dinas Kominfo dan Statistik/Bag.Adm.Humas dan Pratokol
Dinas Kominfo dan Statistik/Bag.Adm.Humas dan Pratokol
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Bag.Adm.Perekonomian dan ESDM
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Disnaker, Perindustrian dan Perdagangan
Disnaker, Perindustrian dan Perdagangan
Disnaker, Perindustrian dan Perdagangan
Disnaker, Perindustrian dan Perdagangan
Disnaker, Perindustrian dan Perdagangan

SKPD Penanggung Jawab
Disnaker, Perindustrian dan Perdagangan

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penentapan indikator kinerja didasarkan dengan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraanya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dipakai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dari ketiga aspek itu juga diperoleh data primer dari kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instasi pemerintah. Dengan hal tersebut maka untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka tahun 2014-2018 dapat dicapai, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TABEL 9.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2014 - 2018

MISI		Sasaran							
		Uraian		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 3)	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir RPJMD
1.	***Mewujudkan Pertanian yang Tangguh***	1.1.1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Daerah	Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	%	5.08	6.14	6.77	6.77
				PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Rp	Rp. 1.843.751,00	Rp. 2.068.519,00	Rp. 2.241.500	Rp. 2.241.500
				PDRB sub sektor perikanan	Rp	Rp. 670.903,00	Rp. 737.184,00	Rp. 670.903,00	Rp. 670.903,00
2.	***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani***	2.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	CC	BB	BB	BB
				Hasil EKPPD terhadap LPPD	Kategori	ST	ST	ST	ST
		2.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
		2.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	64.39	66.12	67.20	67.20
3.	***Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera***	3.1.1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB Perkapita (%)	%	4.73	5.27	5.81	5.81
				Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	%	53.18	53.74	54.05	54.05
		3.1.2	Stabilitas Harga	Tingkat Inflasi Bahan Pangan (%)	%	6.18	5.62	5.16	5.16
		3.1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	%	5.52	5.41	5.40	5.40
		3.1.4	Meningkatnya Usaha Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	4.48	4.52	5.50	5.50
		3.2.1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12.37	12.40	12.43	12.43
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7.96	8.00	8.02	8.02
		3.3.1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	70.52	70.54	70.56	70.56
				Persentase Balita Gizi Buruk	%	1.34	1.34	1.30	1.30
				Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1.000/KH	4.40	4.30	4.20	4.20
				Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1000 Kelahiran Hidup	1.000/KH	0.85	0.85	0.82	0.82
		3.4.1	Meningkatnya Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi dalam Kondisi Baik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	%	70.00	73.25	77.75	77.75
				Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	%	96.76	96.76	100.00	100.00
				Persentase Panjang Jembatan Baik di Kabupaten Bangka (%)	%	88.70	91.88	92.26	92.26
				Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat (%)	%	62.35	73.20	82.00	82.00
		3.4.2	Meningkatnya Akses Air Minum yang Aman serta Sanitasi yang Layak	Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih	%	89.60	97.04	98.85	98.85
				Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	86.90	91.67	98.20	98.20
4.	***Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari***	4.1.1	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Penilaian Adipura	Skor	75.00	75.00	75.50	75.50
				Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64.99	65.00	65.01	65.01

MISI		Sasaran							
		Uraian		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 3)	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir RPJMD
		4.1.2.	Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	95.92	100.00	100.00	100.00
				Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	32.38	32.38	32.38	32.38

BAB X
PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2013 –2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005 – 2025. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran visi dan misi dari bupati terpilih selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2019, sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 maka beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai pedoman transisi adalah sebagai berikut:

a. Rancangan program indikatif Tahun 2019 mengacu pada program indikatif Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum RPJMD Kabupaten Bangka Bangka Tahun 2018-2023 selesai disusun, dengan memperhatikan arahan visi-misi Kepala Daerah terpilih, Capaian SPM dan Arahan Sasaran Pembangungan Kabupaten Bangka Jangka Panjang (RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025).
b. Dalam implementasi pedoman transisi ini diperlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, DPRD dan seluruh stake holders pembangunan untuk dapat merumuskan program indikatif yang mencerminkan kesinambungan pembangunan daerah.

10.2. Prinsip-prinsip Kaidah Pelaksanaan

Guna menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018, maka prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2013–2018 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah

b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2013–2018 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2014; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018..

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangka berkewajiban untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian arah kebijakan yang telah diamanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018, Rencana strategis SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Bangka;

d. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun2014-2018 dengan sebaik-baiknya.

e. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD dan implementasinya dalam Renja SKPD tahunan; dan SKPD berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja secara berkala kepada Bupati Bangka.

f. RPJMD dipakai sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 tahunan dan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2014-2018. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diperlukan adanya revisi atau penyesuaian dengan perkembangan situasi pembangunan nasional dan regional Kepulauan Bangka Belitung akan dilakukan revisi dan penyesuaian dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

g. Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD diperlukan regulasi sebagai dasar pelaksanaan yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati maupun Keputusan Kepala SKPD.

BAB XI
PENUTUP

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari seluruh proses manajemen untuk pencapaian tujuan tertentu. Dalam proses model manajemen, perencanaan adalah kegiatan yang cukup penting dalam seluruh kegiatan pemenuhan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu (*goal*). Keinginan mencapai tujuan ini dipenuhi melalui manajemen pencapaian tujuan tertentu juga. Dalam proses manajemen, fungsi yang dalam urutannya menempati posisi awal kegiatan adalah perencanaan. Karena itu fungsi ini sangat menentukan arah pencapaian tujuan. Kekeliruan dalam peletakan rencana-rencana bisa mengakibatkan inefisiensi atau inefektivitas dalam proses manajemen selanjutnya. Akhirnya pencapaian tujuan menjadi tidak optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penyesuaian Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 merupakan peninjauan kembali penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, dan Review RPJMD ini serta merta dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Review RPJMD juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), setiap tahunnya selama periode tersebut.

Untuk mewujudkan visi Bupati Bangka Tahun 2014-2018: "**Bangka Bermartabat**" maka setidaknya perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance dan Clean Governmen,* konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan; keberpihakan kepada rakyat serta partisipasi aktif masyarakat, media massa, dan pihak swasta; mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif, akuntabilitas kinerja

pelayanan publik yang baik dan yang tidak kalah pentingnya dukungan politik dan anggaran dari DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka komitmen dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka diharapkan akan membawa masyarakat yang mandiri dan sejahtera sebagai mana yang telah ditetapkan melalui Visi dan Slogan **: " Bangka Bermartabat".**